

**ANALISIS KONSOLIDASI PELEMBAGAAN PARTAI
POLITIK PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024
STUDI KASUS PARTAI GOLONGAN KARYA
DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Upaya Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial pada Program Studi Ilmu Politik, Jurusan
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Oleh :

**NAMA : NADYA SITTA CAHYA SAFITRI
NIM : B1B221117**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KONSOLIDASI PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024
STUDI KASUS PARTAI GOLONGAN KARYA
DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Nama : Nadya Sitta Cahya Safitri
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Nim : B1B221117

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing
2 untuk diajukan ke Sidang Skripsi

Jambi, 03 Juli 2024

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Dimas Subekti, S.IP.,M.I.P.
NIP.199802052023211007

Revi Jeane Putri, M.Han.
NIP. 199101272024062001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KONSOLIDASI PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024
STUDI KASUS PARTAI GOLONGAN KARYA
DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Nama : Nadya Sitta Cahya Safitri
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Nim : B1B221117

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas
Jambi

Jambi, 03 Juli 2025
Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.IP.	Ketua Pembahas	
2	Dimas Subekti, S.IP.,M.I.P.	Pembimbing 1	
3	Revi Jeane Putri, M.Han	Pembimbing 2	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hartati, S.H.,M.H.
NIP. 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat ALLAH SWT Yang Maha Esa, piji dan syukur saya ucapkan

Kupersembahkan skripsi ini dengan penuh cinta teruntuk:

Kedua Orang Tua ku tersayang, teruntuk Bapak Ibuku Terhebat yang sangat

kucintai

Keluarga besar dan saudaraku tersayang

Seluruh orang tercinta yang berjasa selama ini

Almameter kebanggaan Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi

LEMBAR MOTTO

“ Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa)
dari (kejahatan) yang diperbuatnya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin
tahu hanya bagian *succes stories* nya aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri
meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan
sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Jadi tetap semangat ya

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nadya Sitta Cahya Safitri
NIM : B1B221117
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Analisis Konsolidasi Pelembagaan Partai Politik pada
Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Studi Kasus Partai
Golkar di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
Alamat : Jalan sultan thaha, rt 03 rw 05 Kecamatan Rimbo Bujang,
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi
No.HP : 082231560857

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau plagiarisme dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaraan dalam pernyataan uu, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 03 Juli 2025
Yang Membuat Pernyataan

Nadya Sitta Cahya Safitri
B1B221117

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis konsolidasi Partai Golkar pada Pemilu 2024 di Kabupaten Tebo dalam kerangka pelebagaan partai politik. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan informan dipilih secara purposive dan snowball sampling. Kajian ini merujuk pada teori pelebagaan partai dari Basedau dan Stroh (2008) yang mencakup empat dimensi: keterikatan dengan masyarakat, kemandirian dalam pengambilan keputusan, struktur organisasi yang aktif, dan kekompakan internal. Tujuannya adalah untuk melihat menganalisis konsolidasi perlebagaan partai golkar pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Tebo. Hasilnya menunjukkan bahwa partai ini mampu beradaptasi dan bersaing secara signifikan dalam dinamika politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelebagaain partai yang baik keterikatan kuat dengan basis massa mengakar dalam masyarakat (*roots in society*), koordinasi organisasi yang berjalan efektif dari tingkat pusat hingga kecamatan tingkat kepengurusan (*level of organization*), serta kekompakan internal yang diperkuat melalui konsolidasi dan pelatihan kader (*coherence*). Meski demikian, pada aspek (*autonomy*) ditemukan bahwa meskipun secara formal Partai Golkar memiliki mekanisme internal yang menjamin kemandirian, proses pengambilan keputusan strategis terutama dalam penentuan calon legislatif masih didominasi oleh elite partai secara tertutup dan kurang transparan.

Kata kunci: Pelebagaan partai, Partai Golkar Tebo, Pemilu, konsolidasi.

ABSTRACT

This study analyzes the consolidation of the Golkar Party during the 2024 legislative election in Tebo Regency within the framework of political party institutionalization. Employing a qualitative approach, data were collected through interviews and documentation, with informants selected using purposive and snowball sampling techniques. The study refers to the party institutionalization theory by Basedau and Stroh (2008), which includes four main dimensions: roots in society, autonomy in decision-making, an active organizational structure at all levels, and internal coherence. The aim is to analyze how the institutional consolidation of the Golkar Party took place in the 2024 legislative election in Tebo Regency. The findings indicate that the party has demonstrated strong adaptability and competitiveness within the dynamics of local politics. The findings reveal strong institutionalization in terms of deep-rooted community ties (*roots in society*), effective organizational coordination from the central to sub-district levels (*level of organization*), and internal solidarity strengthened through regular consolidation and cadre training (*coherence*). However, in the *autonomy* dimension, despite the party's formal commitment to internal independence, strategic decisions especially regarding legislative candidates remain dominated by party elites through closed and non-transparent processes.

Keywords: Party institutionalization, Golkar Party Tebo, Election, Consolidation

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Kehendaknya dan rahmatnya yang memberikan segala kesempatan, kesehatan, kemampuan, kekuatan dan kelancaran serta petunjuk dalam setiap usaha penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Konsolidasi Pelembagaan Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Studi Kasus Partai Golongan Karya Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, oleh karena itu besar kemungkinan dalam penyusunan karya ilmiah ini terdapat kekurangan. Penulis mendapat banyak pelajaran, dukungan motivasi dan bantuan. Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai baik moril maupun materil. Maka, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepada Kedua Orang tua dan saudara-saudaraku.

Selanjutnya, dalam kesempatan ini dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, SH., M.H Rektor Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik lagi.
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah berupaya untuk dapat memajukan Fakultas Hukum.
3. Ibu Prof. Dr. Muksibah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kelancaran proses akademik selama perkuliahan.

4. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D., Selaku ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memimpin dan membantu mengurus segala urusan administrasi, fasilitas, dan proses pembelajaran.
5. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.I.P. Sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi sekaligus ketua pembahas dalam skripsi ini.
6. Bapak Dimas Subekti, S.IP., M.I.P. Selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menulis skripsi ini.
7. Ibu Revi Jeane Putri, M.Han. Selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi, yang telah sabar untuk memberikan bimbingan, arahan, serta bantuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Partai Golkar Tebo yang telah mengizinkan penulis melaksanakan penelitian dan kemudahan dalam mengambil data.
9. Kepada teman seperjuangan saya yang selalu membantu penulis sewaktu perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan.
11. Bapak dan Ibu Tenaga Administrasi Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam pelayanan administrasi.
12. Seluruh teman-teman dari Prodi Ilmu Politik angkatan 2020 yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu.

13. Bima Setia Nugroho, seseorang yang selalu ada untuk saya, terimakasih telah sabar menemani setiap proses yang saya lalui selama ini, memberikan dukungan tanpa henti, memberikan semangat, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya bisa mencapai cita-cita dan impian saya, *you have done too much good for me, thank you for trying for me.*

Penulis Menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, banyak kekurangan penulisan dan penjabaran yang tidak tepat, oleh karena itu segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dan bermanfaat akan penulis terima dengan senang hati.

Selebihnya, penulis berharap semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan. Amin

Jambi, 03 Juli 2025
Penulis

Nadya Sitta Cahya Safitri
Nim. B1B221117

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
LEMBAR MOTO	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Landasan Teori.....	15
1.6 Definisi Konseptual.....	23
1.7 Definisi Oprasional.....	24
1.8 Kerangka Pikir.....	26
1.9 Metode Penelitian.....	27
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	35
2.1 Sejarah Partai Golongan Karya.....	35
2.2 Visi Misi Partai Golongan Karya.....	43
2.3 Doktrin Partai Golongan Karya.....	45
2.4 Makna Lambang Partai Golongan Karya.....	47
2.5 Struktur Kepengurusan DPP Nasional Partai Golkar.....	48
2.6 Tujuan dan Fungsi Partai Golongan Karya.....	55
2.7 Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban.....	56
2.8 Tipologi Kader Partai.....	62
2.9 Dasar-Dasar Pemikiran.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN	72
3.1 Roots In Society (Mengakar Dalam Masyarakat)	73
3.2 Autonomy (Independen Dalam Mengambil Keputusan)	82
3.3 Level Of Organization (Alat Organisasi Yang Selalu Bekerja Untuk KepentinganPartai Disetiap Tingkat Kepengurusan.....	96
3.4 Coherence (Kekompakan Para Anggota Partai)	114
BAB IV PENUTUP	126

4.1	Kesimpulan.....	126
4.2	Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Daftar Tabel

1.1 Tabel Daftar Caleg yang Terpilih di DPRD Kabupaten Tebo.....	1
1.2 Tabel Pengelompokan Literatur Riview	12
1.3 Tabel Daftar Narasumber.....	31
2.1 Susunan Kepengurusan DPP Partai Golkar Priode 2024-2029.....	48
2.2 Susunan Kepengurusan DPD Partai Golkar Tebo 2020-2025.....	56
3.1 Daftar Perolehan Suara Partai Pemilu 2024 Tebo.....	79
3.2 Suara Terbanyak 4 Dapil Kabupaten Tebo.....	80
3.3 Deskripsi Pembekalan DPP kepada Caleg Parati Golkar Tebo.....	99
3.4 Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil I Tebo.....	104
3.5 Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil II Tebo.....	105
3.6 Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil III Tebo.....	105
3.7 Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil IV Tebo.....	106
3.8 Pelatihan Kader Caleg Partai Golkar Kab Tebo.....	115
3.9 Pelatihan Relawan Caleg Partai Golkar Kab Tebo.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia merupakan satu dari beberapa negara dengan sistem demokrasi di dunia yang menyelenggarakan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, pemilihan umum secara langsung dilaksanakan pada pemilihan presiden, kepala daerah maupun anggota legislatif. Menurut Soche, mengatakan demokrasi merupakan sebuah bentuk perintah dari rakyat, maksudnya adalah rakyat menduduki tahta tertinggi dalam pemerintahan, rakyat juga memiliki kekuasaan untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri paksaan dari wakil mereka.¹ Secara sederhana demokrasi bisa dimaknai sebagai suatu pemerintahan yang tercipta dari rakyat dan tercipta untuk rakyat.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Cahyono, D. d. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar. *Pendidikan, Ilmu sosial dan Politik*, 832-842.

Pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia pada tanggal 14 february 2024, dengan 5 surat suara yaitu : Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu ini diikuti oleh partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tahun 2024 diselenggarakan di 38 provinsi yang ada di Indonesia.

Salah satu daerah yang ikut menyelenggarakan pemilu 2024 adalah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dalam pemilihan legislatif terdapat 35 calon terpilih DPRD Kabupaten Tebo periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara 2024. Perolehan suara yang di dapatkan pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tebo adalah suara sah yang diperoleh dari jumlah 51.521 keseluruhan partai politik.

Dalam pemilu 2024 di Kabupaten Tebo, Partai Golkar memperoleh 27.283 suara, Partai PDIP 14.476 suara, Partai PKB 12.567 suara, Partai Gerindra 7.210 suara, Partai PAN 8.512 suara, Partai Nasdem 8.439 suara, Partai PKS 7.252 suara, Partai Demokrat 9.695 suara, dan Partai P3 1.590

suara. Berikut daftar caleg yang terpilih di DPRD Kabupaten Tebo periode 2024-2029:²

Table 1.1 Daftar Caleg yang Terpilih di DPRD Kabupaten Tebo

NO	DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV
1.	Eni Mawarti 3.518 suara (Golkar).	Feri Ariyanto 2.736 suara (Golkar).	Khalis Mustiko 8.487 suara (Golkar).	Sabki 2.907 suara (Golkar).
2.	Darul Kutni 3.433 suara (PKB).	Tibrani 2.328 suara (PKB).	Dimas Cahya Kusuma 3.676 suara (PDIP).	Ahmad Paisol 2.425 suara (Demokrat).
3.	H Pahri 2.715 suara (PDIP).	Sulman Elfarsy 1.590 suara (PPP).	Ahmad Ankam 4.246 suara (Golkar).	Suyadi 3.499 suara (PAN).
4.	Karno 4.338 suara (Gerindra).	Ihsanuddin 2.657 suara (PDIP)	Imam Syafi'i 3.469 suara (PKB)	Mursalin 1.954 suara (Nasdem).
5.	Yuzep Herman 2.181 suara (PAN).	Syamsuri 1.653 suara (PAN)	Khairul 1.378 suara (Gerindra).	Aivandri AB 2.988 suara (PDIP).
6.	Husni Fahri 3.018 suara (Nasdem).	Fahrudin Alroji 1.928 suara (Demokrat).	Sunoto 2.440 suara (PDIP).	Sahendra 3.337 suara (PKB).
7.	Edi Hartono 2.199 suara (PKS).	Saipul Anwar 3.467 suara (Nasdem).	H Ngatiran 4.141 suara (Golkar)	Pajri 3.012 suara (PKS).
8.	Radi Hartono 2.706 suara (Golkar).	Liga Marisa 2.683 suara (Golkar).	Siswanto 2.041 suara (PKS).	Ateng Jaelani 1.494 suara (Gerindra).
9.	Pahlepi		Dewi Ulfa Uluwiyah	

² Abraham, J. (2024). *Daftar 35 Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Tebo Periode 2024-2029, Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024*. <https://pontianak.tribunnews.com/2024/03/12/daftar-35-caleg-terpilih-dprd-kabupaten-tebo-periode-2024-2029-hasil-rekapitulasi-suara-pemilu-2024>.

	2.144 suara (Demokrat).		3.198 suara (Demokrat).	
10.			Efridarti 1.179 suara (PAN).	

Sumber : (KPU Kabupaten Tebo,2024)

Data table diatas menjelaskan tentang jumlah perolehan suara sah di Kabupaten Tebo pada pemilu 2024. Pada pemilu 2014, Partai Golkar memperoleh 11 kursi, begitu juga dengan pemilu 2019 yang juga menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 9 kursi. Pada pemilu legislatif tahun 2019, Partai Golkar di Kabupaten Tebo meraih kemenangan kursi sebanyak 9 kursi dengan jumlah suara : 26,93 % suara penetapan keputusan tersebut ditetapkan oleh KPU. Hasil pemilu legislatif 2019 ditetapkan dalam Keputusan Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional itu terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 PPLN dengan jumlah suara sah 139.971.260.

Sementara itu, dalam menghadapi pemilu 2024, Partai Golkar Kabupaten Tebo mengalami permasalahan dengan keluarnya kader-kader potensial. Seperti Agus Rubianto yang merupakan mantan ketua DPRD Tebo periode 2014-2019, dan Mazlan yang juga mantan ketua DPRD Kabupaten Tebo pada periode 2019-2024 yang hijrah ke Provinsi sebagai salah satu caleg Golkar DPRD Provinsi Jambi Dapil Bungo Tebo. Namun begitu, partai golkar tetap menjadi pemenang di pemilu Tebo 2024.

Dari Hasil Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Tebo, Golkar kembali meraih suara terbanyak dengan 27.283 suara dan mengamankan 8 kursi di DPRD Tebo. Maka menarik untuk melihat bagaimana konsolidasi pelembagaan yang dilakukan oleh Partai Golkar untuk meghadapi pileg 2024 dengan masalah yang dialaminya yaitu keluarnya kader partai yang potensial.

Selanjutnya, penulis menggunakan 7 *literatur review* sebagai referensi untuk penelitian ini. Pertama, Meifilina, Menghasilkan temuan bahwa Partai Golkar Kabupaten Blitar dalam melakukan pendidikan politik melalui media sosial adalah terlebih dahulu menetapkan komponen-komponen komunikasi sebagaimana yang dijelaskan Harold D. Laswell, yaitu komunikator politik, pesan, khalayak politik, media dan efek yang diharapkan. Untuk merebut suara masyarakat sebagai upaya untuk memenangkan pemilu legislatif DPRD Kabupaten Blitar lembaga Partai Golkar menetapkan atau menentukan media sosial yang akan digunakan, yaitu Instagram dan Facebook. Dua media sosial tersebut dinilai dapat memberikan dampak yang besar karena dengan penggunaan media sosial Instagram dan facebook jangkauan informasi yang disampaikan lebih luas. Penggunaan media sosial tersebut juga lebih menghemat biaya atau dana anggaran dari partai politik dan para caleg.³

³ Meifilina, A. (2021). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 101–110. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2.80>

Penelitian strategi kampanye Partai Golkar yang dilakukan oleh Diajeng Puspa Anggraeni, Moh Ilyas Rolis (2024) yaitu membahas tentang Strategi Kampanye Digital DPD Golkar Jawa Timur dalam Pemilu 2024, dengan fokus pada penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis strategi kampanye digital DPD Golkar Jawa Timur dalam Pemilu Legislatif 2024, khususnya penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi politik. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana partai merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi konten untuk menarik dukungan pemilih. Selain itu, penelitian juga menyoroti tantangan dalam memerangi misinformasi dan pentingnya interaksi dengan audiens.⁴

Hal ini sejalan dengan temuan Wibisono tentang strategi komunikasi politik partai Golkar dalam mempertahankan suara sebagai partai tengah pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi adalah dengan strategi kampanye terbuka dan strategi penggunaan media. Kendala yang dihadapi Partai Golkar dalam mempertahankan suara partai pada pemilu 2019 di Provinsi Jambi, yaitu berupa kendala finansial dan kinerja tim solusi yang diupayakan Partai Golkar dalam menghadapi kendala mempertahankan suara partai pada pemilu 2019 di Provinsi Jambi adalah dengan melakukan koalisi partai dan meningkatkan partisipasi konstituen.

⁴ Anggraeni, Diajeng Puspa (2024) Strategi kampanye via sosial media DPD Golkar Jawa Timur pada pemilu 2024. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel. 46-57

Kemudian terdapat beberapa hasil temuan yang menghasilkan tentang rekrutmen atau kaderisasi partai Golkar. Penelitian menghasilkan sebuah temuan bahwa Partai Golkar Karanganyar, dalam pembahasan ini secara aklamasi memilih Ketua DPD II Golkar Karanganyar untuk menjadi calon bupati. Kekalahan pada periode 2008, tidak menyurutkan Partai Golkar untuk mengusung kembali Juliyatmono pada pilkada 2019. Pola rekrutmen partai menjadi sangat penting untuk menjaring kader-kader yang berkualitas. Pengalaman organisasi, kemampuan dalam pengetahuan berbangsa dan bernegara, dan kemampuan menerapkan ideologi partai merupakan hal yang penting untuk dimiliki kader karena nantinya akan berhubungan dengan publik. Pengaruh Juliyatmono di internal dan eksternal partai terbilang cukup besar. Pengalaman di DPRD selama 16 tahun dan menjadi pemimpin beberapa organisasi massa di Karanganyar menjadi nilai penting untuk partai mengajukan dirinya sebagai orang nomor 1 di Kabupaten Karanganyar.⁵

Kemudian temuan yang sejalan dengan Dewi bahwa Rekrutmen politik dalam tubuh partai memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas calon anggota legislatif Partai Golkar. Dalam hal ini diketahui proses rekrutmen Partai Golkar memiliki sistem seleksi tersendiri yang

⁵ Razaqtar, A. Z. (2019). Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. *Jurnal Politik Muda*, 5(3). <https://journal.unair.ac.id/JPM@peran-partai-politik-dalam-pemilihan-kepala-daerah--studi-upaya-partai-golkar-dalam-memenangkan-pasangan-calon-juliyatmono---rohadi-di-pemilihan-article-10807-media-80-category-8.html>

bernama penugasan fungsionaris. Melalui mekanisme ini, akan menjadi proses awal bakal calon anggota legislatif akhirnya ditetapkan sebagai calon tetap. Para bakal calon diberikan penugasan untuk melaksanakan program di masyarakat. Kemudian kinerja mereka dinilai dan dievaluasi oleh Tim Sinkronisasi Penugasan Fungsionaris.⁶

Terakhir yaitu hasil berbeda dengan temuan Dimas Dwicahyo dkk, yang melihat dari sisi komunikasi politik bahwa Strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam mempertahankan suara sebagai Partai Tengah pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jambi. Fokus utama dalam penelitian ini untuk menganalisis strategi komunikasi politik Partai Golkar dalam mempertahankan suara pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi, kendala yang dihadapi oleh Partai Golkar dalam usaha tersebut, dan solusi yang diterapkan oleh Partai Golkar untuk mengatasi kendala dalam mempertahankan suara partai.⁷

Hasil temuan ini sejalan dengan Basri yang menyatakan bahwa strategi komunikasi politik yang diterapkan partai Golkar dalam pemilu legislatif ialah komunikasi yang terstruktur dari pimpinan pusat hingga kader di pedesaan sehingga pesan politik dapat tersampaikan secara merata, di dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2019, Golkar memberikan

⁶ Dewi, N. L. R. D., Suacana, I. W. G., & Rukmawati, D. (2023). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 17–29.

⁷ Wibisono, D. D., Puspa, R., & Widodo, S. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Mempertahankan Suara Partai Sebagai Partai Tengah. *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 832–842. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.284>

informasi kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih ataupun belum mempunyai hak pilih, mendidik masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan yang ditujukan untuk pemerintah dan lembaga-lembaga politik lainnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi pemilu legislatif Aceh Tengah tahun 2019, ada inisiatif dan berbagai cara dari pengurus DPD Golkar agar untuk menyampaikan segala bentuk program kerja kepada masyarakat, sebagai alat komunikasi politik partai seperti memberikan informasi kepada media masa, dan kendala yang dihadapi adalah masyarakat yang tidak menerima pesan dan tidak mau berkomunikasi dengan kader partai Golkar dikarenakan tidak tertarik pada kegiatan politik, masyarakat yang lebih tertarik pada manipulasi politik dan masyarakat yang sudah memiliki kandidat dari kerabat dekat.⁸

Selanjutnya hasil temuan dari pelebagaan partai. Pemilu merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokrasi modern. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilu bahkan dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokratis atau tidaknya suatu negara⁹. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilu tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain

⁸ Basri, H. (2021). Strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 22–32.

⁹ Anawati, D. M., & Al-Hamdi, R. (2020). Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 105–125.

yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.¹⁰

Penelitian pelebagaan partai politik yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi yaitu menganalisis proses pelebagaan Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekalahan pada Pemilu 2009 dan menemukan bahwa Partai Golkar Kabupaten Sinjai pasca kekealahannya pada Pemilu 2009 belum berhasil membangun pelebagaan partai yang kuat. Hasil penelitian pertama, Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam hal-hal tertentu terkait dalam pengambilan keputusan masih dipengaruhi oleh kuatnya unsur ketokohan dan elitisme, baik yang berasal dari internal Partai Golkar Kabupaten Sinjai sendiri maupun dari level-level di atasnya (DPD I dan DPP). Kedua, pengurus partai di daerah jarang sekali melakukan inovasi dan kreatifitas program yang dapat mendukung arah dan perjuangan sesuai dengan visi dan misi partai. Program-program yang dilaksanakan senantiasa dilakukan sekedar melaksanakan amanah partai, tanpa ada tindak lanjut nyata sebagai wujud keberlanjutan program. Ketiga, lemahnya pemahaman kader partai akan ideologi dan platform partai sebagai basis identitas partai. Keempat, Partai Golkar Kabupaten Sinjai secara kelembagaan sampai saat ini tidak memiliki basis yang kuat di masyarakat.¹¹

¹⁰ Budiardjo, C. (1992). The Legacy of the Suharto Dictatorship. *The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia*, 51–67.

¹¹ Lutfi, M. (2013). Kiprah partai golkar kabupaten sinjai pasca kekalahan pada pemilu 2009. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 2(2), 43–52. <https://doi.org/10.47030/administrasita.v2i2.214>

Sejalan dengan temuan Primadi, pertama, dalam hal pengambilan kebijakan rekrutmen calon Gubernur dan Wakil Gubernur di pemilihan tahun 2017 masih diwarnai dengan pelanggaran konstitusi partai dalam artian pengurus partai dalam rekrutmen tidak berdasarkan mekanisme aturan AD/ART partai. Pengurus Golkar di level daerah tidak dilibatkan dalam proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon Gubernur ditubuh partai Golkar. Kedua, adanya “politik dagang sapi” dalam proses rekrutmen mengisyaratkan kecendrungan uang masih sangat kuat dalam mendapatkan rekomendasi dari level pusat dan dukungan dari level pengurus partai di daerah. Selain itu, sikap otoriter Hidayat Arsani yang menyebabkan antipati kader partai yang menyebabkan pengurangan suara dan dukungan dari internal partai itu sendiri.¹²

Berdasarkan beberapa *literatur review* diatas , bahwasannya peneliti mengelompokkan penelitian terdahulu menjadi 4 dimana masing-masing membahas terkait tentang kampanye kemenangan partai, rekrutmen atau kaderisasi partai, komunikasi partai, dan pelebagaan partai. Lebih lanjut dilihat tabel dibawah ini :

¹² Primadi, A., Efendi, D., Amriyanto, H., & Sanahdi, R. R. (2017). Making Informal Politics Work. Case of Local-Direct Election in Bangka Selatan, Indonesia. *2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*, 468–477.

1.2 Table Pengelompokan Literatur Riview

No.	Jenis Pengelompokan	Hasil Temuan
1.	Strategi kampanye partai Golkar dalam pemilu	Diajeng Puspa Anggraeni, Moh Ilyas Rolis (2024) Berdasarkan beberapa literatur review ini dapat disimpulkan bahwa strategi kampanye partai golkar dapat dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan media masa, pendidikan dll. Surat kabar sebagai salah satu bagian dari media masa yang mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pandangan dari surat kabar tersebut.
2.	Rekrutemen atau kaderisasi partai golkar	Arief Zaafril Razaqtiar (2020), Nih Luh Dewi (2023), Primadi (2020). Berdasarkan dari beberapa literatur riview ini dapat di simpulkan bahwa proses rekrutmen atau kaderisasi di partai golkar menjadi pola rekrutmen partai yang sangat penting untuk menjaring kader-kader berkualitas dan kompeten.

3.	Komunikasi politik partai golkar dalam pemilu	Meifilina (2021), Wibisono (2023), Basri (2021). Berdasarkan dari beberapa literatur riviw ini dapat di simpulkan bahwa komunikasi politik partai golkar adalah komunikasi yang terstruktur.
4	Pelebagaan partai politik	Anawati & Al-Hamdi (2020), Muhammad Lutfi (2018), Sidik Firmadi (2017). Berdasarkan dari beberapa literatur riviw ini dapat di simpulkan bahwa pelembagaan partai merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politikdemokrasi modern.

Sumber : diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan pengelompokan data pada tabel diatas, pembahasan pada penelitian terdahulu partai Golkar berfokus pada strategi kampanye partai, rekrutemen, kaderisasi partai, komunikasi politik, dan pelembagaan partai. Yang membedakan penelitian ini fokus memperkuat kajian mengenai upaya pelembagaan partai golkar di Kabupaten Tebo. Maka penelitian ini mengajukan judul **“Analisis Konsolidasi Pelebagaan Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 : Studi Kasus Partai Golongan Karya (golkar) Di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi ”**

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan penjelasan latar belakang masalah menunjukkan bahwa Partai Golkar masih dapat mempertahankan stabilitas perolehan suara di pemilu 2024, terlepas dari masalah keluarnya kader potensial yang berkontribusi pada perolehan suara Partai Golkar dalam dua periode pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan Bagaimana konsolidasi pelembagaan partai Golkar pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Tebo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsolidasi pelembagaan partai golkar pada pemilihan legislatif tahun 2024 di kabupaten Tebo.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis mengharapkan nantinya penelitian ini berguna sebagai sumber referensi dan memberikan wawasan tambahan mengenai pelembagaan partai politik. Dan juga hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik dan partai politik.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang bersinggungan dengan partai politik dan bagi mahasiswa atau pembaca diharapkan dapat menjelaskan bagaimana gambaran pelebagaan partai politik serta menjadikan partai Golkar di Kabupaten Tebo sebagai penerapan teori pelebagan partai.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partai Politik

1.5.1.1 Pengertian Partai Politik

Keberadaan Partai Politik dalam kehidupan ketatanegaraan pertama kali dijumpai di Eropa Barat, yakni sejak adanya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang patut diperhitungkan serta diikuti sertakan dalam proses politik, Dengan adanya gagasan untuk melibatkan rakyat dalam proses politik (kehidupan dan aktifitas ketatanegaraan), maka secara spontan partai politik berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain.¹³ Partai politik merupakan salah satu instrumen yang penting dalam membangun demokrasi. Schattschneider mengatakan bahwa partai politik menciptakan demokrasi dan demokrasi modern tidak bisa dilepaskan dari partai. Partai politik berperan sebagai saluran bagi pejabat publik untuk dapat duduk dalam jabatan publik tertentu

¹³ Budiardjo, C. (1992). The Legacy of the Suharto Dictatorship. *The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia*, 51–67.

melalui mekanisme sosial berupa pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁴

Perkembangan partai politik merupakan bagian dari perkembangan “*political society*” untuk mengontrol kekuasaan negara dan aparatus politiknya. Selain itu, dalam kaitannya dengan roda pemerintahan, partai politik berperan sebagai penghubung antara kepentingan warga dan pemerintah, mendorong pemerintah menjadi responsif terhadap warga negara, serta memberikan pengaruh pada proses-proses politik di legislatif. Lebih jauh, partai politik berperan penting dalam mengartikulasikan kepentingan suatu kelompok, kohesivitas partai politik dalam lembaga legislatif juga mampu menciptakan pemerintahan yang efektif.¹⁵

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa sebagai organisasi yang secara khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, keberadaan partai politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian partai politik tersebut. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan tujuan yang sama¹⁶.

Menurut Carl J. Friedrich Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan

¹⁴ Ibid, 35-45

¹⁵ Astawa, I. P. A. (2018). *Demokrasi Indonesia*. Bandung: Universitas Udayana. 65-67

¹⁶ Budiardjo, C. (1992). The Legacy of the Suharto Dictatorship. *The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia*, 51–65.

penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Sedangkan Sigmund Neumann menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁷

1.5.1.2.1.1 Fungsi Partai Politik

Menurut Friedrich partai politik adalah *"a group of human beings, stably organized with the objective of securing of maintaining for it's leades the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits advantages"*.¹⁸

Sementara menurut Budiarto, Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

¹⁷ Ibid, 66-67

¹⁸ Syafii, I. K., & Azhari. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. 43-45

Berikut ini penjelasan secara lebih lengkap fungsi partai politik dinegara-negara demokrasi.

1) Sebagai sarana komunikasi politik

Dimasyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara dipadang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Kemudian pendapat dan aspirasi dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Hal ini memerlukan agregasi dan artikulasi agar pendapat tersebut tidak sia-sia. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi politik. Partai politik merumuskan menjadi usulan kebijakan melalui parlemen dan disampaikan kepada pemerintah agar menjadi kebijakan umum.

2) Sebagai sarana sosialisasi politik

Sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Disinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan sebagainya.

3) Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional lebih luas. Selain itu, partai politik juga berkepentingan memperluas keanggotaan nya.

4) Sebagai sarana pengatur konflik

Partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahanya. Selain itu partai politik juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam berkembang diberbagai kelompok masyarakat.¹⁹

1.5.1.3. Pelembagaan Partai Politik

Konsep pelembgaan partai pertama kali dikemukakan oleh Samuel P. Huntingtin mengatakan bahwa pelembagaan partai adalah proses yang membuat organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan stabilitas. Ada empat kriteria untuk mengukur pelembagaan partai, yaitu adaptasi, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Samuel P. Huntington baik untuk kita perhatikan terlebih dahulu. Huntington mendasari pemahaman pelembagaan partai politik dengan terlebih dahulu memahami persoalan stabilitas politik dengan menekankan adanya suatu “tertib politik” (political order), yang mengacu pada kondisi stabilitas politik, sebagai tujuan dalam

¹⁹ Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.23-27

pembangunan politik. Tertib politik ini dapat dicapai tergantung pada pembangunan lembaga politik dan mobilisasi kekuatan sosial-baru di bidang politik. Maka, sebagai pembuka bagi keseluruhan gagasan “tertib politik” ini, Huntington memulainya dengan kajian pelembagaan politik (*political institutionalization*).²⁰

Kemudian, Levitsky seperti dikutip oleh Randall dan Svasand, menekankan pelembagaan sebagai infus nilai, yaitu ideologi atau nilai-nilai bersama yang merupakan faktor penting dalam pelembagaan partai. Infusi nilai dipakai sebagai penjelasan adanya hal lainnya yang muncul diluar persoalan teknik organisasi. Dengan demikian, suatu partai melembaga apabila partai itu telah memiliki pendukung loyal dari sosial tertentu. Pola kebijakan yang dipejuangkan dan dukungan yang diberikan kepada partai merupakan orientasi politik sesuai ideologi partai tersebut.²¹

Randall dan Svasand memahami pelembagaan sebagai proses pemantapan partai politik dalam aspek struktural dan kultural yang mana aspek tersebut terwujud dalam pola perilaku serta dalam sikap dan budaya. Berdasarkan hal ini Randall dan Svasand mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi dalam melihat pelembagaan partai politik, yaitu *Systemness* (kesisteman organisasi), kedua *Value Infusion* (identitas nilai), ketiga *Decisional Autonomy* (otonomi kebijakan) dan terakhir *Reification* (reifikasi). Indikator dalam melihat pelembagaan partai politik ini diperoleh

²⁰ Huntington, S. P. (2006). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press. 66-75

²¹ Levitsky, S. (1998). Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case, and the Case for Unpacking the Concept. *Party Politics*, 4(1), 77-92.

dari hasil persilangan dua aspek dalam proses pelebagaan, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural, sebagai berikut:

1. Kesisteman (*Systemness*) Aspek kesisteman dalam melihat pelebagaan partai politik berhubungan dengan proses pelaksanaan fungsi yang seharusnya dijalankan partai yang dijalankan sesuai urutan, persyaratan, prosedur dan mekanisme yang telah disepakati dan ditetapkan partai politik sebelumnya, di mana dalam hal ini adalah AD dan ART.

2. Identitas Nilai (*Value infusion*) Penyerapan nilai atau identitas nilai partai politik didasarkan atas ideologi dan platform partai, basis sosial pendukungnya dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan partai.

3. Otonomi Kebijakan (*Decisional Autonomy*) Otonomi Kebijakan mengacu kepada hubungan partai politik dengan ekosistem yang berada di luar partai, baik itu sumber otoritas seperti penguasa dan pemerintah atau sumber dana seperti pengusaha dan lain-lain, ataupun hubungan partai dengan sumber dukungan massa seperti organisasi kemasyarakatan.

4. Reifikasi (*Reification*) Reifikasi berkaitan dengan pengetahuan publik tentang Partai Politik. Hal ini merujuk pada bagaimana sebuah partai mampu menanamkan ideologi, nilai-nilai, serta platform partai di masyarakat. Reifikasi berkaitan dengan bagaimana partai memberikan citra kepada publik sehingga

menciptakan kesetiaan konstituen dalam memberikan dukungan kepada partai dalam jangka waktu yang Panjang.²²

Sedangkan menurut Basedau & Stroh ada empat dimensi pelebagaan partai, jika di uraikan adalah sebagai berikut : Pertama , *Roots in society* (mengakar dalam masyarakat), maksudnya adalah partai ini memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Kedua, *autonomy* (independen dalam mengambil keputusan), maksudnya adalah kebebasan partai politik dari pengaruh luar partai dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan partai. Ketiga, *level of organization* (alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan), maksudnya adalah kepengurusan ditingkat atas hingga kepengurusan di tingkat bawahnya bekerja untuk kepentingan partai guna membesarkan partai dan memberikan kemenangan dalam pemilu. Keempat, *coherence* (kekompakan para anggota partai), maksudnya adalah kekompakan anggota partai dalam parlemen, sehingga tidak terjadi pembelotan dari anggota partai dan tetap berpegang teguh pada kebijakan partai yang telah diambil. Dari pemaparan di atas terlihat bahwa masing-masing ahli melihat pelebagaan partai pada penekanan yang berbeda-beda. Namun demikian, mereka sepakat bahwa pelebagaan partai merupakan suatu yang penting terutama bagi negara-

²² Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8, 5–29. <https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>

negara demokrasi baru. Partai merupakan faktor penting bagi perkembangan dan kondisi konsolidasi demokrasi.²³

1.6. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah menjelaskan secara abstrak suatu konsep dengan cara singkat dan jelas. Maka daripada itu definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Definisi Konseptual adalah usaha untuk menjelaskan dengan memberikan pembatasan pengertian mengenai konsep yang satu dengan yang lainnya agar, tidak terjadi kesalahpahaman. Digunakan konsep ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.²⁴

Dalam definisi Konseptual penulis menggunakan:

1. Pelembagaan Partai Politik adalah proses penguatan partai politik, baik dalam hal tindakan maupun budaya dan sikap dengan tujuan mencapai kestabilan organisasi.
2. Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama untuk mencapai suatu tujuan yaitu kekuasaan.

²³ Basedau, M., & Stroh, A. (2008). *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. GIGA Working Paper. 34-40

²⁴ Abdussamad, Z. (2006). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF. Penerbit, CV. Syakir Media Press. 32-45

1.7. Defenisi Operasional

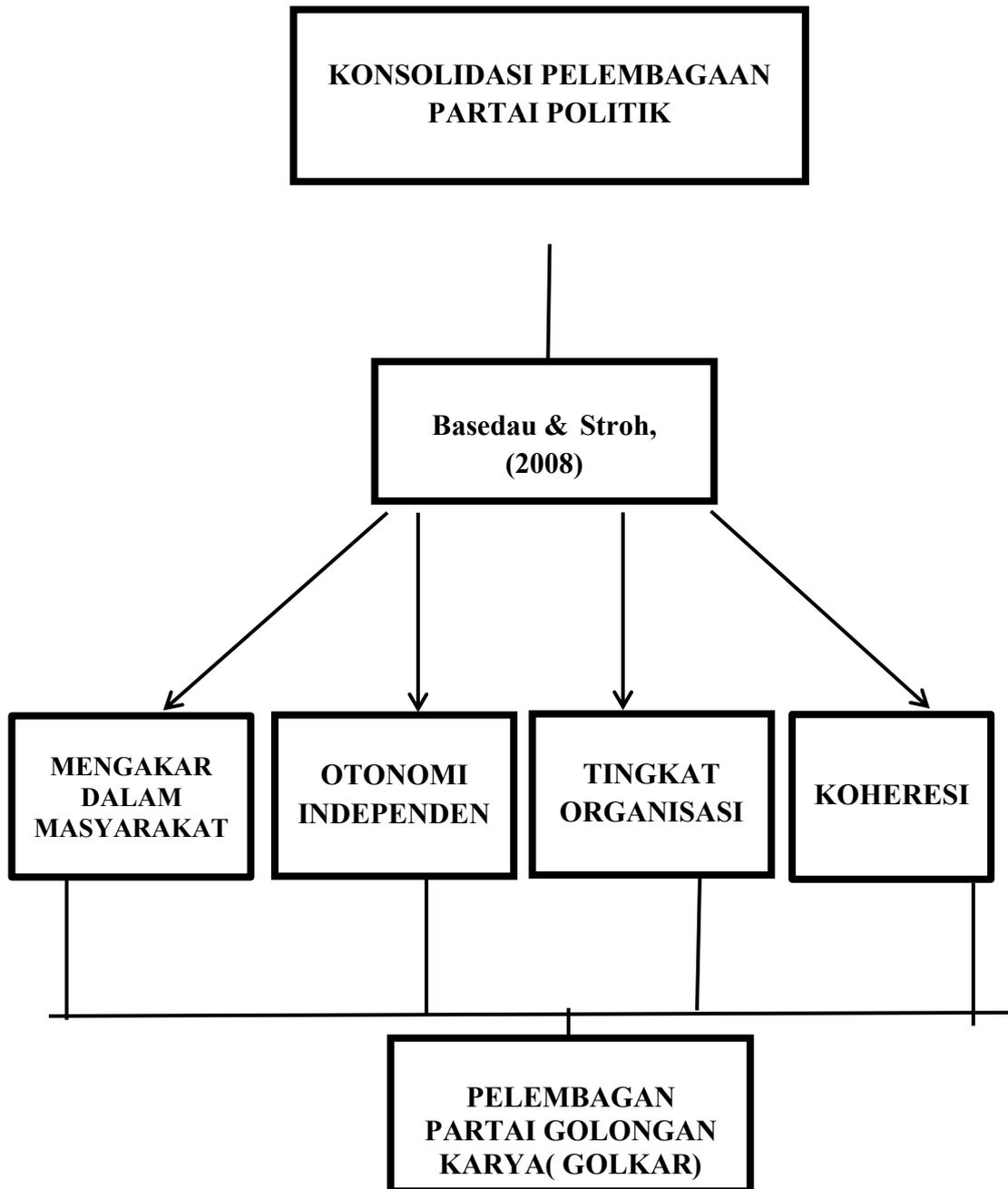
Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalisasikan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai nilai. Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, definisi ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah judul-judul skripsi. Penafsiran yang berkaitan dengan istilah judul-judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Analisis Konsolidasi Pelembagaan Partai Politik pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Studi Kasus Partai Golongan Karya di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”, maka penelitian ini menggunakan teori dimensi pelembagaan partai menurut Basedau & Stroh, karena teori ini relevan untuk menjawab pada penelitian ini. Dengan indikator yaitu :

1. *Roots in society*(mengakar dalam masyarakat), maksudnya adalah apakah partai Golkar di Kabupaten Tebo ini memiliki hakikat di dalam Masyarakat. Artinya partai golkar ini mampu membentuk koalisi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas, kelompok adat, atau organisasi keagamaan.
2. *Autonomy* (Otonomi independen dalam mengambil keputusan), maksudnya adalah apakah Partai Golkar menceminkan kemandirian partai dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, tanpa pengaruh dari sumber eksternal. Apakah Partai Golkar selalu berupaya mempertahankan citra positif dan hubungan dengan masyarakat di Kabupaten Tebo.

3. *Level of organization* (Tingkat Organisasi) (alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan), maksudnya adalah apakah kepengurusan ditingkat atas hingga kepengurusan di tingkat bawah partai golkar bekerja untuk kepentingan partai guna membesarkan partai dan memberikan kemenangan dalam pemilu.
4. *Coherence* (kekompakan para anggota partai), maksudnya adalah apakah kekompakan anggota partai dalam mengikuti pemilihan umum tahun 2024.²⁵

²⁵ Basedau, M. &. (2008). *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. African: GIGA Working Paper No. 69.

1.8 Kerangka Berfikir



Sumber : diolah oleh peneliti (2024)

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis dan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁶ Maka daripada itu, penelitian ini memilih jenis kualitatif karena dianggap pantas digunakan untuk menjelaskan tujuan dari penelitian. Lebih daripada itu, jenis kualitatif memberikan fasilitas untuk menggambarkan secara mendalam dan sistematis dari masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell fokus dari studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan. Studi kasus adalah sebuah eksplorasi dari “suatu sistem yang terikat” atau “suatu kasus/beragam kasus” yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang “kaya” dalam suatu konteks.²⁷ Studi kasus dalam penelitian ini adalah konsolidasi pelebagaan partai golongan karya pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Tebo.

²⁶ Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara. 37-40

²⁷ Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage Publications.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tebo dengan objek penelitian partai Golkar. Pelembagaan dalam partai merupakan hal sangat penting karena pelembagaan inilah yang membuat partai ini mampu atau tidak dalam menjalankan tugas, fungsi dan peranannya. Dalam institusional partai, kompleksitas masalah yang muncul merupakan hal yang wajib diselesaikan. Pelembagaan pengetahuan atau citra publik seperti apa yang di bangun oleh partai Golkar dimata masyarakat Kabupaten Tebo.

1.9.3. Fokus Penelitian

Tujuan fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk membatasi penelitian sekaligus studi kualitatif untuk memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Maka dari itu, penelitian ini lebih berfokus pada konsolidasi pelembagaan partai golkar di Kabupaten Tebo.

1.9.4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data bisa diperoleh. Sumber data dibutuhkan untuk mendorong terlaksananya penelitian dan menjadi jaminan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Sumber data yang dipakai pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data yang didapat secara langsung saat di lapangan. Sumber data primer sangat diperlukan untuk mendukung temuan penelitian, karena data primer akan memberikan informasi yang akurat atau sesungguhnya dengan apa yang terjadi

sebenarnya. Wawancara merupakan sumber data awal yang digunakan dalam penelitian ini.²⁸ Yaitu data yang diperoleh dari keterangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini yang spesifik dengan Konsolidasi Pelembagaan Partai Golongan Karya Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain. Sumber data sekunder bisa didapatkan melalui studi pustaka, dokumen, publikasi yang telah berbentuk jadi, serta buku maupun jurnal yang sesuai dengan topik yang akan diteliti. Data juga dapat diperoleh dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU). Peneliti menggunakan sumber data seperti dokumen rencana strategis Partai Golongan Karya, Undang-Undang yang mengatur terkait seputar partai politik, rekrutmen kader-kader partai, serta bisa juga melalui media online, dokumentasi, berita acara, hasil rapat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi politik masyarakat.²⁹

1.9.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu memakai teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* yang merupakan metode

²⁸ Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 18-24

²⁹ Ibid, 28-30

dalam menentukan sampel berdasarkan pertimbangan khusus, teknik ini juga merupakan bagian dari aspek teknik *non probability sampling*, dimana metode pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap komponen populasi atau individu.³⁰ Peneliti memilih orang/informan sebagai sampel dengan memilih informan atau narasumber yang terlibat langsung, atau informan yang dirasa memiliki kemampuan dan mengerti dengan permasalahan dan topik yang akan diteliti, yaitu tentang pelebagaan partai golkar pada pemilu legislatif tahun 2024. Selanjutnya, teknik *Snowball Sampling*, menurut Sutopo, adalah cara pemilihan informasi pada waktu dilokasi penelitian, yang kemudian berdasarkan petunjuk informan tersebut peneliti menemukan informasi baru dan seterusnya berganti informan lainnya yang tidak terencana sebelumnya, sehingga mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.³¹

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan

³⁰ Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage Publications. 87-90

³¹ Sutopo, H. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Semarang: Universitas Sebelas Maret.

data didapatkan melalui teknik-teknik seperti observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Berikut adalah penjelasan terkait masing-masing metode tersebut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi dengan berinteraksi langsung dengan individu yang menjadi responden. Metode wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini masuk dalam kategori wawancara mendalam, di mana pendekatannya lebih fleksibel dari wawancara terstruktur. Adapun informasi dalam penelitian ini, data diperoleh melalui interaksi wawancara dengan narasumber, diantaranya ialah :

Tabel 1.3 Daftar Narasumber Wawancara

NO	JABATAN
1.	Ketua Dpc Partai Golkar (Khalis Mustiko. S.H)
2.	Sekretaris Dpc Partai Golkar (Mazlan, S.Kom, M.E)
3.	Ketua Badan Pemenang Pemilu Partai Golkar (Ahmad Kharis)
4.	Kader Yang Diusung Di Pemilu Legislatif Ditahun 2024 (H Ngatiran)
5.	Tokoh masyarakat (Sukarmin)
6.	Simpatisan dari masyarakat atau tim sukses (Suparmi)

Sumber : diolah oleh peneliti (2024)

b. Dokumentasi

Proses meninjau ulang sumber data dari dokumen yang tersedia disebut dokumentasi. Ini dapat dipakai untuk membuat data yang telah ditentukan lebih luas. Dokumen dapat berupa dokumen pribadi seseorang (buku harian, surat menyurat, e-mail, dan foto selama penelitian berlangsung), dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui pemeriksaan dokumen resmi seperti memo, catatan rapat, surat-menyurat, tupoksi dan renstra, dokumen kebijakan, proposal, arsip, data statistik, buku, berita online dari media lokal maupun nasional, artikel jurnal dan lainnya. Peneliti mendapatkan data dengan meninjau kembali literatur atau dokumentasi foto yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

1.9.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi akan di proses dalam beberapa tahapan sebelum digunakan. Menurut Al-Hamdi terdapat empat tahapan dalam analisa data yakni pengumpulan dan pengolahan data, seleksi data, analisis antar-variabel dan verifikasi data, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan dan pengolahan data

Data-data yang telah diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan dikelola sesuai dengan kebutuhan penelitian peneliti memilih data-data tersebut sesuai dengan indikator- indikator yang sudah ditentukan sebelumnya.

b. Seleksi data

Pada tahapan ini, data-data yang telah disusun sesuai kategori kemudian akan dipilih dan dipilah kembali untuk mendapatkan data yang memang berguna serta sesuai dalam proses analisis.

c. Analisis antar-variabel dan verifikasi data

Langkah selanjutnya setelah seleksi data adalah menghubungkan antara satu variabel atau indikator dengan variabel atau indikator lainnya.

d. Penafsiran dan penarikan kesimpulan

Semua temuan yang telah disajikan, selanjutnya akan ditafsirkan sebagai usaha untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Hasil tafsiran tersebut kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk menarik kesimpulan dari rangkaian penelitian secara keseluruhan.³²

³² Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Pelajar.28-32

1.9.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah metode yang memanfaatkan berbagai sumber untuk memverifikasi data yang telah dikumpulkan. Hal ini bisa mencakup konfirmasi hasil dengan sumber lain, analisis kasus, maupun observasi sistematis dalam berbagai situasi. Metode ini membuat data yang diperoleh lebih konsisten, terperinci, dan kuat, yang meningkatkan keandalan hasil penelitian. Validitas data dalam penelitian ini diukur melalui triangulasi sumber data. Triangulasi ini digunakan untuk memverifikasi validitas data atau informasi dengan menggunakan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi.³³

³³ Risnaedi, A. S. (2021). *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Penerbit Adab.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Sejarah Partai Golongan Karya

Golongan Karya (Golkar) lahir dari perpaduan gagasan tiga tokoh utama, yakni Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara, yang sejak tahun 1940 telah mengusulkan konsep integralistik-kolektivistik. Gagasan ini kemudian terwujud dalam bentuk Golongan Fungsional. Nama tersebut mengalami perubahan menjadi Golongan Karya pada tahun 1959 dengan mengadopsi istilah dari bahasa Sansekerta. Seiring berjalannya waktu, Golongan Karya semakin dikenal sebagai Golkar dalam dunia politik Indonesia.

Pada dekade 1950-an, pembentukan Golongan Karya awalnya dimaksudkan sebagai representasi berbagai kelompok masyarakat. Tujuannya adalah menghadirkan keterwakilan kolektif dalam sistem demokrasi yang khas Indonesia, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bung Karno, Prof. Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Pada awalnya, Golkar bukanlah sebuah partai politik, melainkan sistem perwakilan yang terdiri dari berbagai kelompok fungsional dalam masyarakat. Organisasi ini mulai berkembang pada tahun 1957, ketika sistem multipartai mulai mengakar di Indonesia. Sebagai alternatif dari partai politik, Golkar hadir dengan konsep perwakilan golongan.³⁴

³⁴ Web Partai Golkar <https://www.partaigolkar.com/profil/>

Selain itu, Golkar juga berupaya membangun organisasi kemasyarakatan (ormas). Transformasi Golkar menjadi partai politik terjadi ketika Bung Karno, selaku pencetus konsep, bersama Jenderal TNI (Purn) Abdul Haris Nasution dan Angkatan Darat, mengubahnya menjadi kekuatan politik untuk menghadapi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, perubahan ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak sistem kepartaian serta ideologi PKI yang berbasis perjuangan kelas. Golkar sendiri berpegang pada prinsip persatuan dan kerja sama. Ironisnya, meskipun semula menentang sistem partai politik, Golkar justru berkembang menjadi partai yang bertahan hingga saat ini.

Partai Golongan Karya, yang sebelumnya dikenal sebagai Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), lahir pada tahun 1964 di penghujung pemerintahan Presiden Soekarno. Pada saat itu, Angkatan Darat menggunakan Sekber Golkar sebagai alat untuk mengimbangi dominasi PKI dalam perpolitikan nasional.³⁵

Golkar telah memiliki akar sejak era Orde Lama, namun eksistensinya semakin kuat pada masa Orde Baru sebagai bagian dari pembaruan politik di Indonesia. Dalam Pemilu 3 Juli 1971, Sekber Golkar meraih kemenangan besar dengan memperoleh 62,8% suara dan mengamankan 236 dari 360 kursi di DPR, ditambah 100 kursi yang diisi oleh anggota yang diangkat oleh pemerintah. Sementara itu, partai lain seperti NU hanya memperoleh

³⁵ Gonggong, Anhar., Musa, Asy'ari (eds).2005. Sketsa Perjalanan Bangsa Berdemokrasi. Jakarta: Departemen Kominfo. 24

18,7% suara, PNI 6,9%, dan Parmusi, yang merupakan penerus Masyumi, mendapatkan 5,4%. Partai Golkar secara resmi berdiri pada 20 Oktober 1964, didirikan oleh Soeharto dan Suhardiman.

Pada awalnya, Sekber Golkar terdiri dari 61 organisasi, namun jumlah tersebut terus bertambah hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang tergabung kemudian dikelompokkan berdasarkan bidang dan jenis kegiatannya ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu (Anhar Gonggong, 2005): 1) Koperasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro); 2) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi); 3) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR); 4) Karya Profesi; 5) Organisasi Pertahanan dan Keamanan (Hankam); 6) Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari); 7) Karya Pembangunan. Ketujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO), yang menjadi kekuatan utama dalam Sekber Golkar, mengambil keputusan bersama pada 4 Februari 1970 untuk berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan satu nama dan simbol, yaitu Golongan Karya (Golkar). Sejak keikutsertaan dalam Pemilu 1971, nama dan logo Golkar terus dipertahankan hingga saat ini.³⁶

Dalam Pemilu 1971, Sekber Golkar turut serta sebagai salah satu peserta. Awalnya, partai-partai politik meremehkan keikutsertaan Golkar, karena mereka meragukan kemampuan organisasi ini dalam menjangkau komunikasi politik hingga ke tingkat akar rumput. Saat itu, partai-partai besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan

³⁶ Web Partai Golkar <https://www.partaigolkar.com/profil/>

Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), yang memiliki kejayaan di masa lalu, sangat optimis akan keluar sebagai pemenang.³⁷

Partai-partai politik saat itu tidak menyadari bahwa konflik internal dan perpecahan di dalam tubuh mereka justru menyebabkan banyak tokoh beralih ke Golkar. Hasil Pemilu pun di luar perkiraan. Golkar meraih kemenangan besar dengan memperoleh 34.348.673 suara, atau setara dengan 62,79% dari total suara. Tidak seperti partai politik lain yang bergantung pada basis tradisional di wilayah tertentu, perolehan suara Golkar tersebar merata di seluruh provinsi. Sementara itu, NU hanya unggul di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katolik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, serta Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba gagal meraih suara signifikan sehingga tidak mendapatkan kursi di DPR. Sejalan dengan ketetapan MPRS yang mengamanatkan penataan kembali sistem politik di Indonesia, pada 17 Juli 1971, Sekber Golkar resmi bertransformasi menjadi Golkar. Namun, Golkar menegaskan bahwa dirinya bukan partai politik, karena istilah tersebut lebih mengedepankan aspek politik dibandingkan pembangunan dan karya.³⁸

Pada September 1973, Golkar menggelar Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya, di mana Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun semakin kuat dengan pembentukan

³⁷ Lestari, E. H. (2017). Pendidikan Politik. Yogyakarta: Pohon cahaya. 32-35

³⁸ Cahyono, D. d. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar. *pendidikan, ilmu sosial dan politik*, 832-840.

berbagai wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).

Pasca peristiwa G30S, Sekber Golkar, dengan dukungan penuh dari Soeharto sebagai pemimpin militer, mulai menjalankan berbagai aksi untuk melemahkan kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta mengurangi pengaruh Bung Karno. Pada dasarnya, Golkar dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) menjadi pilar utama dalam membangun rezim militer Orde Baru. Seluruh kebijakan politik Orde Baru dirancang dan dijalankan oleh pimpinan militer bersama Golkar. Selama puluhan tahun kekuasaan Orde Baru, hampir semua posisi penting dalam struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikuasai oleh kader Golkar. Sejak awal, jaringan konstituen keluarga besar Golongan Karya telah dibangun melalui pengaturan informal yang terbagi dalam tiga jalur: jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk birokrasi, dan jalur G untuk kalangan sipil di luar birokrasi. Para pemimpin dari ketiga jalur ini mengendalikan Golkar melalui Dewan Pembina yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan dan keputusan politik. Dalam setiap pemilu, partai berlambang pohon beringin ini selalu tampil sebagai pemenang, mencatat kemenangan berturut-turut pada Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun, dominasi Golkar mulai menghadapi tantangan besar ketika gelombang reformasi mulai bergulir.³⁹

³⁹ Ibid, 841-843

Tuntutan agar Presiden Soeharto mundur semakin meluas di berbagai daerah. Pada akhirnya, Soeharto dilengserkan oleh gerakan mahasiswa, dan dampaknya turut dirasakan oleh Golkar. Sebagai partai yang memiliki hubungan erat dengan Soeharto yang saat itu menjabat sebagai penasihat partai Golkar juga menghadapi tekanan besar untuk dibubarkan. Partai ini menjadi sasaran kritik dari berbagai pihak (Cahyono, 2023).

Di tengah situasi sulit tersebut, Akbar Tandjung yang terpilih sebagai Ketua Umum berjuang keras untuk mempertahankan keberadaan Golkar. Di bawah kepemimpinannya, Golkar bertransformasi menjadi Partai Golkar dan mulai membangun citra baru sebagai "Golkar Baru." Berkat usahanya, Akbar berhasil menyelamatkan partai dari ancaman pembubaran serta mengatasi krisis citra, menjadikannya salah satu Ketua Umum Golkar yang paling dikenal dalam sejarah partai (Cahyono, 2023).

Partai Golkar kemudian mengikuti Pemilu 1999, bersaing dengan berbagai partai baru dalam sistem multipartai yang berkembang di era Reformasi. Pada pemilu pertama setelah reformasi, Golkar mengalami penurunan suara dan menempati posisi kedua di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, pada pemilu berikutnya, Golkar kembali bangkit. Dalam Pemilu Legislatif 2004, Golkar berhasil meraih kemenangan dengan memperoleh 24.480.757 suara atau sekitar 21,58% dari total suara sah. Dalam Pemilu Legislatif 2009, Partai Golkar mengalami

penurunan suara dan turun ke peringkat kedua, sementara posisi pemenang pemilu diraih oleh Partai Demokrat.

Pada Musyawarah Nasional (Munas) VIII yang digelar di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum, menggantikan Jusuf Kalla. Di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie, Partai Golkar kembali menempati posisi kedua dalam Pemilu 2014. Namun, suara partai mengalami penurunan yang mengakibatkan hilangnya 16 kursi di parlemen. Tren penurunan ini berlanjut pada Pemilu Legislatif 2019, di mana Golkar merosot ke posisi ketiga dan kembali kehilangan 6 kursi di DPR. Setelah itu, di bawah pimpinan Airlangga Hartarto, meskipun tidak berada di posisi teratas dalam persaingan, Golkar mencatat peningkatan dukungan pemilih yang paling signifikan dibandingkan partai lain dalam pemilu kali ini. Jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2019, keberhasilan Golkar semakin terlihat jelas.

Pada pemilu sebelumnya, Golkar memperoleh 12,31 persen suara dengan dukungan dari 17.229.789 pemilih, menempatkannya di posisi ketiga setelah PDI-P dan Gerindra. Namun, pada pemilu kali ini, Golkar berhasil menambah 5.978.865 suara, atau hampir 3 persen peningkatan dukungan. Hal ini menjadikan Golkar sebagai satu-satunya partai yang mengalami lonjakan dukungan pemilih terbesar.⁴⁰

⁴⁰ Burhanuddin Muhtadi, 2025, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/21/hasil-pemilu-2024-partai-golkar-paling-spektakuler-sekalipun-bukan-pemuncak>.

Partai Golkar di Kabupaten Tebo berdiri mengikuti perkembangan nasional Partai Golongan Karya yang awalnya didirikan sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 20 Oktober 1964 oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat, untuk menghimpun berbagai organisasi fungsional seperti pemuda, wanita, buruh, tani, dan nelayan dalam satu wadah sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia saat itu. Sekber Golkar ini bukan partai politik pada awalnya, melainkan wadah golongan karya yang berorientasi pada perwakilan golongan fungsional dan menegakkan Pancasila serta UUD 1945. Seiring waktu, Golkar berkembang menjadi partai politik yang dominan di Indonesia, termasuk di tingkat daerah seperti Kabupaten Tebo. Di Kabupaten Tebo, Partai Golkar mulai tampil sebagai kekuatan politik utama sejak Pemilu 2004 dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Tebo, menandai eksistensi resmi dan aktifnya Golkar di wilayah tersebut dalam sistem demokrasi lokal.

Partai Golkar di Kabupaten Tebo memiliki sejarah panjang sebagai kekuatan politik utama di daerah tersebut. Sejak Pemilu 2004, Golkar telah menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Tebo, meraih 10 kursi dari total 40 kursi. Pada Pemilu 2014 dan 2019, Golkar juga berhasil mempertahankan dominasi dengan meraih 11 dan 9 kursi serta menguasai pucuk pimpinan DPRD Kabupaten Tebo. Agus Rubiyanto, tokoh penting Golkar di Tebo, pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tebo periode 2009–2014 dan 2014–2019 serta menjadi Ketua DPD II Partai

Golkar Tebo sejak 2015, menunjukkan peran sentral Golkar dalam politik lokal.

Golkar di Tebo terus mengembangkan strategi politik untuk mempertahankan dan meningkatkan pengaruhnya, termasuk menggaet calon legislatif yang memiliki modal sosial kuat dalam pemilu 2024. Saat ini, Golkar masih menjadi partai dengan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Tebo, dengan 8 kursi dari 35 anggota DPRD periode 2024-2029, dan memegang posisi Ketua DPRD yang dijabat Khalis Mustiko sejak Oktober 2024.

Secara umum, Partai Golkar sendiri didirikan pada 1964 sebagai Sekretariat Bersama Golongan Karya yang berperan sebagai wadah golongan fungsional dan didukung oleh militer untuk menyeimbangkan kekuatan politik saat itu. Golkar kemudian bertransformasi menjadi partai politik yang dominan di Indonesia selama Orde Baru dan terus beradaptasi menjadi partai modern pasca reformasi. Di Kabupaten Tebo, Golkar telah menjadi pilar utama dalam politik daerah sejak awal pembentukan kabupaten, dengan peran signifikan dalam pembentukan dan pengelolaan pemerintahan daerah hingga kini⁴¹.

2.2 Visi Misi Partai Golongan Karya

Visi Partai Golongan Karya adalah “terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan

⁴¹ Web Partai Golkar <https://www.partaigolkar.com/profil/>

berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia”.

Paradigma Baru Partai Golkar mencakup doktrin, visi, misi, serta platform politik partai. Konsep ini mengandung unsur pembaruan sekaligus kesinambungan. Pembaruan terlihat dalam perubahan struktur dan kelembagaan partai, sementara kesinambungan tampak dalam komitmen Partai Golkar untuk tetap berlandaskan ideologi Pancasila serta doktrin karya dan kekaryaan. Tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk mengoreksi kesalahan masa lalu sekaligus membentuk Partai Golkar yang mandiri, demokratis, solid, berakar kuat, dan responsif. Melalui Paradigma Baru, Golkar diharapkan berkembang menjadi partai politik modern yang sesungguhnya, bukan sekadar "Partai Penguasa" yang berfungsi sebagai mesin pemilu atau alat legitimasi kekuasaan.

Dorongan utama perubahan ini berasal dari karakter dan identitas Golkar sendiri sebagai kekuatan pembaru. Seperti yang tertuang dalam poin keempat ikrar panca bhakti golongan karya, semangat pembaruan telah menjadi bagian dari jati diri partai sejak awal berdirinya. Oleh karena itu, transformasi ini merupakan manifestasi dari prinsip dasar tersebut. Paradigma baru ini mulai diwujudkan melalui reformasi internal, khususnya dalam restrukturisasi organisasi. Langkah ini bertujuan mengurangi dominasi pihak-pihak tertentu dalam partai, sehingga Partai Golkar dapat lebih mandiri dalam menjalankan perannya.⁴²

⁴² Web Partai Golkar <https://www.partaigolkar.com/profil/>

Untuk mengaktualisasikan doktrin dan merealisasikan visinya, partai Golkar menegaskan misi perjuangannya, yaitu: menegakkan, mengamalkan, serta mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa guna memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, partai ini berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi melalui pembangunan nasional di berbagai sektor, demi menciptakan masyarakat yang demokratis, menjunjung supremasi hukum, serta memastikan kesejahteraan rakyat dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam upaya menjalankan misi tersebut, Partai Golkar mengemban peran sebagai partai politik modern dengan beberapa fungsi utama. Pertama, memperkuat komitmen dalam menyerap, menyatukan, mengartikulasikan, serta memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat agar dapat diwujudkan dalam kebijakan politik yang bersifat publik. Kedua, melakukan rekrutmen kader berkualitas melalui sistem berbasis prestasi (sistem merit) agar dapat dipilih oleh rakyat untuk menempati posisi politik atau jabatan publik. Dengan berada di posisi strategis tersebut, para kader diharapkan mampu mengawasi serta mempengaruhi kebijakan pemerintahan agar sepenuhnya berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁴³

2.3 Doktrin Partai Golongan Karya

Paradigma Baru Partai Golkar tetap mempertahankan doktrin yang berasal dari Sekretariat Bersama (sekber) Golongan Karya yang didirikan

⁴³ Ibid,

pada 20 Oktober 1964. Doktrin yaitu, Karya Siaga Gatra Praja, tetap menjadi pijakan utama, tetapi diinterpretasikan secara lebih kreatif dan dinamis agar relevan dengan perkembangan zaman. Melalui doktrin ini, Partai Golkar melihat masyarakat berdasarkan fungsi dan perannya, bukan berdasarkan ideologi atau aliran tertentu. Pengelompokan sosial yang ideal menurut Golkar adalah berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai partai yang berorientasi pada program dan solusi, Golkar menekankan pentingnya tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah bangsa, bukan sekadar berpolemik tentang ideologi atau paham politik tertentu. Partai ini menolak pembelahan masyarakat berdasarkan primordialisme atau sektarianisme, karena pengelompokan semacam itu berisiko menimbulkan konflik ideologi yang dapat memicu perpecahan dan bahkan disintegrasi bangsa.

Dengan pendekatan ini, Golkar ingin memastikan bahwa masyarakat tidak terjebak dalam pertentangan politik yang tidak perlu. Fokus utama haruslah pada pembangunan dan kemajuan bersama. Bagi Golkar, tindakan nyata yang membawa manfaat bagi rakyat jauh lebih berarti dibandingkan sekadar wacana atau gagasan tanpa implementasi. Konsep karya kekaryaan mencerminkan kerja nyata yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan menyeluruh demi kesejahteraan rakyat. Bahkan, dalam pemahaman yang

lebih luas, karya kekaryaan juga mencerminkan nilai amal shalih yang diajarkan dalam berbagai agama.⁴⁴

Oleh karena itu, Golkar prihatin dengan kondisi politik yang sarat dengan persaingan tidak sehat antarpantai, yang sering kali hanya mengedepankan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan nasional. Fenomena ini menghambat kemajuan bangsa dan membuat Indonesia kehilangan peluang untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Euforia menjadikan politik sebagai panglima kehidupan dengan menonjolkan ideologi yang sempit hanya akan memperlambat upaya menyejahterakan rakyat. Akibatnya, masyarakat terjerumus dalam kemiskinan dan keterbelakangan, sementara situasi politik tetap penuh ketidakpastian.

Dalam kondisi seperti ini, Golkar hadir dengan doktrin karya kekaryaan sebagai solusi untuk menghindari perpecahan akibat kepentingan sempit. Dengan pendekatan yang menitikberatkan pada kerja nyata dan pembangunan, Golkar ingin menjaga keutuhan bangsa dan memastikan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama.⁴⁵

2.4 Makna Lambang Partai Golkar

Partai Golongan Karya atau Partai Golkar memiliki lambang berupa pohon beringin yang dikelilingi untaian padi dan kapas dalam segi lima.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

Berikut arti dari lambang tersebut.⁴⁶



Gambar 2.1 Lambang Partai Golkar

1. Pohon Beringin

Pohon beringin melambangkan persatuan dan perlindungan. Akar tunjang yang kuat menunjukkan bahwa Partai Golkar berakar dalam masyarakat Indonesia, mencerminkan kekokohan dan stabilitas dalam berpolitik.

2. Padi dan Kapas

Simbol padi dan kapas menggambarkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Padi melambangkan kemakmuran dalam bidang pangan, sedangkan kapas melambangkan kebutuhan sandang. Hal ini mengacu pada cita-cita Partai Golkar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

3. Perisai

Perisai melambangkan perjuangan dan tekad dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Ini juga menunjukkan bahwa

⁴⁶ Tawakal ikbal. (2024). *Kenapa Partai Golkar Lambangnya Pohon Beringin? Ini Filosofi dan Maknanya*. Pikiran-Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-017638855/kenapa-partai-golkar-lambangnya-pohon-beringin-ini-filosofi-dan-maknanya?page=all>

Partai Golkar siap melindungi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

4. Rantai Warna Kuning

Rantai dengan warna kuning melambangkan hubungan yang erat dan solidaritas di antara anggota partai serta masyarakat. Warna kuning adalah ciri khas Partai Golkar yang melambangkan semangat, optimisme, dan harapan.

5. Tulisan "Partai Golkar"

Tulisan ini menunjukkan identitas partai sebagai wadah aspirasi rakyat yang berjuang untuk pembangunan nasional.⁴⁷

⁴⁷ Ibid.

2.5 Struktur Kepengurusan DPP Nasional Partai Golkar

Tabel 2.1
Susunan kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029

No	Nama	Jabatan
1.	Bahlil Lahadalia	Ketua Umum
2.	Kahar Muzakir	Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian
3.	Bambang Soesatyo	Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga
4.	Adies Kadir	Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1
5.	Ahmad Doli Kurnia	Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
6.	Wihaji	Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan
7.	Ace Hasan Syadzily	Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1
8.	Idrus Marham	Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 2
9.	Meuty Hafid	Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2
10.	Emanuel Melkades Laka Lena	Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
11.	Yahya Zaini	Ketua Bidang Organisasi
12.	Zulkilfar Arse Sadikin	Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
13.	Panggah Susanto	Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan
14.	Fahd A Rafiq	Ketua Bidang Hubungan Ormas
15.	Kholis Malik	Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal
16.	Ilham Pangestu	Ketua Bidang Pemenang Pemilu Sumatera Bagian Utara
17.	Yudha Nofanza Utama	Ketua Bidang Pemenang Pemilu Sumatera Bagian Selatan
18.	Puteri Komarudin	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat
19.	Singgih Januratomoko	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah

20.	Ali Mufthi	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur
21.	Mukhtarudin	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah
22.	Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara
23.	Muhidin	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi
24.	Gede Sumarjaya Linggih	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara
25.	Mohamad Uswanas	Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua
26.	Nusron Wahid	Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian
27.	Sabik Rachman	Ketua Bidang Pengabdian Sosial
28.	Solihin Kalla	Ketua Bidang Kewiraswastaan
29.	Laode Syaiful Akbar	Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi
30.	Mustafa Radja	Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM
31.	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
32.	David Pajung	Ketua Bidang Tani dan Nelayan
33.	Hetifah	Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
34.	Tubagus Iman Ariyadi	Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan
35.	Dyah Roro Esty	Ketua Bidang Lingkungan Hidup
36.	Handoko	Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya
37.	Nurul Arifin	Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini
38.	Said Al Idrus	Ketua Bidang Kepemudaan
39.	Muhammad Misbakhun	Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi
40.	Christiani Aryani	Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM
41.	Dosmar Banjarnahor	Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi
42.	Dosmar Banjarnahor	Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan
43.	Mochamad Syaifei Kasno	Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan
44.	Ridwan Kamil	Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri

45.	Ali Mochtar Ngabalin	Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
46.	Andi Sinulingga	Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
47.	Aziz Samual	Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia
48.	Airin Rachmi Diani	Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria
49.	Ilham Permana	Ketua Bidang Kebijakan Industri
50.	Muhammad Sarmuji	Sekretaris jendral
51.	Hakim Komarudin	Wasekjen Keperguruan
52.	Riyono Asnan	Wasekjen Pemenang Pemilu Sumatera
53.	Dwi Priyo Atmojo	Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan
54.	Umar Lessy	Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur
55.	Veno Tetelepta	Wasekjen Fungsi Elektoral 1
56.	Ratu Dian Hatifah	Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1
57.	Daniel Muttaqien	Wasekjen Fungsi Elektoral 2
58.	Dewi Yulistiana	Wasekjen Hubungan Antar Lembaga
59.	M Shoim Haris	Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2
60.	Sosialisman Hidayat Hasibuan	Wakil Sekretaris Jenderal
61.	Sari Yuliati	Bendahara umum
62.	Doni Akbar	Wakil Bendahara Umum 1
63.	Gavriel Putranto Novanto	Wakil Bendahara Umum 2
64.	Ernawati Tahang	Wakil Bendahara Umum 3
65.	Raymond C Syauta	Wakil Bendahara Umum 4
66.	Ravindra Airlangga	Wakil Bendahara Umum 5
67.	Akbar Buchari	Wakil Bendahara Umum 6
68.	Ahmad Mus	Wakil Bendahara Umum 7
69.	Derek Loupatty	Sekretaris Bidang Organisasi
70.	Tardjo Ragil	Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
71.	Siti Marhamah	Sekretaris Bidang Hubungan Ormas
72.	Dara Adinda Kesuma Nasution	Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini
73.	Helmi Jen	Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
74.	Karmila Sari	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara
75.	Sekarwati	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan

76.	Iswara	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat
77.	Ferry Wawan Cahyono	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah
78.	Ahmad Labib	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur
79.	Adrianus Asia Sidot	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah
80.	Heri Purnama	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara, Bambang
81.	Haris Andi Surahman	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi
82.	Herman Hayong	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusra
83.	Soedeson Tandra	Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku dan Papua
84.	Khoirul Ana	Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian
85.	Febri Hendri	Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial
86.	Fitri Trisnawati Tandjung	Sekretaris Bidang Kewiraswastaan
87.	Abd Razak Said	Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi
88.	Ahmad Taufan Soedirjo	Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM
89.	Dina Hadiyana	Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan
90.	Syafaat Pradana	Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
91.	Kemas Ilham Akbar	Sekretaris Bidang Kepernudaan
92.	Teti Rohatiningsih	Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan
93.	Paul Hutajalu	Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup
94.	Seni, dan Budaya	Sekretaris Bidang Pariwisata
95.	Addu Rosi Khoirunnisa	Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan
96.	Yosi Efendi	Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri
97.	Andartno	Sekretaris Bidang Kehijakun Hukum dan HAM Muahaminad Satupali
98.	Fajar Zulkamaen	Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

99.	Galil Kartasasmita	Sekretaris Bidang Ketun Bidang Politik luar Negeri dan Hubungan Internasional
100.	Khoirudin Gestam	Sekretaris Bidang Pertahanan
101.	Kendra Falentino	Sekretaris Bidang Kebijakan Industri
102.	Ivan Kuntara	Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan
103.	Abdul Rahman Farisi	Sekretaris Ridang Kebijakan Ekomemi
104.	Tati Noviati	Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
105.	Sirajudin A Wahab	Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Linergi
106.	Mustahudin	Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria
107.	Andi Mulhanan Tombolotu	Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Ekternal
108.	Nurmansyah	Departemen Bidang Organisasi
109.	Wendi Nugraha	Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
110.	Herna Dwi Kusumawati	Departemen Bidang Hubungan Ormas
111.	Ahmad Anama	Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opin
112.	Marlinda Poernomo	Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
113.	Benny Indra Batubara	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara
114.	Maharani	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Ragian Selatan
115.	Deden Nasihin	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat
116.	Andiniya Komalla Parawitha	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah
117.	Miranti Dian Kinasih Laksmono	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur
118.	Ichfant	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah
119.	Sarifah Suraulah	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Tunur, Selatan dan Tengah
120.	Andi Fauziah Pujiwatie Hatta	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi

121.	Busfi Arusagara	Departemen Bidang Penenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa
122.	Avner Kadriatama Rawayai	Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua
123.	Dian Assaafri Nasa	Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian
124.	Angelia Dhian Permata Da Silva	Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian
125.	Medina Wiranata Kusumah	Departemen Bidang Pengabdian Sosial
126.	Mohammad Al Amin Mustofa	Departemen Bidang Kewiraswastaan
127.	Ria Sri Wulandari	Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi
128.	Filsa Praseptia	Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM 1
129.	Rina Dwi Andini	Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM 2
130.	Hartini Soraya	Departemen bidang Tani dan Nelayan
131.	Abukasim Sangadji	Departemen Bidang Tani dan Nelayan
132.	Triana Tandjung	Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
133.	Muhammad Omar Syarif	Departemen Bidang Kepemudaan
134.	dr. G. Ayu Amelinda Hanjani	Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan
135.	Nadia Zuhra Karla	Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan
136.	Rizka Nindya Intani	Departemen Bidang Lingkungan Hidup
137.	Ulrike Stephani Latuhamina	Departemen Bidang Lingkungan Hidup
138.	Dia Ramayana	Departemen Bidang Pariwisata dan Seni Budaya
139.	Lintang Idhayu Sandhika	Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya
140.	Saniatul Lativa	Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan 1
141.	Dwi Setya Pratiwi	Departemen Pemberdayaan Perempuan 2
142.	Syarifah Nadia	Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan 3
143.	Endah Cahya Immawati	Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri

144.	Arya Rizqi Darsono	Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri
145.	Muslim Jaya Bular-Butur	Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM 1
146.	Ariaditya Soedarsono	Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM 2
147.	Miranti Amelia P Kono	Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia
148.	Amtiati Amin	Departemen Bidang Ketua Bidang Politic Luar Negeri dan Hubungan Inlemasional
149.	Meliawati	Departemen Bidang Kebijakan Industri
150.	Departemcu Ridang Kebijakan Pertahanan	Departemcu Ridang Kebijakan Pertahanan
151.	Almanza Benara	Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan
152.	Fetty Angraenialini	Departemen Bidang Kehijakus Ekonomi
153.	Khatibur Rasyadi	Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
154.	Zigo Rolanda	Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi 1
155.	La Ode Muchanad	Departemcu Bidang Kebijakan Intrastraktne dan Energi 2
156.	Agrarn Gania Kartasamita	Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformad
157.	Demi Panjaitan	Departeraen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal
158.	Ir. H. Aburizal Bakrie	Dewan Kekornistan
159.	Prof M. Hama Mahkamah Partat Ketua: Freddy Larunahina	Dewan Etik
160.	Agus Gumiwung Karassamita	Dewan Pembina
161.	Prof. Dr. Yuli Ktianandi	Radan Penelitian dan Pengembangan
162.	Dave laksono	Lembaga Komunikasi dan Informasi
163.	Maman Abdurrahman	Pusat Data dan Transformasi Digital
164.	Syuhtnud Basri Ngabalin	Badan Saksi Nasional merangkap Direktur Sksekutif DPP Partai Golkar

Sumber: (Novianti Setuningsih, 2024).

2.6 Tujuan dan Fungsi Partai Golongan Karya

Partai Golkar bertujuan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945 sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.

Adapun tujuan Partai Golkar:

1. Menjaga serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sekaligus menegakkan UUD 1945.
2. Merealisasikan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dengan kesejahteraan merata baik secara material maupun spiritual, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat guna membangun kehidupan demokratis yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, supremasi hukum, serta hak asasi manusia.⁴⁸

Partai Golkar berfungsi sebagai wadah politik yang menghimpun persamaan sikap dan kehendak untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berikut fungsi Partai Golkar 2025:

1. Menggalang kesamaan sikap politik serta tujuan bersama demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

⁴⁸ Web Partai Golkar <https://www.partaigolkar.com/profil/>

2. Menjaga, mengamalkan, serta membela Pancasila dengan berorientasi pada program pembangunan di berbagai sektor tanpa diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau golongan.
3. Menyerap, menampung, menyalurkan, serta memperjuangkan aspirasi rakyat, sekaligus meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menyiapkan kader berkualitas dengan mengedepankan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Melakukan rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui proses demokratis dengan mempertimbangkan integritas, rekam jejak, serta prinsip kesetaraan.⁴⁹

2.7 Struktur Organisasi, Wewenang dan Kewajiban Partai Golkar di

Kabupaten Tebo

Struktur Organisasi Partai Golkar

Tabel 2.2
Susunan Kepengurusan DPD Partai Golkar TEBO periode 2020-2025

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Khalis Mustiko	Ketua
2	Liga Marisa	Ketua Harian
3	Ahmad Kharis	Wakil Ketua Bidang Organisasi
4	Sukidi	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
5	Nurkhairon	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6	H. Ngatiran	Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat

⁴⁹ Ibid.

No	Nama Lengkap	Jabatan
7	Havid Hasbilah RS	Wakil Ketua Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UMKM
8	Habiba Nisa	Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Cendekiawan
9	Tri Wahyuni	Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan
10	Syahrial	Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya
11	Efri Handayani	Wakil Ketua Bidang Kerohanian
12	Karsidi	Wakil Ketua Bidang Tani, Perkebunan dan Nelayan
13	Sabki	KeMa Bidang Ikdesmndm Daerah Temanggung
14	Seiyo Christianto	Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM
15	Hasnadi	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
16	Mazlam Kusdiyamto	Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
17	Abdul Rachman Ruslan	Wakil Ketua Kesehatan, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Kerawanan Sosial
18	Lasmonah	Wakil Sekretaris Bidang Organisasi
19	Ayu Rizqi Mugrorini	Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
20	Yattril Ahmad Nazori	Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu
21	Budi Santoso	Wakil Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat
22	Tomson Purba	Wakil Sekretaris Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UMKM

No	Nama Lengkap	Jabatan
23	Oktaviandi M	Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan dan Cendekiawan
24	Ayu Rizqi Mugrorini	Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan
25	Yatril	Wakil Sekretaris Bidang Seni dan Budaya
26	Ahmad Nazori	Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian
27	M. Darul Katani	Wakil Sekretaris Bidang Tani, Perkebunan dan Nelayan
28	Budi Santoso	Wakil Sekretaris Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal
29	Tomson Purba	Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM
30	Nur Soleh	Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga
31	Ridha Silmi	Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
32	Oktaviandi M	Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, Bencana dan Kerawanan Sosial
33	Rosmalena	Bendahara
34	M. Sumarwanto	Wakil Bendahara Bidang Organisasi
35	Asrunlam	Wakil Bendahara Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
36	Suroto	Wakil Bendahara Bidang Pemenangan Pemilu
37	Ifani Fajrianti	Wakil Bendahara Bidang Koperasi, Wiraswasta dan UMKM

No	Nama Lengkap	Jabatan
38	Supriyadi	Wakil Bendahara Bidang Pendidikan dan Cendekiawan
39	Eti Purnani	Wakil Bendahara Bidang Pemberdayaan Perempuan
40	Trieko Saputrika	Wakil Bendahara Bidang Seni dan Budaya
41	Mansur Sobow	Wakil Bendahara Bidang Kerohanian
42	Ahmad Ansori	Wakil Bendahara Bidang Tani, Perkebunan dan Nelayan
43	Suprayitno	Wakil Bendahara Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal
44	Wahyu Putra Wibawa	Wakil Bendahara Bidang Hukum dan HAM
45	Krisna Bayu Pramudya	Wakil Bendahara Bidang Pemuda dan Olahraga
46	Ahmad Dini	Wakil Bendahara Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini
47	Imam Syafe'i	Wakil Bendahara Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana
48	Wasito	Ketua Biro Bidang Organisasi
49	M. Maduan	Anggota
50	M. Bahauddin	Anggota
51	M. Elba Reyhand Dandy	Ketua Biro Bidang Kaderisasi dan Pemenangan Pemilu
52	Samsul Bahri	Anggota
53	Lestiyana	Ketua Biro Bidang Pengabdian Masyarakat
54	Sanusi	Anggota

No	Nama Lengkap	Jabatan
55	Sanan	Ketua Biro Bidang Wiraswasta, Koperasi dan UMKM
56	Noni Novita Devi	Anggota
57	Ari Sapuira	Anggota
58	M Riska	Ketua Biro Bidang Pendidikan dan Cendekiawan
59	Frzndi Al-Fad Bukhori	Anggota
60	Wairdnlqohar	Ketua Biro Bidang Pemberdayaan Perempuan
61	Meta Rosida	Anggota
62	Suryadi Sudirja	Ketua Biro Bidang Seni dan Budaya
63	Isna Faiq Prastiyo	Ketua Biro Bidang Seni dan Budaya
64	Dian Putranti	Ketua Biro Bidang Kerohanian
65	Ngatdan	Anggota
66	Sunyoto	Ketua Biro Bidang Tani, Perkebunan dan Nelayan
67	Arakaharudinsyah	Anggota
68	Benduahaniko	Anggota
69	Seryawan Rozaqumullah	Ketua Biro Bidang Pedesaan dan Daerah Tertinggal
70	Juantoyo	Anggota
71	Ahmad Saiful	Anggota
72	Eftonno Maryanto	Ketua Biro Bidang Hukum dan HAM
73	Tuswanto	Anggota
74	Ansori	Ketua Biro Bidang Pemuda dan Olahraga

No	Nama Lengkap	Jabatan
75	Guntoro	Anggota
76	Suci Ramadan	Anggota
77	Intizana	Anggota
78	Karwi	Ketua Biro Bidang Biro Kesehatan, lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana Dan Kerawanan Postal
79	Hardinas May Putra	Anggota
80	Putri Samaniati	Anggota

Sumber : Partai Golkar Tebo

Partai Golkar memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta desa/kelurahan atau sebutan lainnya. Setiap tingkatan dipimpin oleh badan pengurus masing-masing, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, dan Pimpinan Desa/Kelurahan. DPP merupakan badan eksekutif tertinggi dalam partai yang bersifat kolektif dan memiliki beberapa wewenang, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan nasional partai berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, hasil Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, serta Peraturan Organisasi Partai GOLKAR.

2. Mengesahkan susunan anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai GOLKAR serta menetapkan komposisi Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
3. Menyelesaikan sengketa kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
4. Memberikan penghargaan dan sanksi sesuai ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.⁵⁰

2.8 Tipologi Kader Partai Golongan Karya

Setiap organisasi massa terdiri dari individu dengan karakteristik yang beragam, yang pada akhirnya menghasilkan respons dan kontribusi yang berbeda dalam menjalankan peran mereka. Keberagaman ini perlu dipetakan dengan baik oleh partai agar potensi setiap kader dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menggerakkan dinamika politik. Dalam hal ini, Partai Golkar menetapkan klasifikasi kader dengan tugas dan peran yang berbeda. Klasifikasi ini terbagi ke dalam lima kategori kader, sebagaimana diuraikan dalam materi orientasi fungsionaris pusat Partai Golkar yang disusun oleh Lembaga Pengelola Kaderisasi Partai Golkar.⁵¹

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

2.8.1 Kader Penggerak Partai

Kader Penggerak Partai terdiri dari pengurus yang berada di berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga desa, dengan tugas utama menjalankan fungsi kepartaian guna meningkatkan kapasitas serta mobilitas partai. Peran mereka difokuskan pada upaya memperkuat efektivitas partai dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran dari kategori kader ini mencakup para pimpinan partai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Selain itu, juga mencakup anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) di setiap tingkatan, pimpinan organisasi kemasyarakatan yang membentuk Partai Golkar, pemimpin organisasi sayap partai, serta para fungsionaris partai.⁵²

2.8.2 Kader Fungsional

Kader Fungsional adalah kader yang ditempatkan dalam berbagai kelompok masyarakat, baik yang bersifat profesional maupun fungsional. Tugas utama mereka adalah memperluas dukungan bagi partai di berbagai organisasi dan komunitas masyarakat guna menunjang keberhasilan dalam Pemilu. Peran utama kader ini mencakup penggalangan dukungan serta aksi-aksi simpatik untuk memperbesar basis massa dan meningkatkan citra partai dengan mengoptimalkan potensi kelompok-kelompok fungsional. Sasaran utama dari kategori kader ini mencakup berbagai kelompok fungsional seperti petani, nelayan, pekerja, pemuda, perempuan, rohaniawan,

⁵² Ibid.

intelektual, insan pers dan media massa, serta berbagai kelompok profesi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan fungsi elektoral.⁵³

2.8.3 Kader Penggerak Pemerintahan

Kader Penggerak Pemerintahan adalah kader yang memegang posisi dalam pemerintahan atau jabatan publik di berbagai tingkat, dengan tugas utama mengelola pemerintahan serta menjalankan kebijakan yang selaras dengan visi dan misi partai. Mereka berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung tujuan partai.

Kelompok sasaran dari kategori kader ini mencakup anggota Partai Golkar yang menjabat di pemerintahan dan institusi negara, seperti menteri, gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) di berbagai tingkatan lembaga perwakilan.⁵⁴

2.8.4 Kader Karakterdes

Kader Karakterdes, atau dikenal sebagai Kader Penggerak Territorial Desa, merupakan kader Partai Golkar yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan. Peran utamanya adalah membangun citra positif partai, memperluas basis dukungan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid.

Tugas utama Kader Penggerak Teritorial Desa adalah melakukan kegiatan simpatik guna memperluas dukungan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembangunan. Kelompok sasaran dari kader ini mencakup anggota POKKAR (Kelompok Karya), kader organisasi masyarakat yang beraktivitas di desa atau kelurahan, simpatisan Partai Golkar, pemilih pemula, serta anggota kelompok fungsional yang ada di tingkat desa atau kelurahan.⁵⁵

2.8.5 Kader Penggalang

Kader Penggalang merupakan kader muda yang bertugas membangun jaringan guna memperluas dukungan terhadap Partai Golkar (Wasito, 2025). Peran utama kader ini adalah memperluas basis massa serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai. Kelompok sasaran dari Kader Penggalang adalah anggota Partai Golkar yang berusia antara 17 hingga 35 tahun.

2.9 Dasar-Dasar Pemikiran

Partai Golkar memiliki dasar-dasar pemikiran yang menjadi nilai-nilai utama bagi Partai Golkar yang diterapkan untuk doktrinasi bagi para kader Partai Golkar.⁵⁶

2.9.1 Hakekat Karya

Pada dasarnya, berkarya merupakan bagian mendasar dari kehidupan manusia. Manusia hidup untuk berkarya, dan berkarya karena ia hidup. Oleh

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid.

karena itu, berkarya merupakan sesuatu yang alami dan menjadi esensi kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Melalui karya, baik secara fisik maupun spiritual, manusia mengelola serta memanfaatkan alam agar menjadi tempat yang semakin layak baginya. Sebaliknya, alam yang telah dikelola turut membantu manusia dalam mengembangkan dirinya. Dengan demikian, berkarya merupakan interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungannya, yang membawa kebahagiaan bagi individu, kelompok, serta umat manusia secara keseluruhan.

Karya memiliki dimensi sosial dan individual yang saling berhubungan. Setiap karya yang dihasilkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memiliki makna bagi individu yang melakukannya. Oleh karena itu, aspek sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap karya yang dilakukan. Sebagai aktivitas alami manusia, berkarya merupakan tanggung jawab setiap individu, baik dilakukan dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kewajiban dan hak, serta antara kebutuhan dan pengorbanan, harus senantiasa dijaga dalam setiap bentuk karya.⁵⁷

2.9.2 Karya di dalam Pancasila

Konsep Karya sebagai aktivitas kodrati manusia harus diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan Pancasila serta diatur dalam tatanan Undang-Undang

⁵⁷ Ibid.

Dasar 1945. Dengan dasar tersebut, beberapa pemikiran utama mengenai Karya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Karya merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selain bertujuan untuk kesejahteraan dunia, Karya juga memiliki dimensi spiritual. Oleh karena itu, baik Karya yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Tuhan.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Karya harus dinilai berdasarkan norma kemanusiaan.

Sebagai bagian dari umat manusia, setiap individu wajib memastikan bahwa Karyanya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi sesama, bangsa, negara, dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak ada pekerjaan yang dianggap rendah selama memiliki manfaat bagi orang lain. Selain itu, Karya harus meningkatkan kesejahteraan, memberikan kepuasan, serta menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja.

3. Sila Persatuan Indonesia.

Pengelolaan Karya harus berorientasi pada pemersatuan bangsa dan penguatan negara. Karya tidak boleh menjadi alat yang memperuncing perbedaan berdasarkan suku, agama,

daerah, atau status sosial. Sebaliknya, Karya harus mendorong kerja sama dan sinergi di antara berbagai kelompok kerja dalam suatu koordinasi yang harmonis sehingga memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Dalam menjalankan Karya, setiap keputusan harus dibuat melalui musyawarah untuk mufakat. Setiap perselisihan yang mungkin muncul antar kelompok kerja harus diselesaikan melalui dialog yang adil, bukan dengan pemaksaan sepihak, karena hal tersebut dapat merugikan kesejahteraan umum. Penyelesaian yang tidak berimbang juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hasil Karya bersama harus dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Pembagian harus dilakukan secara seimbang, disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing individu. Tidak boleh ada kesenjangan sosial yang mencolok. Dalam konsep ini, Masyarakat Adil dan Makmur yang seimbang secara spiritual dan material menjadi tujuan utama. Mereka yang memiliki keahlian dan kekuatan lebih memiliki tanggung jawab moral untuk membantu yang lebih lemah. Namun, keadilan sosial hanya dapat tercapai

melalui perjuangan bersama yang menuntut pengorbanan dari seluruh warga negara.⁵⁸

2.9.3 Hakekat Kekaryaan

Berdasarkan pemikiran mengenai Karya dan kaitannya dengan Pancasila, konsep Kekaryaan mencerminkan prinsip perjuangan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang diwujudkan melalui pengabdian dalam bentuk karya sesuai dengan bidang kerja atau lingkungan masing-masing. Kekaryaan merupakan prinsip perjuangan Golongan Karya dalam mengawal serta mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tujuan utamanya adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur, baik secara spiritual maupun material, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁹

2.9.4 Kekaryaan adalah Tuntutan Jaman

Sudah terbukti bahwa pengelompokan politik yang hanya berlandaskan perbedaan kelas sosial, ideologi, agama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, atau etnisitas cenderung memicu konflik yang berkepanjangan.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

Kekaryaan menjadi wadah yang kreatif karena berlandaskan pada pembagian kerja yang jelas sesuai bentuk pengabdian, yang didasarkan pada daya pikir, kreativitas, dan hasil karya. Melalui konsep ini, hubungan timbal balik dalam masyarakat dapat diharmonisasikan untuk mencapai kesejahteraan bersama secara seimbang.⁶⁰

2.9.5 Masyarakat Kekaryaan

Perkembangan masyarakat merupakan suatu rangkaian realitas sosial yang tercermin dalam interaksi timbal balik antara individu maupun kelompok. Bentuk hubungan timbal balik ini berakar pada pola pengelompokan individu, baik yang terjadi secara alami maupun yang dirancang melalui perencanaan.

Ketika masyarakat mulai mengelompok berdasarkan prinsip Kekaryaan, maka perbedaan berdasarkan kelas sosial, aliran keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ataupun golongan etnis tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran dalam kehidupan sosial. Hal ini karena Kekaryaan menghilangkan potensi konflik antar kelas sosial, aliran, agama, maupun etnis dengan menciptakan standar baru yang memungkinkan hubungan yang lebih kreatif dan harmonis, serta menyelaraskan kepentingan khusus kelompok dengan kepentingan bersama dalam masyarakat.

⁶⁰ Ibid.

Pola pengaturan ini sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Bangsa Indonesia, yaitu asas keselarasan dan keseimbangan. Prinsip ini diwujudkan dalam musyawarah untuk mufakat, gotong royong, serta prinsip efektivitas dan efisiensi (Dayaguna dan Hasilguna), yang pada akhirnya mendukung pemerataan hasil pembangunan bagi seluruh masyarakat.⁶¹

⁶¹ Tawakal ikbal. (2024). *Kenapa Partai Golkar Lambangnya Pohon Beringin? Ini Filosofi dan Maknanya*. Pikiran-Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-017638855/kenapa-partai-golkar-lambangnya-pohon-beringin-ini-filosofi-dan-maknanya?page=all>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai bagaimana konsolidasi perlembagaan partai golkar pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Tebo. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori dimensi pelembagaan partai yang dikembangkan oleh Basedau dan Stroh, yang mencakup empat dimensi utama: *roots in society* (akar sosial atau mengakar dalam masyarakat), *autonomy* (otonomi indenpenden dalam mengambil keputusan), *level of organization* (tingkat organisasi atau alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan), dan *coherence* (kekompakan para anggota partai).⁶²

Setiap dimensi ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana partai Golkar sebagai partai politik mapan mampu mempertahankan keberadaannya secara institusional dalam konteks lokal Kabupaten Tebo. Penelitian ini mengevaluasi akar sosial partai melalui keterkaitannya dengan masyarakat, organisasi sayap, dan relasi dengan kelompok-kelompok kepentingan di daerah. Dimensi organisasi dianalisis berdasarkan struktur kepengurusan, mekanisme rekrutmen kader, serta sistem pengambilan keputusan di tingkat kabupaten. Sementara itu, konsistensi perilaku dinilai dari keselarasan antara ideologi partai, sikap politik kader, dan kebijakan yang diambil di tingkat legislatif maupun

⁶² Basedau, M. &. (2008). *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. African: GIGA Working Paper No. 69.

eksekutif lokal. Terakhir, legitimasi partai diukur dari persepsi publik terhadap kinerja dan integritas Partai Golkar di Kabupaten Tebo, baik dari kalangan internal (anggota dan kader) maupun eksternal (masyarakat umum dan pemilih).

Dengan pendekatan ini, bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual Partai Golkar di Kabupaten Tebo sebagai institusi politik, serta mengidentifikasi sejauh mana partai tersebut mengalami proses pelebagaan secara stabil dan berkelanjutan di tingkat lokal.

3.1 *Roots In Society* (Mengakar dalam Masyarakat)

Dalam konteks penelitian ini peneliti memiliki dua indikator ukuran yaitu perolehan suara di setiap pemilu dan hubungan dengan ormas, hal dapat dianalisis melalui kerangka teori pelebagaan partai politik yang dikemukakan oleh Basedau dan Stroh.⁶³ Peningkatan perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Tebo pada Pemilu 2024 indikator ini yang menjadi fokus pertama *roots in society*, yaitu merujuk pada sejauh mana Partai Golkar memiliki keterikatan dan basis yang kuat serta berkelanjutan di tengah masyarakat.

Akar sosial merupakan salah satu indikator penting dalam pelebagaan partai politik, karena melalui akar sosial yang kuat, sebuah partai mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan sosial dan politik yang dinamis. Dalam konteks Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan salah satu partai politik yang menunjukkan konsistensi dan keberlanjutan dalam membangun serta mempertahankan akar

⁶³ Baserdau, M., & Stroh, A. (2008). Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties. GIGA Working Paper. 728-730

sosialnya. Sejak era Orde Baru hingga era reformasi dan kontemporer, Partai Golkar di Kabupaten Tebo tetap menjadi aktor politik utama dengan pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan lokal dan dinamika politik masyarakat. Sebagaimana, hasil wawancara dengan Khalis Mustiko, S.H., selaku ketua DPRD Partai Golkar Kabupaten Tebo, dijelaskan bahwa:

“Keberadaan Partai Golkar di Tebo tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang keterlibatannya dalam proses pembangunan dan relasi sosial masyarakat. Pada masa Orde Baru, Golkar dikenal sebagai partai pemerintah yang menjangkau masyarakat melalui berbagai program pembangunan desa. Dalam konteks Tebo, jaringan partai ini telah terbangun melalui berbagai institusi dan relasi personal antara kader-kader Golkar dan masyarakat, terutama melalui tokoh-tokoh lokal yang memiliki posisi strategis dalam struktur sosial. Kehadiran tokoh lokal yang menjadi representasi Golkar di tingkat desa telah menjadikan partai ini lebih dari sekadar entitas politik; Golkar menjadi bagian dari struktur sosial masyarakat pedesaan”.

Salah satu kekuatan utama Golkar di Tebo adalah kemampuannya dalam memelihara dan memperluas jaringan sosial hingga ke tingkat dusun. Jaringan ini bersifat dinamis dan terus diperbarui melalui proses kaderisasi, konsolidasi internal, serta adaptasi terhadap isu-isu lokal. Melalui kehadiran tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuka agama yang menjadi bagian dari jejaring Golkar, partai ini mampu membangun hubungan yang bersifat patron-klien, yang pada gilirannya menciptakan loyalitas politik yang kuat.

Sebuah partai politik yang dikelola secara efektif dan berorientasi jangka panjang idealnya mampu membangun stabilitas serta keterikatan yang kuat di tengah masyarakat. Hal ini mengisyaratkan bahwa partai tersebut harus mampu merebut simpati publik dan memperoleh tempat yang signifikan dalam

kesadaran kolektif masyarakat. Namun, pencapaian tersebut bukanlah sesuatu yang instan, melainkan membutuhkan proses yang berkelanjutan dan konsistensi dalam waktu yang panjang. Untuk mencapai hal tersebut, partai politik harus mampu menunjukkan kinerjanya melalui pelaksanaan berbagai fungsi politik secara nyata, terutama dalam merespons isu-isu yang berkembang dan menjadi saluran aspirasi masyarakat. Ketika fungsi-fungsi tersebut dijalankan secara optimal dan relevan, maka kepercayaan serta dukungan masyarakat akan tumbuh secara alami, sebagaimana ditegaskan oleh Basedau. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khalis Mustiko, S.H ketua DPRD Partai Golkar Kabupaten Tebo yaitu :

“Aktivitas sosial yang dilakukan oleh Partai Golkar Tebo menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat akar sosial tersebut. Partai ini secara rutin menggelar berbagai kegiatan sosial seperti bakti sosial, bantuan untuk kelompok tani, pelatihan pertanian terpadu, kegiatan keagamaan, serta dukungan terhadap kelompok masyarakat produktif. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, Partai Golkar Tebo aktif menyelenggarakan pelatihan budidaya tanaman hortikultura dan pengolahan hasil pertanian yang melibatkan kelompok tani dari berbagai kecamatan. Kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi juga memperkuat citra partai sebagai organisasi yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat”.



Kegiatan majelis taklim

Dalam bidang keagamaan, Golkar Tebo sering terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, pembangunan sarana ibadah, serta mendukung majelis taklim dan pengajian rutin di desa-desa. Partai Golkar mengadakan pengajian akbar di sebuah pondok pesantren Darul Hikam Putri sebagai upaya memperkuat akar dan hubungan partai dengan masyarakat. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa Golkar memahami pentingnya nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat Tebo, yang mayoritas beragama Islam. Melalui pendekatan ini, partai tidak hanya membangun hubungan politis, tetapi juga hubungan kultural dan spiritual yang lebih dalam dengan masyarakat.

Organisasi sayap partai seperti AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar) dan KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar) memainkan peran penting dalam menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, khususnya pemuda dan perempuan. AMPG aktif mengorganisir kegiatan kepemudaan seperti turnamen olahraga, pelatihan kewirausahaan, dan diskusi publik yang melibatkan generasi muda di berbagai wilayah Kabupaten Tebo. Sementara itu, KPPG menjadi garda terdepan dalam pemberdayaan perempuan, dengan fokus pada

pelatihan keterampilan rumah tangga, kewirausahaan perempuan, serta edukasi kesehatan keluarga.

Keterlibatan organisasi sayap ini menunjukkan bahwa Golkar tidak hanya fokus pada segmen tradisional pendukung partai, tetapi juga berupaya membangun basis dukungan dari kalangan muda dan perempuan yang merupakan elemen penting dalam demografi pemilih saat ini. Strategi ini sejalan dengan upaya pelembagaan partai yang menuntut adanya inklusivitas, regenerasi kepemimpinan, dan adaptasi terhadap dinamika masyarakat modern.⁶⁴

Tokoh-tokoh lokal di Tebo berperan sebagai simpul utama dalam jaringan kekuatan Golkar. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai elite lokal yang memiliki pengaruh sosial, tetapi juga sebagai agen mediasi antara struktur partai dan kebutuhan masyarakat. Tokoh-tokoh ini, yang sebagian besar merupakan mantan kepala desa, tokoh agama, atau pengusaha lokal, memanfaatkan jejaring sosial dan kultural mereka untuk mengartikulasikan agenda partai dan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Relasi yang dibangun bersifat timbal balik: masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber daya dan bantuan sosial, sementara partai memperoleh dukungan politik yang stabil.

⁶⁴ Immanuel, G. K., & Djuyandi, Y. (2024). Strategi Partai Golkar dalam Pemilu 2024: Studi Kasus Airin Rachmi Diany pada Dapil Banten III. *Journal of Political Issues*, 6(1), 72–86.

Dalam hal pelebagaan partai, kekuatan akar sosial yang dimiliki oleh Golkar di Tebo menjadi modal penting untuk meningkatkan kapasitas institusional partai. Mengakar dalam masyarakat ini memungkinkan partai untuk bertahan dalam berbagai kontestasi politik, memperkuat legitimasi di mata publik, serta menciptakan stabilitas internal yang dibutuhkan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, strategi penguatan mengakar dalam masyarakat tidak hanya relevan dalam konteks elektoral, tetapi juga dalam konteks pembangunan demokrasi lokal yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khalis Mustiko, S.H ketua DPRD Partai Golkar Kabupaten Tebo yaitu :

“Secara keseluruhan, keberhasilan Golkar di Kabupaten Tebo dalam membangun dan mempertahankan akar sosialnya merupakan hasil dari kombinasi strategi historis, adaptasi terhadap dinamika lokal, pemanfaatan tokoh masyarakat, serta konsistensi dalam menggelar kegiatan sosial yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan terus mengembangkan strategi ini, Golkar memiliki peluang besar untuk tetap menjadi kekuatan politik utama di Kabupaten Tebo dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.”

Berikut adalah data perolehan suara Partai Golkar Tebo dari tahun 2014, 2019 dan 2024. Pada pemilu 2014, Partai Golkar memperoleh 11 kursi, bergitu juga dengan pemilu 2019 yang juga menjadi pemenang pemilu dengan perolehan 9 kursi. Pada pemilu legislatif tahun 2019, Partai Golkar di Kabupaten Tebo meraih kemenangan kursi sebanyak 9 kursi dengan jumlah suara : 26,93 % suara penetapan keputusan tersebut ditetapkan oleh KPU. Hasil pemilu legislatif 2019 ditetapkan dalam Kerputusan Nomor 135/PL/KPU/V/2019 tentang Penetapan Presiden dan

Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Tahun 2019. Hasil rekapitulasi KPU secara nasional itu terdiri atas perolehan suara di 34 provinsi dan 130 PPLN dengan jumlah suara sah 139.971.260.

Sementara itu, dalam menghadapi pemilu 2024, Partai Golkar Kabupaten Tebo mengalami permasalahan dengan keluarnya kader-kader potensial. Seperti Agus Rubianto yang merupakan mantan ketua DPRD Tebo periode 2014-2019, dan Mazlan yang juga mantan ketua DPRD Kabupaten Tebo pada periode 2019-2024 yang hijrah ke Provinsi sebagai salah satu caleg Golkar DPRD Provinsi Jambi Dapir Bungo Tebo. Namun begitu, partai Golkar tetap menjadi pemenang di pemilu Tebo 2024.

Tabel 3.1
Daftar Perolehan Suara Partai pemilu 2024 Kab. Tebo

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Golkar	27.283	8
2.	Partai PDIP	14.476	5
3.	Partai PKB	12.567	4
4.	Partai Gerindra	7.210	3
5.	Partai PAN	8.512	4
6.	Partai Nasdem	8.439	3
7.	Partai PKS	7.252	3
8.	Partai Demokrat	9.695	4
9.	Partai PPP	1.590	1

Sumber : (KPU Kabupaten Tebo,2024)

Dalam konteks masa depan, Partai Golkar perlu terus memperkuat kelembagaan eksternal melalui pengembangan sistem informasi kader, digitalisasi aktivitas partai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, memperkuat dialog dan kemitraan dengan masyarakat sipil serta menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aktivitas politik menjadi kunci

untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, akar sosial yang telah dibangun dapat menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan partai dalam menghadapi tantangan politik masa depan.

Tabel 3.2
Suara Terbanyak 4 Dapil Tebo, 2024

DAPIL I	DAPIL II	DAPIL III	DAPIL IV
Eni Mawarti 3.518 suara (Golkar).	Feri Ariyanto 2.736 suara (Golkar).	Khalis Mustiko 8.487 suara (Golkar).	Sabki 2.907 suara (Golkar).

Partai yang mendapat kursi di parlemen terbanyak yakni Golkar 8 kursi, kemudian disusul PDIP 5 kursi, PKB 4 kursi, Demokrat 4 kursi dan pan 4 kursi. Sedangkan partai Nasdem, PKS dan Gerindra, masing masing 3 kursi, dan terakhir PPP 1 kursi. Hasil perolehan kursi yang di tetapkan ini, akan disampaikan kepada parpol dan calon terpilih serta Bawaslu Tebo. Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Atiul Fuandiyah ketua KPU Kabupaten Tebo.

“PKB 4 kursi Gerindra 3 kursi, PDIP 5 kursi, Golkar 8 kursi, kemudian Nasdem 3 kursi, kemudian PKS 3 kursi, kemudian PAN 4 kursi, Demokrat 4 kursi dan P31 kursi, jumlah total 35, 35 caleg terpilih dari 9 parpol ini nantinya, akan menjadi Anggota DPRD Tebo untuk periode 2024-2029 mendatang.”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sejalan dengan banyaknya masyarakat yang sudah mengenal partai golkar dan hubungan dengan masyarakat. Hal ini dapat dijabarkan melalui indikator *Roots in Society* (Mengakar dalam Masyarakat), dapat dijelaskan

bahwa Partai Golkar memiliki basis massa yang cukup kuat di tengah masyarakat Kabupaten Tebo. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama.

Pertama, Partai Golkar merupakan partai politik yang telah lama berdiri, bahkan sejak masa awal kemerdekaan dan mencapai puncak pengaruhnya pada era Orde Baru. Sejarah panjang ini telah menempatkan Partai Golkar sebagai salah satu kekuatan politik yang dikenal luas dan melekat dalam ingatan kolektif masyarakat Tebo.

Kedua, Partai Golkar di Kabupaten Tebo menjalin kedekatan dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui tokoh masyarakat, organisasi sayap seperti AMPG dan KPPG, serta kegiatan sosial-kultural rutin memperkuat legitimasi partai di tingkat lokal. Keterlibatan calon legislatif dari Partai Golkar dalam kegiatan ormas tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara partai dan aktivitas keagamaan masyarakat. Hal ini memperkuat posisi Partai Golkar sebagai entitas politik yang hadir dan berkontribusi langsung dalam dinamika sosial keagamaan masyarakat lokal.

Ketiga, Partai Golkar juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti menyalurkan bantuan kepada masyarakat Tebo yang kurang mampu. Dalam aksi sosial ini menampilkan Partai Golkar sebagai partai yang peduli dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Partai Golkar berhasil melakukan pelebagaan partai politik yang baik di Kabupaten Tebo melalui strategi yang mengakar kuat di masyarakat. Capaian peningkatan suara Partai Golkar pada Pemilu 2024 di daerah ini mencerminkan keberhasilan partai

dalam membangun koneksi historis, menjalin hubungan dengan berbagai elemen sosial, dan menjalankan fungsi partai secara optimal. Semua ini menjadi fondasi dalam memperkuat citra positif dan memperluas dukungan masyarakat Kabupaten Tebo terhadap Partai Golkar.

3.2 *Autonomy* (Independen Dalam Mengambil Keputusan)

Menurut kerangka teoretis yang dikemukakan oleh Basedau dan Stroh, indikator *autonomy* atau *kemandirian dalam pengambilan keputusan* mengacu pada sejauh mana sebuah partai politik, dalam hal ini Partai Golkar, mampu bertindak secara independen tanpa adanya dominasi atau intervensi dari aktor eksternal dalam proses penentuan kebijakan. Otonomi dalam konteks ini menuntut agar partai memiliki peran sentral dalam proses formulasi kebijakan pemerintah serta menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan internal organisasi. Sebuah partai yang telah melembaga secara kuat tidak mudah terpengaruh oleh tekanan dari luar atau oleh kepentingan individu yang memiliki kekuasaan di dalam partai. Meskipun pengaruh dari aktor-aktor internal yang dominan tidak sepenuhnya dapat dieliminasi, partai yang terlembaga secara baik mampu menahan dan mengelola intervensi tersebut secara efektif.⁶⁵

Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan pada penentuan caleg dalam Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Tebo. Penelitian ini akan menelaah

⁶⁵ Basedau, M., & Stroh, A. (2008). *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. GIGA Working Paper. 90-123

sejauh mana Partai Golkar di Kabupaten Tebo menunjukkan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam tahap kandidasi dan rekrutmen calon legislatif (Caleg) selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Fokus utamanya adalah menilai apakah proses tersebut berlangsung bebas dari intervensi pihak luar dan seberapa besar kontrol internal partai dalam mengatur mekanisme seleksi caleg secara mandiri dan institusional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Liga Marisa anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo yaitu :

"Dalam Partai Golkar, proses rekrutmen calon legislatif (Caleg) telah diatur secara sistematis dalam AD/ART partai, dan setiap kader yang ingin maju harus melalui tahapan seleksi internal yang cukup ketat. Tahapan ini dimulai dari seleksi awal terhadap calon-calon potensial, yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis mendalam oleh DPD Kabupaten Tebo. Dalam proses ini, kami melakukan profiling dan tracking untuk menilai latar belakang, kapasitas, serta rekam jejak calon sebelum akhirnya ditentukan siapa saja yang layak untuk dicalonkan. Sebagai Ketua DPD, saya juga menekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara Pilkada dan Pileg, terutama dari sisi kebutuhan logistik dan dukungan finansial. Pengalaman saya sebelumnya di Pileg bersama partai lain menunjukkan bahwa Pileg sangat bergantung pada kemampuan finansial kandidat. Oleh karena itu, dalam proses seleksi, kami turut mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kemampuan pendanaan calon, hingga latar belakang keluarganya. Dalam konteks sosial kita, jaringan keluarga besar juga memainkan peran penting dalam membentuk basis dukungan di lapangan. Perlu saya sampaikan bahwa rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka. Hal ini didasari oleh pengalaman kami sebelumnya, di mana pembukaan pendaftaran secara umum justru memicu ekspektasi yang tinggi dari banyak pihak. Ketika kemudian dilakukan penyaringan, hal ini sering menimbulkan kekecewaan atau konflik karena banyak yang harus dieliminasi. Oleh sebab itu, kami memilih menggunakan skema rekrutmen tertutup dan selektif. Saya secara langsung terlibat dalam diskusi mengenai calon-calon yang telah melalui proses profiling dan memiliki potensi kuat untuk terpilih. Penilaian kami mencakup popularitas, elektabilitas, dan ketokohan dari masing-masing individu. Pada masa kampanye, DPD Partai Golkar Kabupaten

Tebo melakukan kampanye terbuka dan kami mendorong para caleg untuk fokus pada pendekatan langsung kepada masyarakat yaitu melalui pertemuan terbatas di lingkungan rumah, desa, atau kampung. Setiap caleg diarahkan untuk membangun jaringan yang berbasis kekeluargaan dan kedekatan sosial. Dengan strategi ini, kampanye Pileg 2024 berlangsung secara efektif dan efisien, bahkan tanpa biaya besar untuk kampanye terbuka."

Pernyataan dari bapak Liga Marisa., selaku Ketua DPD, Partai Golkar Kabupaten Tebo, memberikan penjelasan tentang proses pengambilan keputusan dalam kandidasi perekrutan calon legislatif (caleg) di Partai Golkar Kabupaten Tebo untuk Pemilu 2024. Proses perekrutan dimulai dari seleksi awal di tingkat internal DPD Kabupaten tebo dengan secara tertutup. Dalam tahapan ini dilakukan menganalisis rekam jejak dan potensi para calon seperti profiling dan tracking yang didalamnya termasuk popularitas, elektabilitas, ketokohan, hingga latar belakang keluarga.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, khususnya dalam BAB VIII Pasal 11, proses rekrutmen untuk pengisian jabatan publik termasuk calon anggota legislatif (Caleg) dilaksanakan melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. Prosedur ini melibatkan berbagai jenjang struktur kepengurusan partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tahapan awal dalam proses kandidasi dimulai dengan fase pendaftaran, di mana partai memberikan kesempatan terbuka bagi seluruh kader yang memenuhi kriteria. Calon pendaftar diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan administratif, seperti status sebagai kader aktif, memiliki integritas yang terbukti baik di internal partai maupun di masyarakat luas, bebas dari

masalah hukum, serta menunjukkan komitmen terhadap visi, misi, dan platform perjuangan Partai Golkar. Proses pendaftaran dilakukan di tingkat kepengurusan yang sesuai dengan jenjang jabatan legislatif yang dituju yakni DPP untuk DPR RI, DPD I untuk DPRD Provinsi, dan DPD II untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, dalam hal kuota pencalonan, AD/ART Partai Golkar mengatur bahwa partai dapat menerima pendaftaran hingga dua kali lipat (200%) dari jumlah kursi yang tersedia di setiap daerah pemilihan (Dapil), sesuai dengan ketentuan internal partai dan regulasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai contoh, jika suatu Dapil memiliki alokasi 10 kursi legislatif, maka partai dapat menjaring hingga 20 bakal calon legislatif (Bacaleg) pada tahap awal. Namun, melalui mekanisme seleksi internal yang mencakup penjaringan dan penilaian elektabilitas, jumlah tersebut akan disaring hingga menyisakan 100% dari total kursi yang tersedia. Dengan demikian, hanya 10 Caleg terpilih yang akan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan diajukan ke KPU.

Tahap selanjutnya adalah proses penjaringan dan seleksi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi kader dengan potensi elektoral yang tinggi. Penjaringan ini dilaksanakan secara berjenjang oleh struktur kepengurusan partai, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa kandidat yang diajukan benar-benar representatif, memiliki daya saing politik, serta kredibel untuk menduduki jabatan legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah.

Setelah menerima pendaftaran dari kader yang berminat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, Partai Golkar melaksanakan serangkaian survei internal untuk mengukur tingkat elektabilitas dan popularitas masing-masing calon di daerah pemilihannya (Dapil). Survei ini dilakukan oleh struktur partai di tingkat DPD II dan DPD I, dengan pendekatan yang melibatkan berbagai metode, antara lain: pengumpulan data persepsi masyarakat terhadap calon, analisis tingkat pengenalan publik terhadap kandidat, serta wawancara dan diskusi internal guna menilai kapasitas politik dan potensi elektoral masing-masing calon. Hasil survei tersebut menjadi indikator kunci dalam menentukan siapa saja yang layak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

Tahapan lanjutan yang dilaksanakan adalah konsolidasi internal dan uji kelayakan (*fit and proper test*). Pada fase ini, partai menyelenggarakan rapat-rapat internal untuk menilai para calon berdasarkan hasil survei sebelumnya, rekam jejak di dalam partai, serta berbagai aspek kelayakan lainnya. Uji kelayakan ini mencakup sejumlah kriteria penting seperti kemampuan komunikasi politik, kapasitas kepemimpinan, komitmen terhadap Partai Golkar dan konstituen, strategi pemenangan yang diajukan oleh calon, serta pemahaman terhadap isu-isu strategis baik di tingkat lokal maupun nasional. Masukan dari pengurus partai di tingkat DPD I dan DPD II turut dijadikan bahan pertimbangan dalam menilai kelayakan kandidat. Calon-calun yang dinyatakan lolos dari proses ini akan dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Golkar.

Tahap akhir dalam proses kandidasi adalah penetapan calon legislatif (Caleg) secara resmi. Penetapan ini dilakukan setelah seluruh tahapan seleksi dilalui meliputi pendaftaran, survei, dan uji kelayakan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kader terbaik yang akan mewakili Partai Golkar dalam kontestasi Pemilu Legislatif pada level DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun kriteria dalam tahap penyaringan dan seleksi akhir meliputi: hasil survei terkait elektabilitas dan popularitas calon, rekam jejak dan kontribusi kader terhadap partai, kemampuan dalam hal kepemimpinan serta komunikasi politik, dan strategi kampanye yang dimiliki. Selain itu, dukungan yang diterima dari struktur partai di tingkat daerah dan pusat juga menjadi faktor penting dalam proses ini. Hanya kader yang memenuhi seluruh indikator tersebut yang kemudian ditetapkan secara resmi sebagai calon legislatif dari Partai Golkar.

Tahapan berikutnya dalam proses kandidasi legislatif di Partai Golkar adalah penyelenggaraan rapat internal di berbagai tingkatan struktur organisasi partai. Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih merupakan sosok yang paling layak untuk diusung sebagai calon legislatif. Di tingkat DPD II (Kabupaten/Kota), rapat difokuskan pada penetapan daftar calon untuk DPRD Kabupaten/Kota. Di tingkat DPD I (Provinsi), penetapan dilakukan untuk DPRD Provinsi, sementara di tingkat DPP (Nasional), ditetapkan daftar calon untuk DPR RI sekaligus pengesahan daftar caleg dari seluruh tingkatan.

Kriteria yang digunakan dalam rapat-rapat penetapan tersebut mencakup: kesesuaian jumlah calon dengan alokasi kursi legislatif yang tersedia di setiap daerah pemilihan (Dapil), terpenuhinya ketentuan afirmasi keterwakilan gender sebagaimana diatur oleh KPU (minimal 30% perempuan), serta perimbangan latar belakang calon berdasarkan daerah asal, profesi, dan strategi politik partai.

DCS ini menjadi dasar bagi DPP Partai Golkar dalam menyusun dan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). Tahapan penetapan DCT mencakup: pengesahan final oleh DPP berdasarkan hasil penyempurnaan DCS, pendaftaran resmi DCT ke KPU di seluruh tingkatan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota), pengumuman terbuka kepada publik mengenai daftar caleg yang akan berkompetisi dalam Pemilu Legislatif, serta penyusunan strategi kampanye dan pemenangan bagi para caleg yang telah ditetapkan.

Dalam proses penetapan DCT, Partai Golkar mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain: integritas dan kapabilitas calon dalam mewakili aspirasi masyarakat, kesesuaian jumlah calon dengan jumlah kursi yang tersedia di masing-masing Dapil, serta proporsi keterwakilan perempuan dan generasi muda dalam komposisi caleg. Setelah penetapan DCT, para kandidat secara resmi menjadi peserta Pemilu dan mulai melaksanakan strategi kampanye yang telah dirancang untuk mendukung keterpilihan mereka di legislatif.

Merujuk pada ketentuan dalam BAB VIII Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar, mekanisme seleksi calon legislatif (Caleg) diatur untuk dilakukan secara demokratis dan terbuka. Prinsip

transparansi dalam proses kandidasi ini bertujuan untuk menjamin pemilihan Caleg yang adil, objektif, serta bebas dari praktik intervensi politik yang tidak sehat.

Transparansi dalam proses kandidasi Partai Golkar diwujudkan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, pelaksanaan pendaftaran yang terbuka dan adil memungkinkan seluruh kader yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, sekaligus menghindari pola rekrutmen eksklusif yang hanya didasarkan pada kedekatan personal atau afiliasi politik tertentu. Kedua, pelibatan survei elektabilitas berbasis data menjadi instrumen penting dalam mengukur tingkat penerimaan calon di masyarakat secara objektif, sekaligus mencegah kecenderungan pengambilan keputusan yang subjektif atau berbasis nepotisme.

Ketiga, pelaksanaan uji kelayakan dilakukan secara transparan, melibatkan panel dari berbagai jenjang struktur partai guna menjamin seleksi yang kredibel dan bebas dari intervensi pihak internal yang mengedepankan kepentingan politik sempit. Keempat, proses penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) mengikutsertakan partisipasi kader dan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap potensi manipulasi atau rekayasa dalam penyusunan daftar calon.

Kelima, penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dijalankan secara terbuka dan akuntabel untuk memastikan hanya calon-calon terbaik yang lolos, serta mencegah adanya keputusan tertutup yang berpotensi memicu konflik internal. Keenam, pengawasan berkelanjutan terhadap para caleg dilakukan hingga masa pemilu sebagai langkah untuk menjaga integritas, menekan praktik politik

transaksional, serta memastikan komitmen caleg terhadap visi dan kemenangan partai. Seluruh ketentuan ini membentuk kerangka struktural yang kuat dalam AD/ART Partai Golkar, bertujuan mengurangi pengaruh eksternal yang tidak relevan dengan kepentingan institusional partai. Prinsip otonomi dan independensi dalam proses pengambilan keputusan menjadi elemen mendasar dalam menjamin bahwa seluruh proses kandidasi dilaksanakan secara kolektif, demokratis, dan berdasarkan mekanisme yang disepakati secara internal.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ayu Lestari bacaleg Partai Golkar yaitu:

“Kalau berdasarkan pengalaman kami, proses penetapan bacaleg di internal Partai Golkar Kabupaten selama ini dilakukan secara tertutup. Tidak ada pendaftaran terbuka atau mekanisme seleksi yang transparan. Semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua DPD II. Kami sebagai kader tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tersebut”.

Namun demikian, berdasarkan temuan di lapangan, terdapat indikasi penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan kandidasi di Kabupaten Tebo. Proses rekrutmen yang dijalankan oleh pengurus partai setempat tidak melalui mekanisme pendaftaran terbuka sebagaimana diatur dalam AD/ART, melainkan dilakukan secara tertutup dan langsung melalui penilaian internal, sehingga berpotensi mengurangi aspek transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi calon legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Liga Marisa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo, diketahui bahwa mekanisme rekrutmen calon legislatif (caleg) dilaksanakan secara tertutup. Proses seleksi ini sepenuhnya dilakukan di lingkup internal partai tanpa membuka ruang pendaftaran secara

luas kepada kader atau masyarakat, dengan alasan untuk menghindari potensi konflik dari pihak-pihak yang tidak lolos seleksi. Praktik semacam ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang secara normatif telah diatur dalam AD/ART Partai Golkar, yang pada dasarnya menekankan pentingnya memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi seluruh kader untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Penentuan kandidat yang akan diusung sebagai caleg disampaikan langsung oleh Ketua DPD II, yang didasarkan pada proses *profiling* dan *tracking* secara internal, tanpa melibatkan forum musyawarah yang inklusif dan partisipatif sebagaimana diharapkan dalam prinsip demokrasi internal partai.

Lebih lanjut, dalam hal penetapan nomor urut calon legislatif, Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Tebo Subhan Nazari menjelaskan;

”bahwa posisi nomor urut ditentukan berdasarkan hasil survei internal partai. Calon yang dinilai memiliki peluang elektoral lebih besar ditempatkan pada posisi atas dalam daftar caleg. Kendati pendekatan berbasis survei diakui sebagai salah satu instrumen yang sah dan diatur dalam AD/ART, menjadikan survei sebagai satu-satunya tolok ukur dalam penentuan nomor urut berisiko mengabaikan aspek substantif lainnya. Penilaian terhadap kapasitas kepemimpinan, pengalaman kaderisasi, serta kontribusi terhadap partai seharusnya juga menjadi bagian integral dalam proses penetapan tersebut. Jika pelaksanaan survei internal dilakukan secara tertutup dan tidak disertai dengan mekanisme transparansi yang memadai, maka proses ini berpotensi mengabaikan prinsip demokrasi internal partai dan mengurangi legitimasi keputusan di mata para kader.”

Dalam perspektif teoritik yang dikemukakan oleh Rahat Gideon, proses seleksi kandidasi dalam partai politik dapat dianalisis melalui beberapa dimensi penting. *Pertama*, dari segi inklusivitas dan eksklusivitas, proses pencalonan kandidat dapat dikategorikan berdasarkan keterbukaan akses terhadap

pencalonan. Model inklusif menggambarkan situasi di mana kesempatan mencalonkan diri terbuka luas, tidak hanya terbatas bagi kader atau pengurus partai, melainkan juga memungkinkan partisipasi warga negara secara umum. Sebaliknya, model eksklusif membatasi partisipasi dalam pencalonan dengan persyaratan tertentu yang membuat akses hanya tersedia bagi pihak-pihak tertentu dalam struktur partai, menjadikannya tertutup dan berpotensi kurang demokratis.

Kedua, berkaitan dengan aktor yang memiliki kewenangan dalam seleksi kandidat. Dalam hal ini, proses seleksi bisa dilakukan oleh organ internal partai yang terdiri dari elit partai atau pengurus pusat, ataupun bisa melibatkan partisipasi publik. Apabila seleksi melibatkan konstituen atau masyarakat luas, maka proses tersebut bersifat inklusif. Sebaliknya, ketika seleksi hanya dilakukan oleh kalangan elit partai, maka proses tersebut bersifat eksklusif. Tingkat keterlibatan pimpinan pusat ataupun delegasi kepada pimpinan daerah turut menjadi indikator dominasi elit dalam pengambilan keputusan pencalonan.

Ketiga, dimensi spasial atau derajat desentralisasi dalam proses seleksi. Penentuan kandidat bisa dilakukan secara tersentralisasi, di mana keputusan pencalonan dikendalikan sepenuhnya oleh pengurus pusat partai. Sebaliknya, jika proses seleksi dilakukan oleh pengurus daerah secara otonom, maka itu menunjukkan pola desentralisasi, di mana wewenang seleksi telah didelegasikan kepada struktur partai di tingkat lokal.

Keempat, terkait dengan metode pencalonan yang digunakan, menurut Rahat Gideon membedakan antara dua pendekatan utama. Yang pertama adalah model pemilihan *voting*, yaitu seleksi kandidat dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara, di mana seluruh kandidat berkompetisi secara terbuka dan dipilih melalui prosedur demokratis. Yang kedua adalah model penunjukan *appointment*, yaitu kandidat ditetapkan langsung oleh pimpinan partai tanpa melalui proses pemilihan, dan biasanya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari aktor atau lembaga lain di luar struktur pimpinan partai itu sendiri.⁶⁶

Berdasarkan teori yang dikaji, proses seleksi calon legislatif (caleg) di Partai Golkar Kabupaten Tebo cenderung merepresentasikan model rekrutmen yang bersifat eksklusif. Dalam praktiknya, hanya segelintir elit partai khususnya Ketua DPD yang memiliki otoritas utama dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan, tanpa melalui mekanisme seleksi terbuka yang melibatkan kader secara luas maupun masyarakat umum. Proses ini dilakukan secara tertutup, tanpa adanya pendaftaran terbuka atau forum partisipatif internal, sehingga kader internal tidak memiliki peluang yang setara untuk maju sebagai calon legislatif dibandingkan dengan figur eksternal yang direkrut langsung oleh elit partai.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini juga menyoroti pentingnya struktur kewenangan dalam proses seleksi kandidat. Dalam model yang lebih

⁶⁶ Gideon Rahat. (2009). Which Candidate Selection Method is the Most Democratic? *Government and Opposition*, 44(1), 68–90. [https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2008.01276.x](https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2008.01276.x)

demokratis, keputusan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai organ partai atau bahkan masyarakat luas. Namun, yang terjadi di Partai Golkar Kabupaten Tebo lebih mencerminkan praktik eksklusivisme, di mana keputusan strategis berada di tangan Ketua DPD, tanpa proses musyawarah internal yang inklusif. Hal ini tampak dari masuknya tokoh-tokoh eksternal seperti Ayu Lestari dan Yusuf Efendi yang direkrut tanpa melalui proses kaderisasi yang jelas, menandakan bahwa pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada pertimbangan jangka pendek daripada pengembangan kader internal partai. Lebih lanjut, apabila merujuk pada kategori model sentralisasi dan desentralisasi dalam teori seleksi kandidat, maka proses yang berlangsung di DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo dapat diklasifikasikan sebagai model desentralisasi karena keputusan dilakukan di tingkat lokal. Namun demikian, desentralisasi tersebut bersifat semu karena tetap terkonsentrasi pada otoritas Ketua DPD. Tidak terdapat mekanisme kolektif atau forum konsultatif yang memungkinkan keterlibatan anggota partai secara luas, sehingga proses seleksi tetap dikendalikan oleh elite terbatas dengan cara yang selektif dan tertutup.

Selain itu, teori juga mengidentifikasi dua pendekatan utama dalam pencalonan, yakni model voting dan model penunjukan langsung. Dalam konteks ini, proses kandidasi di Partai Golkar Kabupaten Tebo lebih sesuai dengan model penunjukan langsung. Tidak terdapat pemungutan suara internal dalam menentukan daftar caleg; sebaliknya, Ketua DPD memegang peran sentral dalam melakukan profiling dan penilaian terhadap calon potensial. Penetapan nomor urut caleg juga dilakukan berdasarkan survei internal, namun

tanpa transparansi terkait metodologi dan partisipasi kader dalam proses tersebut, yang semakin mengukuhkan karakter eksklusif dari proses seleksi ini.

Idealnya, penentuan nomor urut calon legislatif (caleg) tidak semata-mata didasarkan pada tingkat elektabilitas, melainkan juga harus mempertimbangkan berbagai aspek lainnya, seperti pengalaman kepemimpinan, kontribusi nyata terhadap partai, serta rekam jejak dalam aktivitas organisasi politik. Survei internal dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan urutan caleg, hal ini memperlihatkan kelemahan penerapan prinsip demokrasi internal di dalam partai.

Dalam kerangka teori yang digunakan, proses seleksi kandidat seharusnya mengedepankan nilai-nilai transparansi, inklusivitas, dan akuntabilitas. Artinya, keputusan dalam proses kandidasi harus melibatkan partisipasi kader secara luas dan dilakukan melalui mekanisme yang terbuka. Upaya memperkuat transparansi partai politik seyogianya dilakukan dengan mengadopsi pendekatan seleksi yang partisipatif dan berbasis pada prinsip demokrasi internal, bukan melalui pengambilan keputusan sepihak oleh elite partai.

Dalam pembahasan indikator *autonomy* dalam pengambilan keputusan, dapat ditemukan bahwa proses seleksi caleg di Partai Golkar Kabupaten Tebo memang tidak menunjukkan adanya intervensi dari pihak eksternal. Namun, justru terdapat dominasi kuat dari internal partai sendiri yang menyebabkan proses kandidasi menyimpang dari ketentuan formal sebagaimana tertuang dalam AD/ART Partai Golkar.

Pertama, rekrutmen caleg dilakukan secara tertutup, bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan transparansi yang diamanatkan dalam aturan dasar partai. Akibatnya, menjelang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), terdapat dua tokoh dari partai lain yang masuk dalam bursa caleg Golkar tanpa melalui proses kaderisasi yang sistematis. Kedua, penentuan kandidat sepenuhnya berada di tangan Ketua DPD, yang mengambil keputusan berdasarkan proses *profiling* dan *tracking* secara sepihak, tanpa musyawarah atau forum kolektif internal. Ketiga, mekanisme penentuan nomor urut caleg dilakukan berdasarkan survei internal yang tidak disampaikan secara terbuka kepada kader, serta minim partisipasi dari anggota partai.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Partai Golkar secara normatif menjunjung tinggi asas otonomi dan independensi dalam pengambilan keputusan, implementasi di tingkat lokal menunjukkan dominasi elite internal dan praktik seleksi yang tertutup. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi formal partai dan praktik politik yang terjadi di lapangan.

3.3 *Level Of Organization* (Alat Organisasi Yang Selalu Bekerja Untuk Kepentingan Partai Disetiap Tingkat Kepengurusan)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Basedau dan Stroh, *level of organization* merujuk pada keberadaan perangkat organisasi yang secara konsisten bekerja demi kepentingan partai di seluruh tingkatan struktur kepengurusan, mulai dari tingkat pusat hingga akar rumput. Dalam konteks ini, seluruh elemen kepengurusan Partai Golkar diarahkan untuk memperkuat posisi partai, baik dalam rangka membesarkan nama partai maupun meraih

kemenangan dalam pemilihan umum. Secara internal, partai politik dituntut memiliki kekuatan organisasi yang solid sebagai indikator sejauh mana partai tersebut telah melembaga. Kekuatan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan organisasi, serta mendorong semangat perjuangan di antara para kader, sehingga partai dapat berfungsi secara efektif dan berkesinambungan. Militansi yang dimiliki oleh setiap kader partai politik dalam menjalankan fungsi partai sesuai dengan ideologi, visi, dan misi partai secara konsisten dapat dijadikan sebagai indikator kekuatan organisasi partai politik.⁶⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis *level of organization*, yaitu sejauh mana perangkat organisasi partai bekerja secara terstruktur di setiap tingkatan kepengurusan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana struktur kepengurusan Partai Golkar khususnya di Kabupaten Tebo bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan partai, yaitu memperbesar kekuatan partai dan memenangkan pemilu. Penelitian ini akan menyoroti bentuk koordinasi yang dilakukan oleh kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Tebo, dari DPD II hingga DPD I dan DPP, dalam menghadapi Pemilu 2024. Hal ini menjadi relevan mengingat Partai Golkar di Kabupaten Tebo berhasil meraih kemenangan signifikan pada pemilu sebelumnya, dengan perolehan suara sebesar 27.283 suara dan berhasil

⁶⁷ Op.Cit. 690.

mengamankan 8 kursi legislatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ngatiran, S.E., anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Tebo yaitu :

” Keberhasilan Partai Golkar meraih delapan kursi legislatif tidak terlepas dari peran aktif struktur kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, DPP Partai Golkar memberikan motivasi dan arahan strategis kepada seluruh calon legislatif tidak hanya di Kabupaten Tebo, tetapi juga di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Dukungan tersebut diperkuat oleh koordinasi yang baik antara DPP, DPD Provinsi Jambi, dan DPD II Kabupaten Tebo. Sebelum pelaksanaan Pemilu 2024, seluruh caleg dibekali materi dan pembinaan yang membantu mereka dalam meningkatkan kapasitas dan strategi kampanye. Partai Golkar di Kabupaten Tebo berhasil meraih Satu kursi di dapil 1, dua kursi di dapil 2, tiga kursi di dapil 3, dan dua kurdi di dapil 4. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras para caleg yang secara aktif mengikuti arahan partai. H. Ngatiran, S.E., sendiri mencalonkan diri di dapil 3 yang meliputi Rimbo Bunjang dan Rimbo Ulu, dengan jumlah pemilih sekitar 4.141. Ia melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan seperti menghadiri majelis taklim. Strategi ini dinilai efektif dalam meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Tebo, dapat disimpulkan bahwa struktur kepengurusan Partai Golkar yang berjenjang dari tingkat pusat (DPP) hingga daerah (DPD I dan DPD II) berperan penting dalam mendukung kemenangan partai pada Pemilu 2024. Keberhasilan ini tidak terlepas dari strategi partai yang memberikan pembekalan kepada para calon legislatif sebelum pemilu. Materi yang diberikan membantu meningkatkan kapasitas komunikasi caleg serta kesiapan mereka menghadapi dinamika kompetisi politik.

Upaya pendekatan langsung kepada masyarakat juga menjadi faktor kunci. Misalnya, H. Ngatiran, S.E di dapil 3 aktif melakukan kegiatan sosial

seperti memberikan bantuan, aktif dimasyarakat dan kegiatan keagamaan seperti menghadiri majelis taklim dan khutbah. Pendekatan ini efektif dalam membangun kedekatan emosional, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat citra positif partai. Dengan bimbingan dari DPP, DPD I, dan DPD II, para caleg dibekali strategi yang tepat dalam menjaring suara dan merespons kebutuhan konstituen di masing-masing daerah pemilihan.

Berikut peneliti lampirkan jadwal pembekalan Caleg Partai Golkar Tebo dalam menghadapi pemilu 2024.

Tabel 3.3

Deskripsi Pembekalan DPP Kepada Caleg Partai Golkar Kabupaten Tebo

No	Tanggal/Tahun	Peserta	Jenis pembekalan	Deskripsi
1.	5 November 2023	DPP, DPD 1, DPD II, dan Peserta Caleg Partai Golkar	Materi Motivasi dan Penyemangat	Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memberikan arahan strategis kepada para calon legislatif (caleg) sebagai upaya memperkuat semangat juang, kerja sama, sinergi, dan loyalitas terhadap partai.
2.	8 November 2023	DPP, DPD 1, DPD II, dan Peserta Caleg Partai Golkar	Penyusunan Strategi Kampanye	Pembekalan tentang strategi Mendekati masyarakat, seperti sosialisasi sesuai Pendekatan personal, dan kegiatan sosial untuk membangun

				kepercayaan.
3.	14 November 2023	DPP, DPD 1, DPD II, dan Peserta Caleg Partai Golkar	Penguasaan Materi Partai dan Visi-Misi Partai Golkar Kabupaten Tebo	Pemahaman mendalam tentang visi-misi, program kerja, dan platform Partai Golkar serta Teknik menyampaikannya secara jelas kepada masyarakat.
3.	19 November 2023	DPP, DPD 1, DPD II, dan Peserta Caleg Partai Golkar	Pelatihan Komunikasi Publik	Peningkatan Kemampuan berbicara di depan umum, seperti teknik berceramah, berbicara formal, dan menjawab pertanyaan dari masyarakat atau media.
4.	25 November 2023	DPP, DPD 1, DPD II, dan Peserta Caleg Partai Golkar	Pendidikan Politik dan Kepemimpinan	Kemampuan komunikasi publik juga menjadi fokus, termasuk pelatihan berbicara di depan umum, teknik ceramah, komunikasi formal, serta keterampilan menjawab pertanyaan dari masyarakat dan media.
5.	6 Desember 2023	DPP, DPD 1, DPD II, dan Peserta Caleg Partai Golkar	Penguatan Solidaritas Internal Partai	Arahan untuk memastikan caleg saling mendukung, bekerja sama, dan menghindari persaingan internal yang dapat merugikan partai.

6.	11 Desember 2023	DPP, DPD 1, DPD II, dan Peserta Caleg Partai Golkar	Simulasi dan Latihan Praktis	Simulasi kampanye seperti mendekati pemilih, mengadakan acara, dan menghadapi isu sensitif; latihan untuk mengatasi berbagai situasi selama kampanye.
7.	12 Desember	DPP, DPD 1, DPD II, dan Peserta Caleg Partai Golkar	Strategi Berdasarkan Dapil	arahan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Ini mencakup pemetaan isu lokal, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan strategi kampanye yang kontekstual agar efektivitas kampanye dapat dimaksimalkan.

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Tebo terus menunjukkan konsolidasi yang kuat hingga ke tingkat kecamatan. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut terlihat dalam kegiatan Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (Muscamlub) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Kecamatan (PK) Tebo Ilir bersama jajaran DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo. Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama sebagai bagian dari penguatan solidaritas kader. Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, menekankan pentingnya perjuangan kolektif seluruh kader, khususnya di Tebo Ilir, untuk

memenangkan para calon legislatif dari Partai Golkar di semua tingkatan, mulai dari DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR RI. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kader wajib mendukung calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar dalam Pilpres.⁶⁸

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD Golkar Kabupaten Tebo, termasuk Ketua Harian Liga Marisa, Sekretaris DPD Mazlan, serta beberapa wakil ketua dan sekretaris bidang. Konsolidasi dan arahan yang diberikan dalam forum ini mencerminkan kesiapan struktur partai di tingkat daerah dalam menjalankan strategi kemenangan secara terorganisir menjelang Pemilu 2024.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Tebo Ilir, Liga Marisa dalam wawancara pers dengan media *jambiprima.com*, menjelaskan bahwa pendekatan berbasis sosial dan komunitas menjadi strategi utama dalam membangun kedekatan antara partai dan masyarakat. Kehadiran kader Partai Golkar dalam berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong, bantuan sosial, dan acara keagamaan, dinilai efektif dalam memperkuat ikatan emosional masyarakat terhadap partai. Pendekatan ini mendorong terciptanya rasa keterlibatan yang tinggi, sehingga masyarakat lebih terdorong memberikan dukungan saat pemilu.⁶⁹

⁶⁸ Ihsan. (2023). Muscamlub sunyoto resmi komandai golkar tebo ilir, *jambiprima.com*. <https://jambiprima.com/read/2023/04/16/16741/muscamlub-sunyoto-resmi-komandoi-golkar-tebo-ilirg>.

⁶⁹ Ibid.

Selain itu, di era digital, pemanfaatan media sosial menjadi bagian integral dari strategi kampanye. Ketua PK Kecamatan Rimbo Bujang, Ahmad, menekankan pentingnya penggunaan platform seperti Facebook dan Instagram untuk menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula. Melalui media sosial, informasi mengenai program kerja, kegiatan sosial, dan capaian Partai Golkar disebarluaskan secara masif, meningkatkan kesadaran politik terutama di kalangan generasi muda. PK juga berperan penting dalam mengawal proses pemungutan suara. Ketua PK Kecamatan Tebo Tengah, Ferry, mengungkapkan bahwa pihaknya menerapkan strategi pengamanan suara dengan menugaskan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan membangun jaringan relawan hingga tingkat RT dan RW. Strategi ini bertujuan untuk menjaga integritas suara dan memastikan proses pemilu berjalan secara jujur dan transparan, sehingga perolehan suara partai tetap terjaga bahkan meningkat di beberapa kecamatan.⁷⁰

Meski strategi kampanye berjalan efektif, para Ketua PK mengakui adanya tantangan dalam menjaga dukungan terhadap Partai Golkar, (Ihsan, 2023) terutama dalam menghadapi persaingan politik yang ketat. Ketua PK Kecamatan Muara Tabir, Ismail, menyampaikan bahwa persaingan dengan partai lain dalam menarik pemilih muda sangat signifikan. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi politik, edukasi melalui media sosial, dan keterlibatan kader dalam kegiatan sosial terus diperkuat.

⁷⁰ Ibid.

Sementara itu, Ketua PK Kecamatan Serai Serumpun, Irmawan, menyoroti pentingnya menjaga loyalitas kader dan pemilih, khususnya dalam konteks dinamika politik lokal yang kompetitif. Menurutnya, hubungan emosional yang kuat dengan pemilih serta perhatian terhadap kader melalui pelatihan dan pemberian motivasi secara berkala menjadi kunci dalam mempertahankan dukungan. Keberhasilan Partai Golkar dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Tebo tidak terlepas dari peran strategis kepengurusan tingkat kecamatan. Dengan koordinasi yang solid dari tingkat pusat hingga akar rumput, Partai Golkar berhasil meningkatkan perolehan kursi secara signifikan dibandingkan Pemilu 2019.⁷¹

Tabel 3.4
Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil 1 Kabupaten Tebo

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara
3	Eni Mawarti	3.518	1
1	Radi Hartono, S.Pd.I	2.706	2
2	Hananto Priyanbodo	2.165	3
4	Edi Kurniawan	882	4
9	Dede Bukhori	52	6
8	Rahmi Azizah	47	7
7	Nurhardiyanto	26	8
6	Ayu Lestari	16	9

⁷¹ Ibid.

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara
5	Adi Robiyono	68	10

Sumber: (KPU Kabupaten Tebo, 2024)

Tabel 3.5

Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil 2 Kabupaten Tebo

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara
2	Feri Ariyanto, S.Pd., M.Pd.	2.736	1
1	Liga Marisa, S.IP.	2.683	2
5	Nursimah, S.Pd., M.Pd.	2.479	3
6	Selamat Jalil	2.237	4
8	Edrizal	288	5
7	Ahyauddin	161	6
4	Halim	113	7
3	Lili Dianawati, S.H.	75	8

Sumber: (KPU Kabupaten Tebo, 2024)

Tabel 3.6

Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil 3 Kabupaten Tebo

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara
1	Khalis Mustiko, S.H.	8.487	1

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara
5	Ahmad Ankam, S.H., M.M.	4.246	2
4	H. Ngatiran, S.E.	4.141	3
2	Sukidi	3.956	4
3	Dita Novitasari	169	5
7	Mardi Martha, A.Md.	133	6
6	Aulia Choirunnisa	41	7
8	Budi Handayani	24	8
10	Noviyanto	15	9
9	Puji Rahayu	6	10

Sumber: (KPU Kabupaten Tebo, 2024)

Tabel 3.7

Perolehan Suara Caleg Partai Golkar Dapil 4 Kabupaten Tebo

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara
1	Sabki	2.907	1
5	Bambang Suegiarto, S.P.	2.900	2
3	Hustia Vanesha	718	3

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah	Peringkat Suara
2	Mus Mulyadi	98	4
4	Mariatun	63	5
7	Syamsinur	13	6
6	Ridhwan	12	7

Sumber: (KPU Kabupaten Tebo, 2024)

Dari hasil pemilu pada tabel diatas bisa dilihat bahwasannya pastai golkar dalam setiap dapil di Kabupaten Tebo memiliki perolehan suara yang tinggi.

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Hananto, selaku Anggota DPRD, dapat disimpulkan bahwa indikator *level of organization*, yaitu keberfungsian struktur organisasi partai di setiap jenjang kepengurusan, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap peningkatan perolehan suara Partai Golkar di Kabupaten Tebo pada Pemilu 2024. Hal ini tercermin dari aktifnya seluruh elemen organisasi partai, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga struktur kepengurusan tingkat kecamatan dan desa, dalam menjalankan strategi pemenangan secara kolektif.

Dalam konteks tersebut, alat organisasi Partai Golkar terutama kepengurusan di tingkat bawah seperti Pimpinan Kecamatan (PK) berperan strategis sebagai perpanjangan tangan partai dalam menjangkau konstituen di tingkat akar rumput. Pimpinan Kecamatan menjadi ujung tombak dalam mengoordinasikan kader di tingkat desa dan kelurahan guna memastikan

seluruh instruksi dan strategi partai dapat diimplementasikan secara efektif sesuai dengan kondisi lokal.

PK secara rutin mengikuti rapat koordinasi yang difasilitasi oleh DPD II Golkar Kabupaten Tebo, yang mencakup arahan tentang strategi kampanye, segmentasi pemilih, serta pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya di masing-masing wilayah. Selain bertanggung jawab dalam menggerakkan kader di lapangan, Pimpinan Kecamatan juga berfungsi sebagai penghubung antara partai dan masyarakat dalam membangun citra positif partai serta menyosialisasikan visi, misi, dan program kerja Partai Golkar secara komunikatif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar di Kabupaten Tebo memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kader di tingkat desa dan kelurahan memahami serta mengimplementasikan strategi politik partai secara seragam. Pemahaman ini dibangun melalui pertemuan rutin yang difokuskan pada evaluasi kondisi politik lokal dan penyusunan langkah-langkah strategis guna meningkatkan elektabilitas partai di masing-masing kecamatan.

Selain menjalankan fungsi koordinatif internal, PK juga aktif membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial seperti gotong royong, acara keagamaan, dan distribusi bantuan sosial. Aktivitas ini merupakan bagian dari pendekatan berbasis komunitas yang bertujuan memperkuat hubungan emosional antara Partai Golkar dan masyarakat di akar rumput.

Di sisi lain, dalam menghadapi era digitalisasi, Pimpinan Kecamatan memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram sebagai alat kampanye untuk menjangkau pemilih muda dan pemilih pemula. Melalui platform ini, diseminasi informasi terkait program kerja partai, kegiatan sosial, dan capaian-capaian Golkar dapat dilakukan secara efektif dan masif. Pendekatan digital ini turut berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya dari kalangan generasi muda.

Selain fokus pada kampanye dan sosialisasi, PK juga memegang peranan penting dalam pengamanan suara Partai Golkar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk menjamin integritas suara, PK menugaskan saksi di setiap TPS dan membentuk jaringan pengawasan di tingkat RT dan RW. Langkah ini bertujuan untuk menjaga soliditas pemilih hingga hari pemungutan suara serta mencegah potensi pelanggaran atau manipulasi suara. Dengan strategi ini, Partai Golkar di Kabupaten Tebo mampu menjaga akuntabilitas proses pemilu dan mengoptimalkan hasil suara secara adil dan transparan.

Keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Tebo dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya koordinasi yang efektif dan konsisten antara struktur kepengurusan di berbagai tingkatan organisasi. Di tingkat pusat, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar berperan sebagai pusat pengambilan kebijakan strategis. DPP memberikan arahan umum serta motivasi kepada seluruh kader dan calon legislatif (caleg) di Kabupaten Tebo melalui modul pembekalan yang bersifat strategis dan generik. Modul ini mencakup strategi

kampanye, teknik komunikasi publik, serta pemahaman yang mendalam mengenai visi, misi, dan platform partai.

Arahan dari DPP tersebut kemudian disesuaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Provinsi Jambi, yang berfungsi sebagai perantara antara tingkat pusat dan daerah. DPD I menyesuaikan strategi nasional dengan konteks sosial-politik Provinsi Jambi, termasuk karakteristik pemilih di Kabupaten Tebo. Setelah itu, DPD I menyampaikan hasil rapat dan materi pembekalan kepada DPD II Kabupaten Tebo untuk diimplementasikan secara lebih spesifik.

DPD II Kabupaten Tebo bertugas menerapkan strategi tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (dapil), dengan melibatkan Pimpinan Kecamatan sebagai pelaksana langsung di lapangan. Rapat koordinasi yang dilakukan secara berjenjang dari DPP, DPD I, hingga DPD II memastikan terjadinya keselarasan peran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas ataupun kekosongan instruksi.

Dengan mekanisme koordinasi yang sistematis dan adaptif ini, seluruh caleg Partai Golkar di Kabupaten Tebo dibekali dengan strategi yang relevan dan kontekstual, serta pemahaman yang menyeluruh terhadap visi dan misi partai. Hal ini terbukti berkontribusi terhadap peningkatan perolehan suara dan bertambahnya jumlah kursi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilu 2024.

Arahan strategis yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar berperan penting dalam menciptakan keselarasan visi dan misi di

seluruh jenjang kepengurusan partai, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Di tingkat Provinsi Jambi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I menjalankan fungsi sebagai perantara yang menerjemahkan kebijakan DPP ke dalam konteks lokal. Selanjutnya, DPD II Kabupaten Tebo mengambil peran aktif dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memberikan bimbingan intensif kepada para calon legislatif (caleg) di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

DPD II juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi kampanye di lapangan untuk memastikan bahwa instruksi partai dijalankan secara konsisten. Koordinasi yang efektif antar jenjang organisasi ini berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan Partai Golkar dalam meningkatkan perolehan suara di Kabupaten Tebo, yang pada Pemilu 2024 mencapai total 27.283 suara dan berhasil mengamankan 8 kursi di DPRD Kabupaten.

Pembekalan yang diberikan kepada caleg sebelum pelaksanaan pemilu turut meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi dinamika politik lokal. Materi pelatihan meliputi strategi komunikasi politik dan pendekatan yang sesuai untuk menjangkau masyarakat secara efektif. Caleg didorong untuk memahami karakteristik sosiokultural di dapil masing-masing, sehingga mampu menyesuaikan metode kampanye secara tepat sasaran. Dukungan dan arahan yang diberikan oleh DPP, DPD I, DPD II, dan Pimpinan Kecamatan mendorong para caleg untuk bekerja lebih optimal dalam menerapkan strategi pemenangan dan membangun hubungan yang erat dengan konstituen.

Selain aspek pembekalan dan strategi kampanye, reformasi internal juga menjadi bagian penting dari upaya penguatan kelembagaan partai. DPD II Kabupaten Tebo melakukan penataan ulang struktur internal guna meningkatkan efisiensi kerja dan efektivitas koordinasi antaranggota. Proses reformasi ini bertujuan untuk menciptakan organisasi partai yang lebih solid dan menghasilkan kader-kader yang kompeten. Kesiapan struktural dan kualitas sumber daya manusia yang baik menjadi salah satu faktor kunci yang memberikan keunggulan kompetitif bagi Partai Golkar di setiap dapil di Kabupaten Tebo.

Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar di Kabupaten Tebo menunjukkan tingkat dedikasi yang tinggi dalam mengarahkan keberhasilan partai pada Pemilu 2024. Fokus utama kepemimpinan ini tercermin dalam upaya penataan struktur organisasi internal serta pemberian dukungan maksimal kepada setiap calon legislatif (caleg) guna meningkatkan peluang kemenangan. Kepemimpinan yang kuat berkontribusi dalam menciptakan harmoni dan kerja sama yang solid di antara jajaran pengurus serta kader Partai Golkar di Kabupaten Tebo. Efektivitas kepemimpinan ini turut menjaga stabilitas internal partai sekaligus mengarahkan partai untuk mencapai target politiknya.

Partai Golkar Kabupaten Tebo berhasil menjaga kesatuan dan stabilitas organisasi sambil mengoptimalkan fungsi alat organisasi di seluruh jenjang, mulai dari Pimpinan Kecamatan, DPD II, DPD I Provinsi Jambi, hingga DPP. Strategi partai yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta koordinasi

yang sinergis antara tingkat pusat dan daerah menjadi indikator kekompakan internal yang kuat. Kondisi ini mendukung Partai Golkar dalam memperoleh dukungan signifikan dari masyarakat Kabupaten Tebo.

Mengacu pada indikator *level of organization* yakni kemampuan alat organisasi partai untuk bekerja secara aktif di setiap tingkat kepengurusan dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara DPP, DPD I Provinsi Jambi, DPD II Kabupaten Tebo, dan Pimpinan Kecamatan telah berlangsung secara sistematis dan efektif menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Pertama, DPP melaksanakan rapat koordinasi dengan DPD I untuk menyampaikan pembekalan strategis dan motivasi kepada para caleg baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kedua, DPD I Provinsi Jambi menjalin komunikasi yang intensif dengan DPD II Kabupaten Tebo dalam menerjemahkan dan menyesuaikan materi pembekalan dari DPP ke dalam konteks lokal masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Ketiga, peran Pimpinan Kecamatan sebagai ujung tombak partai di tingkat akar rumput sangat penting dalam mengoordinasikan aktivitas kader hingga ke desa dan kelurahan agar strategi partai dapat diimplementasikan secara tepat sasaran. Keempat, dedikasi tinggi dari jajaran DPD II Kabupaten Tebo dalam melakukan pembenahan struktural dan penguatan kelembagaan turut menjadi faktor utama keberhasilan Partai Golkar sebagai partai pemenang di Kabupaten Tebo pada Pemilu 2024.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi Pemilu 2024, setiap jenjang kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Tebo, mulai

dari tingkat kecamatan hingga tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), menunjukkan tingkat kekompakan dan koordinasi yang tinggi. Di tingkat kecamatan, Pimpinan Kecamatan (PK) menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan DPD II Kabupaten Tebo, DPD I Provinsi Jambi, hingga DPP. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh struktur organisasi partai berfungsi secara optimal dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya untuk mendukung pencapaian tujuan partai.

Keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Tebo dalam Pemilu 2024 mencerminkan bahwa struktur kepengurusan yang terorganisir dengan baik, pembekalan calon legislatif yang dilakukan secara sistematis, kerja keras para kader, serta pendekatan yang humanis kepada masyarakat merupakan elemen kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan perolehan suara dan posisi strategis partai di tingkat daerah.

3.4 Coherence (kekompakan para Anggota partai)

Koherensi antaranggota partai merujuk pada tingkat kekompakan anggota partai di lembaga legislatif, yang ditunjukkan melalui kesetiaan terhadap kebijakan partai dan tidak terjadinya pembelotan politik.⁷² Dalam konteks penelitian ini, aspek koherensi akan dianalisis melalui pendekatan terhadap upaya konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Tebo terhadap kader dan calon legislatif (caleg) menjelang Pemilu 2024.

⁷² Op.Cit. 279-288

Partai Golkar di Kabupaten Tebo, yang berhasil meraih posisi strategis sebagai partai pemenang dengan perolehan suara sebesar 27.283 suara dan berhasil mengamankan 8 kursi di daerah pemilihan (dapil), menunjukkan proses konsolidasi yang sistematis dan terstruktur. Konsolidasi ini mencerminkan kekompakan internal partai sebagai indikator dari koherensi anggota dalam menghadapi kontestasi politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Ngatiran, S.E., selaku anggota DPRD dari Partai Golkar Kabupaten Tebo, dijelaskan bahwa:

“Dalam menghadapi Pemilu 2024, DPD II Kabupaten Tebo menyelenggarakan konsolidasi secara menyeluruh sebanyak empat kali. Konsolidasi ini mencakup pembentukan tim relawan yang solid, di mana setiap caleg memiliki jaringan relawan masing-masing. Tujuan utama strategi ini adalah memperkuat basis dukungan masyarakat melalui pendekatan yang terstruktur. Langkah awal konsolidasi dimulai dengan merekrut relawan yang memiliki komitmen tinggi untuk memenangkan Partai Golkar. Setelah itu, para kader dan relawan menjalani pelatihan intensif yang mencakup peningkatan keterampilan komunikasi politik, pemahaman terhadap dinamika politik lokal, serta penguasaan strategi kampanye di lapangan. Pembentukan dan penguatan tim relawan ini berfungsi sebagai instrumen partai untuk menjangkau dan mengonsolidasikan dukungan masyarakat di setiap wilayah secara efektif dan terukur.”

Berdasarkan pernyataan Bapak H. Ngatiran, S.E., anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Tebo, proses konsolidasi yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Tebo dalam mempersiapkan kader menghadapi Pemilu 2024 sangat penting. Konsolidasi ini dilaksanakan secara berkala sebanyak 4 kali, dengan membentuk relawan di setiap kader calon legislatif partai serta memberikan pelatihan kepada kader dan relawan guna mempersiapkan diri secara optimal menghadapi pemilu.

Tabel 3.8
Pelatihan Kader caleg Partai Golkar Kabupaten Tebo

Aspek	Deskripsi
Tujuan	Menjamin bahwa setiap kader memiliki pemahaman yang komprehensif terkait dinamika politik, memiliki kapasitas dalam merumuskan strategi pemenangan yang efektif, serta mampu menjalankan peran sebagai pemimpin tim kampanye di tingkat akar rumput secara optimal.
Materi Pelatihan:	
Keterampilan Komunikasi Politik	<p>Kemampuan berbicara di depan umum dan berpartisipasi dalam debat politik dikembangkan guna meningkatkan keterampilan komunikasi publik yang efektif dalam konteks politik.</p> <p>Penerapan teknik-teknik komunikasi dalam menghadapi berbagai jenis audiens, baik dalam forum resmi maupun informal, guna menyampaikan pesan politik secara persuasif dan tepat sasaran.</p> <p>Pengembangan strategi personal branding yang ditujukan untuk membentuk dan memperkuat citra diri sebagai figur pemimpin politik yang kredibel dan dapat dipercaya oleh publik.</p>
Pemahaman Politik yang Lebih Mendalam	Pemahaman terhadap regulasi pemilu, strategi politik, serta dinamika kepartaian; analisis isu-isu politik nasional dan lokal; serta kemampuan membaca dan memanfaatkan hasil survei sebagai dasar penyusunan strategi kampanye yang efektif.
Strategi Lapangan untuk Kader	Pemetaan basis pemilih dan perencanaan strategi mobilisasi dukungan; pengelolaan struktur tim sukses beserta pembagian tugas; serta penerapan pendekatan persuasif kepada tokoh masyarakat dan kelompok berpengaruh.
Metode Pelatihan:	
Durasi Pelatihan	pelatihan lebih mendalam dan berjangka panjang (beberapa sesi).

Metode Pembelajaran	Menggunakan studi kasus dan diskusi dengan pakar politik.
Evaluasi	Latihan pemetaan wilayah dan simulasi debat

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Tabel 3.9

Pelatihan Relawan Partai Golkar Kabupaten Tebo

Aspek	Deskripsi
Tujuan	Memberikan pelatihan dasar kepada relawan untuk mendukung efektivitas kampanye dan menyampaikan pesan politik secara tepat kepada masyarakat.
Materi Pelatihan:	
Teknik Komunikasi Efektif	Relawan dilatih menyampaikan pesan kampanye secara persuasif, mengikuti simulasi debat untuk mengasah respons terhadap isu, dan melakukan role-playing guna meningkatkan kemampuan komunikasi langsung dengan pemilih.
Pemahaman Politik Sederhana	Materi mengenai Sistem Pemilu 2024 mencakup pemahaman tentang peraturan pemilu, mekanisme pemungutan suara, serta strategi kampanye yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diskusi dengan tokoh politik memberikan kesempatan bagi relawan untuk berdialog langsung dengan figur politik atau anggota legislatif dari Partai Golkar. Analisis isu politik lokal dilakukan dengan membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Tebo serta mengevaluasi peran partai dalam menawarkan solusi yang relevan.

Strategi Lapangan untuk Relawan	Pemetaan wilayah dan basis dukungan melibatkan pelatihan relawan dalam mengidentifikasi area konsentrasi pemilih serta merumuskan strategi untuk memperkuat dukungan di wilayah tersebut. Simulasi kampanye door-to-door memberikan latihan praktis kepada relawan dalam mengajak masyarakat memilih Partai Golkar melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga. Selain itu, pelatihan penyebaran bahan kampanye diarahkan pada teknik distribusi brosur, spanduk, dan materi kampanye lain secara efektif guna menarik perhatian pemilih.
Metode Pelatihan	
Durasi Pelatihan	1–2 hari (pelatihan singkat).
Metode Pembelajaran	Workshop dan simulasi langsung di lapangan.
Tahap Evaluasi dan Penguatan Strategi	Uji kompetensi relawan dilakukan dengan meminta peserta melakukan simulasi kampanye di depan pelatih dan rekan sejawat. Selanjutnya, evaluasi dan umpan balik diberikan untuk mengidentifikasi keunggulan serta area yang perlu diperbaiki selama pelatihan. Setelah itu, relawan yang telah terlatih dibagi ke dalam beberapa tim lapangan berdasarkan wilayah tugas masing-masing guna mengoptimalkan pelaksanaan kampanye.

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Dalam laporan kegiatan, ditampilkan dua kategori pelatihan yang berbeda, yakni pelatihan bagi kader caleg dan pelatihan khusus bagi relawan. Program ini menunjukkan upaya serius partai dalam menciptakan mesin politik yang terlatih dan siap bersaing dalam pemilu. Pelatihan kader calon legislatif (caleg) di Kabupaten Tebo dirancang sebagai program pengembangan kapasitas yang bersifat mendalam dan berkelanjutan. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa kader memiliki pemahaman yang komprehensif

mengenai politik, mampu menyusun strategi pemenangan yang efektif, serta memiliki kemampuan dalam memimpin tim sukses di lapangan. Materi pelatihan meliputi peningkatan keterampilan komunikasi politik, pemahaman atas regulasi pemilu dan dinamika partai politik, serta strategi operasional dalam penggalangan dukungan, termasuk pemetaan wilayah pemilih. Kader juga dilatih dalam kemampuan menjalin komunikasi dengan berbagai segmen masyarakat serta dalam membangun citra diri sebagai figur politik yang kredibel dan berkarakter.

Di sisi lain, pelatihan bagi relawan dirancang dalam durasi yang lebih singkat, umumnya berlangsung selama satu hingga dua hari. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para relawan dengan keterampilan dasar dalam mendukung kegiatan kampanye dan menyampaikan pesan politik kepada masyarakat secara efektif. Materi pelatihan meliputi teknik komunikasi persuasif, penyampaian pesan kampanye yang sederhana namun kuat, serta pemahaman terhadap isu-isu politik lokal yang relevan. Relawan juga dibekali strategi lapangan seperti pendekatan kampanye door-to-door serta cara menjalin interaksi dan membangun jaringan dengan calon pemilih.

Pendapat serupa disampaikan oleh Bapak Atiul Fuadiyah, S.H.I., M.H., Ketua KPU Kabupaten Tebo bahwa:

” Yang menilai langkah konsolidasi yang dilakukan Partai Golkar merupakan strategi umum yang diterapkan oleh partai politik menjelang pemilu. Hal ini menunjukkan keseriusan pengurus dalam mempersiapkan kader dan tim sukses agar dapat bekerja secara efektif di lapangan. Setiap calon legislatif diperkenankan memiliki tim relawan yang berfungsi menyosialisasikan visi, misi, serta program yang diusung. Strategi konsolidasi yang sistematis tersebut

berpotensi meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena pemilih akan menerima informasi yang lebih lengkap mengenai program dan visi calon yang didukung. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada kader dan tim sukses juga bertujuan meningkatkan keterampilan mereka sehingga lebih memahami proses politik secara menyeluruh.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Atiul Fuadiyah, S.H.I., M.H., Ketua KPU Kabupaten Tebo, strategi konsolidasi yang diterapkan oleh Partai Golkar berpotensi meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan keberadaan tim relawan yang terlatih dan mampu menyampaikan pesan kampanye secara efektif, pemilih menjadi lebih mudah memahami visi, misi, serta program yang diusung oleh calon legislatif. Kondisi ini memungkinkan peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, karena informasi mengenai calon legislatif yang dipilih menjadi lebih lengkap dan jelas. Pendapat senada disampaikan oleh Bapak Sukarmin Selaku RT dan salah satu masyarakat sadar politik, yang menegaskan bahwa:

” Partai Golkar telah menunjukkan langkah sistematis dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024 melalui konsolidasi kader dan caleg partai. Konsolidasi semacam ini tidak hanya berfungsi memperkuat kohesi internal partai, tetapi juga berperan sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap partai tersebut.

Menurut Sukarmin, keberadaan tim sukses yang solid dan relawan terlatih memudahkan Partai Golkar dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat serta menyampaikan pesan politik secara mudah dipahami. Faktor ini berkontribusi dalam meningkatkan citra Partai Golkar di mata publik dan akhirnya mendukung keberhasilan partai dalam Pemilu 2024.”

Berdasarkan pernyataan diatas, strategi konsolidasi yang diterapkan Partai Golkar tidak hanya berperan dalam memperkuat soliditas internal partai, tetapi juga turut membangun kepercayaan publik. Keberadaan tim sukses yang

terorganisir dan relawan yang telah dibekali pelatihan memungkinkan partai menjalin komunikasi politik yang lebih efektif dengan masyarakat, serta menyampaikan pesan-pesan politik secara jelas dan mudah dipahami. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan citra Partai Golkar di mata pemilih, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan dukungan elektoral dan kemenangan pada Pemilu 2024.

Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan dalam artikel berita media pers jambiprima.com, yang membahas konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Tebo dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024, khususnya melalui strategi pembentukan dan pemberdayaan relawan serta tim sukses. DPD II Partai Golkar Kabupaten Tebo meluncurkan program pelatihan intensif yang bertujuan meningkatkan keterampilan komunikasi, pemahaman politik, dan strategi lapangan bagi para kader dan tim sukses. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti simulasi kampanye dan sesi motivasi yang dipandu oleh pakar politik dan tokoh masyarakat. Dengan membekali relawan dan tim sukses dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai, DPD II Partai Golkar Kabupaten Tebo berharap membentuk tim kampanye yang solid dan efektif dalam menarik dukungan masyarakat.⁷³

Pelatihan yang diberikan tidak hanya berfokus pada teknik kampanye, tetapi juga mencakup penyediaan alat-alat kampanye seperti poster, selebaran, dan

⁷³ Soetiono, B. (2023). Golkar Tebo Siapkan Strategi jitu Demi Target 10 Kursi dan Menangkan Pileg 2024. kabargolkar: https://kabargolkar.com/read/kabar_daerah/31864/golkar-tebo-siapkan-strategi-jitu-demi-target-10-kursi-dan-menangkan-pileg-2024

merchandise partai. Untuk meningkatkan visibilitas partai di mata pemilih, alat-alat kampanye tersebut disebarluaskan secara luas di seluruh Kabupaten Tebo. Selain itu, tim sukses juga melaksanakan kampanye door-to-door, yang dianggap efektif dalam teori komunikasi politik karena memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara calon legislatif dan pemilih. Melalui pendekatan personal ini, tim sukses dapat menyampaikan program partai secara langsung, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta mengajak partisipasi aktif dalam pemilihan. Pendekatan ini sejalan dengan teori keterlibatan politik yang menyatakan bahwa interaksi langsung dapat meningkatkan partisipasi dan loyalitas pemilih.⁷⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H. Ngatiran, S.E. anggota DPRD Partai Golkar Kabupaten Tebo, Bapak Atiul Fuadiyah, S.H.I., M.H. Ketua KPU Kabupaten Tebo, dan Bapak Sukarmin Masyarakat politik Kabupaten Tebo, memberikan gambaran komprehensif mengenai langkah-langkah strategis yang dijalankan Partai Golkar Kabupaten Tebo dalam mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2024. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah konsolidasi partai, yang dilakukan secara berkala sebanyak tiga hingga empat kali. Tujuan utama dari konsolidasi ini adalah untuk memperkuat dukungan elektoral dari masyarakat serta memastikan kesiapan kader dan relawan dalam menghadapi kontestasi politik.

Pada tahap awal, konsolidasi difokuskan pada proses rekrutmen relawan tim sukses yang memiliki komitmen terhadap kemenangan Partai Golkar. Setiap

⁷⁴ Ibid.

calon legislatif (caleg) diwajibkan membentuk tim relawan yang solid guna mendukung aktivitas kampanye di berbagai wilayah. Relawan ini berperan penting dalam menyosialisasikan visi, misi, serta program-program caleg kepada masyarakat. Pembentukan tim relawan yang terorganisir dan terarah menjadi elemen krusial dalam membangun jaringan dukungan yang kokoh di tingkat akar rumput. Untuk meningkatkan efektivitas kerja para kader dan relawan, Partai Golkar juga menyelenggarakan program pelatihan intensif yang dirancang khusus bagi caleg dan tim sukses. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan keterampilan komunikasi, penguatan pemahaman terhadap dinamika politik, serta penguasaan strategi kampanye di lapangan.

Selain aspek pelatihan, sistem evaluasi dan pengawasan juga menjadi bagian integral dari strategi konsolidasi yang diterapkan oleh Partai Golkar Kabupaten Tebo. Evaluasi terhadap kader caleg dilakukan melalui kegiatan simulasi debat dan latihan pemetaan wilayah, yang bertujuan untuk menilai kesiapan mereka dalam menghadapi dinamika politik di lapangan. Sementara itu, kinerja relawan diawasi secara berkala untuk memastikan bahwa tugas-tugas kampanye dijalankan sesuai dengan strategi dan arahan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur efektivitas kerja, tetapi juga untuk memperkuat kualitas pelibatan kader dan relawan dalam struktur pemenangan partai menjelang Pemilu 2024.

Konsolidasi yang dilaksanakan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Tebo tidak hanya difokuskan pada penguatan struktur internal partai, tetapi juga diarahkan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat

pemilih. Melalui pendekatan yang sistematis meliputi rekrutmen relawan, pelatihan, dan evaluasi kinerja Partai Golkar berupaya memperkuat efektivitas tim sukses di tingkat akar rumput serta mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat. Diharapkan, melalui kehadiran relawan yang memiliki kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memadai, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai visi dan misi calon legislatif, sehingga mampu membuat pilihan yang rasional dan sesuai dengan kepentingan publik.

Solidaritas dan kekompakan yang dibangun oleh partai tidak hanya mencakup kader inti, tetapi juga melibatkan relawan sebagai aktor kunci dalam proses pemenangan pemilu. DPD II Partai Golkar Kabupaten Tebo menyadari pentingnya membentuk tim kampanye yang solid dan terkoordinasi dengan baik, sehingga proses pemberdayaan relawan diarahkan untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menyampaikan pesan politik secara tepat dan persuasif kepada masyarakat.

Melalui pelatihan yang intensif dan terstruktur, relawan dan tim sukses tidak hanya menjalankan peran mereka secara individu, melainkan sebagai bagian dari satu sistem kerja yang terpadu. Pola kerja kolektif ini menunjukkan tingkat koordinasi dan kekompakan organisasi partai dalam menghadapi dinamika kontestasi Pemilu 2024, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kampanye dan pencapaian tujuan elektoral partai.

Konsolidasi yang dilakukan Partai Golkar di Kabupaten Tebo merupakan bagian dari strategi menyeluruh untuk membentuk tim kampanye yang solid dan

efektif melalui program pelatihan serta pemberdayaan. Dengan melibatkan relawan dan tim sukses dalam perumusan serta implementasi strategi partai, Golkar berupaya memastikan keseragaman pemahaman dan arah gerak seluruh elemen tim. Pelatihan yang diberikan secara merata menjadi kunci dalam menyatukan persepsi dan langkah, sehingga meminimalkan potensi perbedaan pandangan internal. Kondisi ini turut meningkatkan efektivitas komunikasi politik dan memudahkan proses perolehan dukungan dari masyarakat, karena relawan dan tim sukses telah dibekali dengan keterampilan komunikasi yang baik serta strategi kampanye yang terarah.

Dikaji berdasarkan indikator *Coherence* (kekompakan anggota partai), terlihat bahwa kekompakan kader Partai Golkar di Kabupaten Tebo dibangun melalui mekanisme konsolidasi yang dilaksanakan secara berkala, yakni sebanyak tiga hingga empat kali. Konsolidasi tersebut mencakup agenda strategis, antara lain pembentukan unit-unit khusus seperti Relawan Tim Sukses yang melekat pada setiap calon legislatif. Selain itu, kegiatan pelatihan yang diberikan menekankan pada aspek strategi komunikasi politik dan pemahaman konteks pemilu, dengan fokus pada penguatan peran relawan dalam menggalang dukungan di tingkat akar rumput masyarakat Kabupaten Tebo.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori pelebagaan partai politik yang dikembangkan oleh Basedau & Stroh, yang meliputi beberapa dimensi pelebagaan: *roots in society* (mengakar dalam masyarakat) dapat disimpulkan Partai Golkar berhasil melakukan pelebagaan partai politik yang baik di Kabupaten Tebo melalui strategi yang mengakar kuat di masyarakat. Capaian peningkatan suara Partai Golkar pada Pemilu 2024 di daerah ini mencerminkan keberhasilan partai dalam membangun koneksi historis, menjalin hubungan dengan berbagai elemen sosial, dan menjalankan fungsi partai secara optimal. Semua ini menjadi fondasi dalam memperkuat citra positif dan memperluas dukungan masyarakat Kabupaten Tebo terhadap Partai Golkar.

Pada dimensi *autonomy* (Indenpenden dalam mengambil keputusan) dapat disimpulkan bahwa meskipun Partai Golkar secara normatif menjunjung tinggi asas otonomi dan independensi dalam pengambilan keputusan, implementasi di tingkat lokal menunjukkan dominasi elite internal dan praktik seleksi yang tertutup. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi formal partai dan praktik politik yang terjadi di lapangan. Selanjutnya *level of organization* (Alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai disetiap tingkat kepengurusan) yaitu keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Tebo dalam Pemilu 2024 mencerminkan bahwa struktur

kepengurusan yang terorganisir dengan baik, pembekalan calon legislatif yang dilakukan secara sistematis, militansi para kader, serta pendekatan yang humanis kepada masyarakat merupakan elemen kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan perolehan suara dan posisi strategis partai di tingkat daerah.

Pada dimensi *Coherence* (kekompakan anggota partai) bahwa kekompakan kader Partai Golkar di Kabupaten Tebo dibangun melalui mekanisme konsolidasi yang dilaksanakan secara berkala, yakni sebanyak empat kali. Konsolidasi tersebut mencakup agenda strategis, antara lain pembentukan unit-unit khusus seperti relawan tim sukses yang melekat pada setiap calon legislatif. Selain itu, kegiatan pelatihan yang diberikan menekankan pada aspek strategi komunikasi politik dan pemahaman konteks pemilu, dengan fokus pada penguatan peran relawan dalam menggalang dukungan di tingkat akar rumput masyarakat Kabupaten Tebo.

Berdasarkan temuan di atas dapat menunjukkan bahwa proses pelembagaan partai Golkar Kabupaten Tebo berjalan dengan baik ditunjukkan oleh tiga indikator yaitu dalam aspek *roots in society* (mengakar dalam masyarakat), Partai Golkar berhasil membangun keterikatan yang mendalam dengan masyarakat melalui pendekatan historis, kolaborasi sosial-keagamaan, serta kepedulian terhadap isu-isu lokal. Dari segi *level of organization* (alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai di setiap tingkat kepengurusan), struktur partai yang rapi, pembinaan caleg yang sistematis, serta kerja keras kader menjadi kunci keberhasilan Partai Golkar dalam meraih dukungan

masyarakat pada Pemilu 2024. Sementara itu, dalam dimensi *coherence* (kekompakan anggota partai), kekompakan internal dibangun melalui konsolidasi rutin dan pembentukan tim relawan yang solid, serta pelatihan strategi komunikasi politik yang berorientasi pada penguatan dukungan di tingkat akar rumput.

Tetapi ada kelemahan dibagian *autonomy* (independen dalam mengambil keputusan) yaitu meskipun secara formal menjunjung prinsip kemandirian, praktik di tingkat lokal masih didominasi oleh elit partai dengan sistem seleksi yang tertutup, mencerminkan adanya jarak antara prinsip normatif dan realitas pelaksanaan. Oleh karena itu, jika partai politik ingin memiliki hasil yang bagus dalam pemilu maka perlunya penataan kelembagaan partai dengan baik.

4.2 Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Konsolidasi Pelembagaan Partai Politik Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Studi Kasus Partai Golongan Karya di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. Disarankan agar Partai Golkar memperkuat kelembagaan internal dengan cara mendorong transparansi dan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan serta seleksi kader. Meskipun secara normatif partai menjunjung tinggi prinsip kemandirian, kenyataannya di tingkat lokal masih terjadi dominasi oleh elite partai dan sistem seleksi yang tertutup. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi struktural di tubuh partai, seperti pembentukan mekanisme seleksi yang lebih terbuka, pelibatan kader dari berbagai tingkatan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan prinsip otonomi partai. Selain itu, peningkatan

kapasitas kader dalam hal tata kelola organisasi dan pengambilan keputusan kolektif juga penting untuk memastikan agar prinsip otonomi tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar terimplementasi dalam praktik politik sehari-hari.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi yang lebih mendalam mengenai mekanisme internal partai di tingkat lokal, khususnya dalam hal seleksi calon legislatif dan pengambilan keputusan strategis. Penelitian perbandingan antardaerah juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai sejauh mana pelebagaan partai berjalan secara efektif dalam berbagai konteks sosial dan politik. Selain itu, penting pula untuk meneliti aspek inklusivitas partai terhadap kelompok-kelompok seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat marginal agar pelebagaan partai mencerminkan prinsip keterwakilan yang adil. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual, penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan tata kelola partai politik di Indonesia, khususnya dalam hal penguatan dimensi otonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Z. (2006). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF. Penerbit, CV. Syakir Media Press.
- Al-Hamdi, R., Sakir, S., Atmojo, M. E., & Efendi, D. (2020). *Penelitian Kualitatif: Pegangan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Pelajar.
- Astawa, I. P. A. (2018). *Demokrasi Indonesia*. Bandung: Universitas Udayana.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (1982). *Basics of Science Politics*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Baru Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage Publications.
- Eko Handoyo dan Puji Lestari. (2017). *Pendidikan Politik*, Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Fakrulloh, Z. A. (2014). *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huntington, S. P. (2006). *Political Order in Changing Societies*. Yale University Press.
- Lestari, E. H. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon cahaya.
- Lerxy J. Molerong. (2018). *Meroder Pernerlirtiran Kualirtatirf (Erdirsir rervir, Irssuer 112)*. PT Rermaja Rosdakarya.
- Panebianco, A. (1988). "Political Parties: Organization and Power." . *Cambridge University Press.*, 22-25.
- Risnaedi, A. S. (2021). *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Penerbit Adab.

Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutopo, H. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Semarang: Universitas Sebelas Maret.

Subarktir. R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. PT Grmedia Widiasana Indonesia.

Syafiie, I. K., & Azhari. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

Anawati, D. M., & Al-Hamdi, R. (2020). Soliditas Partai dan Stabilitas Perolehan Suara: Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Umum Legislatif 2014. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 105–125.

Basedau, M., & Stroh, A. (2008). *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. GIGA Working Paper.

Basri, H. (2021). Strategi Komunikasi Politik DPD Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 22–32.

Basedau, M. &. (2008). *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*. African: GIGA Working Paper No. 69.

Budiardjo, C. (1992). The Legacy of the Suharto Dictatorship. *The East Timor Question: The Struggle for Independence from Indonesia*, 51–67.

Cahyono, D. d. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar. *pendidikan, ilmu sosial dan politik*, 832-842.

Dewi, N. L. R. D., Suacana, I. W. G., & Rukmawati, D. (2023). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(1), 17–29.

Diamond, L., & Gunther, R. (2001). *Political Parties and Democracy*. JHU Press.

Gideon Rahat. (2009). Which Candidate Selection Method is the Most Democratic? *Government and Opposition*, 44(1), 68–90.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2008.01276.x>

Gunther, R., & Diamond, L. (2003). Species of Political Parties: A New Typology. *Party Politics*, 9(2), 167–199.

Immanuel, G. K., & Djuyandi, Y. (2024). Strategi Partai Golkar dalam Pemilu

- 2024: Studi Kasus Airin Rachmi Diany pada Dapil Banten III. *Journal of Political Issues*, 6(1), 72–86.
- Levitsky, S. (2003). "Transforming Labor-Based Parties in Latin America: Argentine Peronism in Comparative Perspective.". *Cambridge University Press.*, 23-26.
- Levitsky, S. (1998). Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case, and the Case for Unpacking the Concept. *Party Politics*, 4(1), 77–92.
- Meifilina, A. (2021). Media Sosial sebagai Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Melakukan Pendidikan Politik. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 3(2), 101–110. <https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2.80>
- Nurfebriansyah, A. R., Sholihah, R., & Chairiyah, S. Z. (2024). Political Campaign of the Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) during the New Order and Reform Era. *Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 4(2), 66–79.
- Primadi, A., Efendi, D., Amriyanto, H., & Sanahdi, R. R. (2017). Making Informal Politics Work. Case of Local-Direct Election in Bangka Selatan, Indonesia. *2nd International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2017)*, 468–477.
- Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8, 5–29. <https://doi.org/10.1177/1354068802008001001>
- Razaqtiar, A. Z. (2019). Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Upaya Partai Golkar dalam Memenangkan Pasangan Calon Juliyatmono-Rohadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. *Jurnal Politik Muda*, 5(3). <https://journal.unair.ac.id/JPM@peran-partai-politik-dalam-pemilihan-kepala-daerah--studi-upaya-partai-golkar-dalam-memenangkan-pasangan-calon-juliyatmono---rohadi-di-pemilihan-article-10807-media-80-category-8.html>
- Scarrow, S. E. (2005). Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives: Implementing Intra-party Democracy. . *National Democratic Institute.*, 31-33.
- Thelen, K. (1999). "Historical Institutionalism in Comparative Politics." . *Annual Review of Political Science.*, 2, 369–404.
- Wibisono, D. D., Puspa, R., & Widodo, S. (2023). Strategi Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Mempertahankan Suara Partai Sebagai Partai Tengah. *EDU SOCIETY: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 832–842. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.284>
- Yanto, A. (2022). Fenomena dan Indikasi Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. *Jurnal Governance Dan Administrasi*

Publik, 6(2), 57–64. <https://doi.org/10.33369/jgoap.v6i2.11076>

Yusuf, M. &. (2020). "Digital Political Communication and Young Voters in Indonesia." . *Jurnal Komunikasi Politik*, 6(1), 13–25.

Peraturan dan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar, Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar, Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang- Undang Dasar, Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Website Internet

Abraham, J. (2024). *Daftar 35 Caleg Terpilih DPRD Kabupaten Tebo Periode 2024-2029, Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024*. <https://pontianak.tribunnews.com/2024/03/12/daftar-35-caleg-terpilih-dprd-kabupaten-tebo-periode-2024-2029-hasil-rekapitulasi-suara-pemilu-2024>.

Kantongi Rekomendasi DPP Partai Golkar, Khalis Mustiko Jabat Ketua DPRD Tebo. (2024). Diakses dari <https://www.jambirupdater.co/rerad/2024/09/13/115455/kantongir-rerkomerndasir-dpp-partair-golkar-khalirs-mustirko-jabat-kertua-dprd-terbo/>

Golkar Masih Optimis di Tebo, Meski Banyak Ditinggal Caleg Potensial. (2024). Diakses dari <https://www.jambiupdate.co/read/2024/01/28/111376/golkar-masih-optimis-di-tebo-meski-banyak-ditinggal-caleg-potensial/2>

Bermultimedia.com. (n.d.). Golkar Keluar Sebagai Pemenang Pileg di Tebo - Radarjambi.co.id: Berita Independen & Akurat. Retrieved from <https://radarjambi.co.id/read/2024/03/06/32057/golkar-keluar-sebagai-pemenang-pileg-di-tebo/>

KPU Tebo Sukses Gelar Rapat Pleno Pemilu 2024 Golkar Pemenang, PDIP Masih Runner Up, PKB Posisi Ketiga. (2024). Diakses dari <https://www.jambiupdate.co/read/2024/03/05/112009/kpu-tebo-sukses-gelar-rapat-pleno-pemilu-2024--golkar-pemenang-pdip-masih-runner-up-pkb-posisi-ketiga/>

Golkar Masih Optimis di Tebo, Meski Banyak Ditinggal Caleg Potensial. (2024). Diakses dari <https://www.jambiupdate.co/read/2024/01/28/111376/golkar-masih-optimis-di-tebo-meski-banyak-ditinggal-caleg-potensial/>

Bermultimedia.com. (n.d.). KPU Tebo Tetapkan Golkar Peraih Kursi Terbanyak Di Pileg 2024 - Radarjambi.co.id: Berita Independen & Akurat. Diakses dari <https://radarjambi.co.id/read/2024/05/03/32360/kpu-tebo-tetapkan-golkar-peraih-kursi-terbanyak-di-pileg-2024/>

Hasil pemilu 2024 <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/21/hasil-pemilu-2024-partai-golkar-paling-spektakuler-sekalipun-bukan-pemuncak>

Ihsan. (2023). Muscamlub sunyoto resmi komandai golkar tebo ilir, *jambiprima.com*.
<https://jambiprima.com/read/2023/04/16/16741/muscamlub-sunyoto-resmi-komandoi-golkar-tebo-ilirg>

KPU Tebo Tetapkan Golkar Peraih Kursi Terbanyak Pemilu. Jambicorner. Diakses dari <https://www.jambicorner.com/content/daerah/kpu-tebo-tetapkan-golkar-peraih-kursi-terbanyak-pemilu>

Website resmi Partai Golkar <https://www.partaigolkar.com/profil/>

Novianti Setuningsih, R. N. C. (2024). *Susunan Lengkap Kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024-2029*. Kompas.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/19565941/susunan-lengkap-kepengurusan-dpp-partai-golkar-periode-2024-2029?page=all>

Soetiono, B. (2023). Golkar Tebo Siapkan Strategi jitu Demi Target 10 Kursi dan Menangkan Pileg 2024. kabargolkar:
https://kabargolkar.com/read/kabar_daerah/31864/golkar-tebo-siapkan-strategi-jitu-demi-target-10-kursi-dan-menangkan-pileg-2024

Tawakal ikbal. (2024). *Kenapa Partai Golkar Lambangnya Pohon Beringin? Ini Filosofi dan Maknanya*. Pikiran-Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-017638855/kenapa-partai-golkar-lambangnya-pohon-beringin-ini-filosofi-dan-maknanya?page=all>

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Nama : Khalis Mustiko, S.H

Jabatan : Ketua DPDR Kabupaten Tebo

Tanggal : 20 Desember 2024

Pukul : 11:08 WIB

Lokasi : Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo

Pertanyaan : Apakah kenaikan suara partai golkar di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa partai tersebut telah berhasil memperkuat akar sosialnya dalam masyarakat?

Jawaban : kenaikan suara Partai Golkar di Kabupaten Tebo ini merupakan bukti bahwa partai ini telah semakin mengakar di masyarakat. Kami telah melakukan berbagai strategi untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan solusi nyata yang dirasakan manfaatnya.

Pertanyaan : Faktor-faktor apa saja yang memungkinkan partai golkar untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar di Kabupaten Tebo pada tahun 2024? Apakah faktor-faktor tersebut bersifat struktural atau lebih dipengaruhi oleh kebijakan partai?

Jawaban : Ada beberapa faktor utama. Pertama, kepemimpinan yang kuat dan solid di internal partai, yang memastikan mesin politik berjalan efektif. Kedua, strategi kampanye berbasis data dan teknologi yang memungkinkan kami menyusun pesan yang lebih relevan dengan masyarakat. Ketiga, konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan membangun kepercayaan. Saya

melihat faktor-faktor ini adalah kombinasi antara aspek struktural dan kebijakan partai yang terus beradaptasi dengan dinamika masyarakat.

Pertanyaan : Bagaimana Partai Golkar menjalin hubungan dengan kelompok sosial, komunitas, atau organisasi di Kabupaten Tebo?

Jawaban : Kami aktif menjalin komunikasi dan keterlibatan langsung dengan berbagai kelompok sosial seperti organisasi keagamaan. Kami hadir dalam kegiatan mereka, mendengar aspirasi, dan memberikan solusi yang konkret. Dengan begitu, masyarakat merasa dekat dengan Partai Golkar, bukan hanya saat menjelang pemilu, tetapi sepanjang waktu.

Pertanyaan : Bagaimana Partai Golkar di Kabupaten Tebo menerapkan strategi untuk membangun keterikatan tersebut, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil pemilu?

Jawaban : Kami menerapkan berbagai strategi, mulai dari kampanye berbasis data, pendekatan komunikasi yang lebih personal, hingga pemanfaatan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, kader-kader kami aktif turun ke lapangan, mendengarkan masyarakat, dan memberikan solusi nyata. Strategi ini terbukti efektif karena masyarakat merasa didengar dan diakomodasi, sehingga kepercayaan terhadap Golkar semakin meningkat.

Pertanyaan : Bagaimana Partai Golkar menerapkan strategi yang mendukung kedekatannya dengan masyarakat di Kabupaten Tebo? Analisis pendekatan-pendekatan yang digunakan Partai Golkar dalam merespons kebutuhan lokal dan bagaimana strategi tersebut berdampak pada meningkatnya suara partai di Pemilu 2024?

Jawaban : Kami selalu berusaha responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pendekatan yang kami gunakan tidak hanya bersifat formal dalam kampanye, tetapi juga melalui interaksi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengedepankan program yang konkret, seperti bantuan sosial, penguatan ekonomi lokal, serta dukungan terhadap kegiatan sosial dan budaya. Dengan strategi ini, masyarakat melihat Golkar bukan sekadar partai politik, tetapi mitra dalam pembangunan. Dampaknya, perolehan suara kami meningkat signifikan, dan kami optimis bisa terus mempertahankan kepercayaan masyarakat di masa mendatang.

Nama : Liga Marisa, S.IP

Jabatan : Ketua DPD Kabupaten Tebo

Tanggal : 03 Januari 2025

Pukul : 11:00 WIB

Lokasi : Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo

Pertanyaan : Bagaimana pola kaderisasi dan rekrutmen yang dijalankan Partai Golkar di Kota Sungai Penuh berperan dalam independen dalam pengambilan Keputusan?

Jawaban : Dalam Partai Golkar, proses rekrutmen calon legislatif (Caleg) telah diatur secara sistematis dalam AD/ART partai, dan setiap kader yang ingin maju harus melalui tahapan seleksi internal yang cukup ketat. Tahapan ini dimulai dari seleksi awal terhadap calon-calon potensial, yang kemudian dilanjutkan dengan proses analisis mendalam oleh DPD Kabupaten Tebo. Dalam proses ini, kami melakukan profiling dan tracking untuk menilai latar belakang, kapasitas, serta rekam jejak calon sebelum akhirnya ditentukan siapa saja yang layak untuk dicalonkan. Sebagai Ketua DPD, saya juga menekankan bahwa ada perbedaan mendasar antara Pilkada dan Pileg, terutama dari sisi kebutuhan logistik dan dukungan finansial. Pengalaman saya sebelumnya di Pileg bersama partai lain menunjukkan bahwa Pileg sangat bergantung pada kemampuan finansial kandidat. Oleh karena itu, dalam proses seleksi, kami turut mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, kemampuan pendanaan calon, hingga latar belakang keluarganya. Dalam konteks sosial kita, jaringan keluarga besar juga memainkan peran penting dalam membentuk basis dukungan di lapangan. Perlu saya sampaikan bahwa rekrutmen tidak dilakukan secara terbuka. Hal ini didasari oleh pengalaman kami

sebelumnya, di mana pembukaan pendaftaran secara umum justru memicu ekspektasi yang tinggi dari banyak pihak. Ketika kemudian dilakukan penyaringan, hal ini sering menimbulkan kekecewaan atau konflik karena banyak yang harus dieliminasi. Oleh sebab itu, kami memilih menggunakan skema rekrutmen tertutup dan selektif. Saya secara langsung terlibat dalam diskusi mengenai calon-calon yang telah melalui proses profiling dan memiliki potensi kuat untuk terpilih. Penilaian kami mencakup popularitas, elektabilitas, dan ketokohan dari masing-masing individu. Pada masa kampanye, DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo melakukan kampanye terbuka dan kami mendorong para caleg untuk fokus pada pendekatan langsung kepada masyarakat yaitu melalui pertemuan terbatas di lingkungan rumah, desa, atau kampung. Setiap caleg diarahkan untuk membangun jaringan yang berbasis kekeluargaan dan kedekatan sosial. Dengan strategi ini, kampanye Pileg 2024 berlangsung secara efektif dan efisien, bahkan tanpa biaya besar untuk kampanye terbuka.

Pertanyaan : Bagaimana peran tiap alat organisasi, dari tingkat pusat hingga lokal bawah, dalam mendukung kesuksesan Partai Golkar di Kabupaten Tebo bisa atau dapat mempengaruhi kenaikan perolehan suara pada Pemilu 2024? di daerah tersebut.

Jawaban : Setiap organisasi di Partai Golkar memiliki peran strategis dalam memperkuat basis dukungan partai. Struktur organisasi kami dimulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan. Di tingkat pusat, kebijakan dan strategi besar disusun untuk memastikan bahwa semua daerah bergerak dalam satu visi. Di tingkat daerah, kami menerjemahkan strategi tersebut ke dalam program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kinerja

organisasi di tiap tingkat inilah yang membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga berdampak langsung pada perolehan suara di Pemilu 2024 Kabupaten Tebo.

Pertanyaan : Seberapa penting peran setiap alat organisasi di berbagai tingkat kepengurusan dalam mendukung kenaikan suara Partai Golkar di Kabupaten Tebo? Diskusikan bagaimana alat organisasi ini bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pemilih.

Jawaban : Peran organisasi di semua tingkatan sangat krusial. Di tingkat lokal, kami memiliki jaringan kader yang aktif di masyarakat, yang terus berinteraksi dengan pemilih dan menyerap aspirasi mereka. Informasi ini kemudian diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi untuk dianalisis dan diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih konkret. Dengan pola kerja sama seperti ini, kami bisa memahami dengan lebih baik apa yang diinginkan masyarakat Kabupaten Tebo dan menyesuaikan strategi kampanye sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pertanyaan : Sejauh mana upaya yang dilakukan oleh pengurus Partai Golkar di Kabupaten Tebo dalam menjaga kekompakan anggota partai dapat membantu meningkatkan daya tarik partai di mata pemilih?

Jawaban : Menjaga kekompakan di dalam partai adalah hal yang sangat penting karena kekuatan sebuah partai politik bukan hanya ditentukan oleh program dan strategi kampanye, tetapi juga oleh soliditas internalnya. Di Partai Golkar Kabupaten Tebo, kami selalu memastikan komunikasi yang baik antaranggota melalui pertemuan rutin, koordinasi yang intensif, serta forum diskusi yang terbuka bagi semua kader.

Pertanyaan : Menurut bapak, apakah kekompakan ini berpengaruh terhadap daya tarik Partai Golkar di mata pemilih?

Jawaban : Sangat berpengaruh. Masyarakat ingin melihat partai yang stabil, solid, dan tidak mudah terpecah belah. Ketika sebuah partai terlihat kompak, pemilih akan lebih percaya bahwa partai tersebut mampu menjalankan programnya dengan baik. Kekompakan ini juga menciptakan citra positif bahwa Golkar adalah partai yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan mampu bekerja secara efektif untuk masyarakat.

Nama : H. Ngatiran, S.E

Jabatan : Anggota DPD Kabupaten Tebo

Tanggal : 12 maret 2025

Pukul : 11:19 WIB

Lokasi : Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak peran kepengurusan di tingkat bawah, seperti pengurus kecamatan dan desa/kelurahan, dalam menjalankan program dan strategi Partai Golkar untuk meraih dukungan masyarakat?

Jawaban : Kepengurusan di tingkat bawah memiliki peran yang sangat krusial. Mereka adalah ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Pengurus kecamatan dan desa/kelurahan bertugas menyosialisasikan program-program partai serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang kemudian dibawa ke tingkat atas untuk diperjuangkan. Selain itu, mereka juga berperan dalam membangun jaringan relawan dan simpatisan yang berkontribusi pada peningkatan suara Partai Golkar di Pemilu 2024.

Pertanyaan : Menurut Bapak, bagaimana Partai Golkar di Kabupaten Tebo mempersiapkan seluruh anggota dan kader agar tetap solid dan kompak sebelum menghadapi Pemilu 2024?

Jawaban : Partai Golkar selalu menekankan pentingnya kekompakan dan kebersamaan di antara anggota dan kader. Kami melakukan berbagai pertemuan rutin untuk membangun komunikasi yang baik, termasuk melalui rapat koordinasi, silaturahmi, dan diskusi strategis. Selain itu, kami juga menguatkan rasa memiliki terhadap partai dengan melibatkan semua anggota dalam kegiatan sosial dan

program kemasyarakatan. Dengan demikian, kader merasa terlibat aktif dan memiliki tanggung jawab bersama dalam perjuangan memenangkan pemilu.

Pertanyaan : Sebagai anggota DPRD, bagaimana Bapak membangun hubungan yang lebih erat antara Partai Golkar dan masyarakat? Seberapa besar pengaruh pendekatan ini terhadap hasil Pemilu 2024?

Jawaban : Saya selalu berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, baik melalui kunjungan langsung, dialog terbuka, maupun melalui program-program sosial yang bermanfaat. Pendekatan ini berdampak sangat besar karena masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam proses politik. Dengan kepercayaan yang semakin kuat, dukungan terhadap Golkar pun semakin meningkat dan berkontribusi pada hasil positif di Pemilu 2024.

Pertanyaan : Bagaimana menurut pandangan bapak tentang mekanisme internal di Partai Golkar Kabupate Tebo dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berasal dari kepentingan partai dan masyarakat, bukan dari tekanan eksternal?

Jawaban : Saya melihat bahwa mekanisme internal Partai Golkar di Kabupaten Tebo memiliki beberapa prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan partai dan masyarakat. Salah satunya adalah melalui mekanisme musyawarah dan mufakat yang telah menjadi tradisi di tubuh Partai Golkar.

Pertanyaan : Sebagai anggota DPRD dari Partai Golkar, bagaimana Bapak melihat efektivitas struktur organisasi partai dalam memberikan dukungan bagi para kader dan calon legislatif untuk meraih kemenangan di Pemilu 2024?

Jawaban : Saya melihat struktur organisasi Partai Golkar cukup efektif dalam mendukung kader dan calon legislatif. Partai memiliki sistem yang sudah teruji, mulai dari kaderisasi, pendidikan politik, hingga strategi pemenangan yang terstruktur. Kami mendapatkan pembinaan langsung dari pengurus partai di berbagai tingkatan, termasuk strategi dalam melakukan pendekatan ke masyarakat serta memaksimalkan jejaring politik yang sudah dibangun. Selain itu, Golkar juga memiliki program-program yang konkret bagi masyarakat, yang tentunya menjadi nilai tambah bagi para kader dan caleg dalam berkampanye.

Nama : Kharis

Jabatan : sekretaris dan wakil bidang organisasi golkar

Tanggal : 03 Januari 2025

Pukul : 10:00 WIB

Lokasi : Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo

Pertanyaan : bagaimana Partai Golkar Kabupaten Tebo mempersiapkan seluruh anggota dan kader agar tetap solid dan kompak sebelum menghadapi Pemilu 2024?

Jawaban : Partai Golkar Kabupaten Tebo telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kekompakan seluruh anggota dan kader. Salah satunya melalui penguatan komunikasi dan konsolidasi di setiap tingkatan, mulai dari DPD kota hingga pengurus kecamatan dan desa/kelurahan. Kami juga aktif mengadakan pertemuan rutin untuk menyatukan visi, mengatasi perbedaan pendapat secara internal, serta memastikan bahwa semua kader bekerja dalam satu garis perjuangan yang sama. Selain itu, semangat kebersamaan selalu ditekankan dalam setiap kegiatan partai, baik dalam agenda politik maupun sosial kemasyarakatan.

Pertanyaan : Dengan kemenangan besar di Pemilu 2024, bagaimana Partai Golkar memastikan bahwa kepercayaan masyarakat ini tetap terjaga?

Jawaban : Kemenangan ini adalah amanah, dan kami sadar bahwa menjaga kepercayaan masyarakat jauh lebih sulit daripada sekadar meraihnya. Oleh karena itu, kami akan terus bekerja dengan transparan dan akuntabel. Kami juga akan memastikan bahwa janji-janji kampanye benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang nyata. Selain itu, evaluasi dan konsolidasi internal juga terus dilakukan agar partai tetap solid dalam menghadapi tantangan ke depan.

Pertanyaan : Bagaimana menurut Bapak peran kepengurusan di tingkat bawah, seperti pengurus kecamatan dan desa/kelurahan, dalam menjalankan program dan strategi Partai Golkar untuk meraih dukungan masyarakat?

Jawaban : Peran pengurus tingkat bawah sangat krusial. Mereka adalah ujung tombak partai dalam menyampaikan visi, misi, serta program Partai Golkar kepada masyarakat. Pengurus kecamatan dan desa/kelurahan memiliki jaringan yang luas dan langsung berinteraksi dengan masyarakat setiap hari. Oleh karena itu, mereka menjadi garda terdepan dalam memastikan program partai diterima dan didukung oleh warga. Selain itu, mereka juga berperan dalam mengorganisir kegiatan sosial dan politik yang bisa meningkatkan elektabilitas partai, seperti bakti sosial, diskusi publik, hingga pendampingan bagi warga dalam berbagai urusan.

Pertanyaan : Sejauh mana Partai Golkar Kabupaten Tebo bebas dari pengaruh luar dalam menentukan kebijakan dan kandidat yang akan diusung?

Jawaban : Partai Golkar memiliki otonomi yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam penentuan kandidat legislatif. Semua keputusan diambil melalui mekanisme internal yang sudah diatur dalam aturan partai. Kami memastikan bahwa tidak ada intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi proses ini. Meskipun dalam politik selalu ada dinamika dan berbagai kepentingan, Partai Golkar tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa keputusan harus diambil berdasarkan kepentingan partai dan aspirasi masyarakat, bukan tekanan dari kelompok tertentu.

Pertanyaan : Bagaimana kekompakan para anggota partai Golkar dalam memebrikan kemenangan dipemilu 2024 kemarin?

Jawaban : Pertama, kalau kita sudah jadi kader apapun kebijakan keputusan partai kita tetap tunduk, dan kemudian kita sebagai kader apapun program siap kita laksanakan, kita tunduk terhadap program, struktur partai itu secara tidak langsung.

Pertanyaan : Faktor apa saja yang menurut Bapak membuat Partai Golkar begitu diterima oleh masyarakat Kabupaten Tebo?

Jawaban : Ada beberapa faktor utama. Pertama, Partai Golkar selalu mengutamakan kedekatan dengan masyarakat melalui komunikasi yang aktif dan pendekatan yang langsung. Kami sering turun ke lapangan untuk mendengarkan aspirasi warga dan mencari solusi atas permasalahan mereka. Kedua, Golkar memiliki kader-kader yang bekerja nyata, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Kami memastikan bahwa program yang kami usung benar-benar bermanfaat dan tidak hanya bersifat seremonial. Ketiga, keberlanjutan dalam perjuangan politik. Golkar bukanlah partai yang baru muncul, tetapi sudah lama mengakar di Kabupaten Tebo. Generasi demi generasi telah melihat bagaimana Golkar berkontribusi dalam pembangunan daerah, sehingga kepercayaan terhadap partai.

politik atau pemodal besar, dalam menentukan siapa yang akan dicalonkan oleh Partai Golkar?

Jawaban : Partai Golkar memiliki mekanisme internal yang kuat dan independen dalam menentukan calon. Kami tidak mengizinkan adanya intervensi dari pihak luar yang bisa mengganggu objektivitas dalam proses seleksi. Kami menyadari bahwa dalam politik selalu ada pihak-pihak yang ingin mempengaruhi keputusan, namun Partai Golkar berpegang teguh pada prinsip meritokrasi dan demokrasi internal. Kandidat yang diusung haruslah mereka yang benar-benar memiliki

kapabilitas, bukan sekadar didukung oleh kepentingan tertentu. Dengan cara ini, Golkar bisa tetap menjadi partai yang dipercaya oleh masyarakat dan terus memperoleh dukungan yang signifikan.

Surat Lampiran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. 082162363247, 082162363212/email:hukum@unja.ac.id/laman:law.unja.ac.id

Nomor : 5833/UN21.4/PT.01.04/2025 27 Februari 2025
Lampiran : -
Hal : Pengantar izin penelitian dan Permintaan Data Skripsi

Yth Ketua Partai Golkar Kabupaten Tebo
di
Tempat

Dengan hormat, kami mengharapkan bantuannya untuk dapat memberikan izin penelitian dan permintaan data kepada mahasiswa

Nama : Nadya Sitta Cahya safitri
Nomor Induk Mahasiswa : B1B221117
Program Studi : Ilmu Politik

Sehubungan dengan penulisan Skripsi Yang Berjudul “ **Analisis Konsolidasi Pelembagaan Partai Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2024 Studi Kasus Partai Golkar DiKabupaten Tebo Provinsi Jambi** ” Setelah mahasiswa tersebut diatas melakukan penelitian dan permintaan data, mohon kiranya dapat mengirimkan surat kepada kami bahwa mahasiswa tersebut benar melakukan penelitian.

Demikian atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum.
NIP 196512041990032001

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*”
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PARTAI GOLKAR



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN TEBO**

Jl. Lintas Tebo-Bungo KM.10 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo

Tebo, 27 Februari 2025

Nomor : 09/DPDPG-TB/II/2025
Lampiran :-
Perihal : Penelitian

Kepada Yth
Bapak
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Hukum Uneversitas Jambi
di
Jambi

Dengan Hormat

Sehubungan dengan adanya surat pengantar izin penelitian dan Permintaan Data Skripsi Mahasiswa Universitas Jambi Fakultas Hukum :

Nama : Nadya Sitta Cahya safitri
Nomor Induk Mahasiswa : BIB221117
Program Studi : Ilmu Politik

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Tebo dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo pada Rabu 26 Februari 2025.

Demikianlah disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN TEBO**

KHALIS MUSTIKO, SH
KETUA



MAZLAN, S.Kom, ME
SEKRETARIS

Dokumentasi wawancara

- Wawancara bersama Khalis Mustiko, S.H selaku ketua DPRD Kabupaten Tebo



- Wawancara bersama Agus Rubianto, S.E.,M.M



- Wawancara bersama kharis selaku ketua bidang organisasi



- Wawancara bersama bapak H ngatiran selaku anggota DPRD Tebo



- Wawancara bersama Aulia rahmi selaku anggota Partai Golkar



- wawancara bersama Sukarmin selaku ketua rt 05



CURRICULUM VITAE



Nadya Sitta Cahya Safitri adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Kecamatan Rimbo Bujang pada tanggal 25 Mei 2002 anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari Bapak Sukarmin dan Ibu Purwaningsih. Beragama Islam yang saat ini berusia 23 tahun, beralamat di Jalan Sultan Thaha Unit 2, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Memulai pendidikan di TK PERTIWI II Rimbo Bujang (2008-2009). Melanjutkan sekolah di Madrasah iptida'iyah MIS NURUL HAQ Jalan 5 Unit 2, Rimbo Bujang (2015-2018). Kemudian lanjut ke SMA NEGERI 2 TEBO Jalan R.A Kartini, Wirotho Agung, mengambil jurusan Bahasa (2018-2021). Setelah selesai menempuh Sekolah Menengah Atas, penulis memutuskan untuk lanjut ke jenjang perguruan tinggi S1 (Strata satu) di Universitas Jambi dengan Program Studi Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).